M.A.N.U.S.I.A D.A.Y.A.K

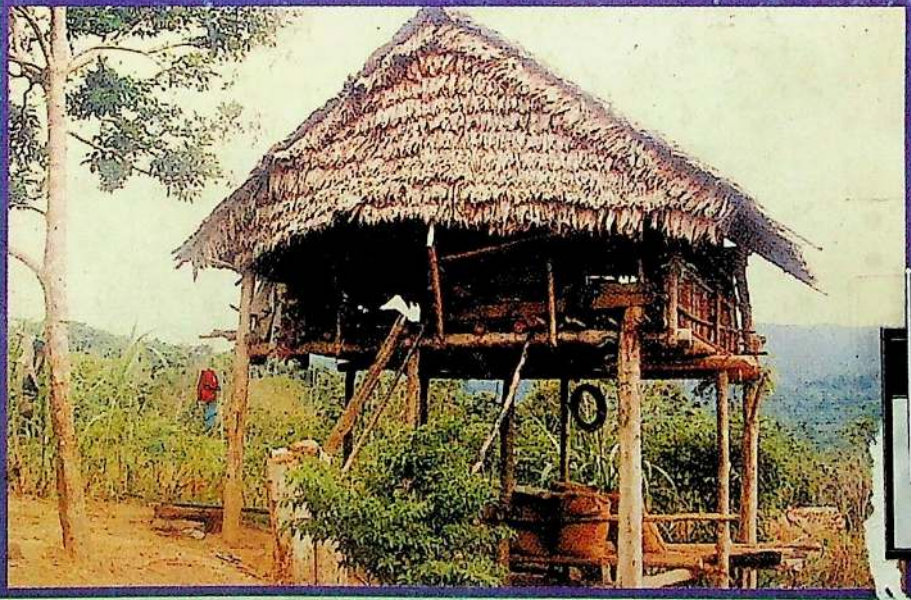
ORANG KECIL YANG TERPERANGKAP MODERNISASI

Editor
Stepanus Djuweng



ARIA
8.3
PA

"...Apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu...dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka; juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka.
Haruslah kamu menduduki negeri itu, dan diam di sana, sebab kepadamulah Kuberikan negeri itu untuk diduduki...kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kamu: kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil..." (Bilangan. 33.51-54).



PUSTA
307.

KPA

M.A.N.U.S.I.A D.A.Y.A.K
ORANG KECIL YANG TERPERANGKAP MODERNISASI

M.A.N.U.S.I.A D.A.Y.A.K
ORANG KECIL YANG TERPERANGKAP MODERNISASI

Editor:
Stepanus Djuweng
Kata Pengantar:
Stepanus Djuweng
Layout dan Olah data Komputer:
Nico Andasputra
Edi Petebang
Ilustrasi:
Nico Andasputra
Yosep Cupertino
@ Penerbit:
Institute of Dayakology Research
and Development (IDRD) Pontianak

Cetakan I Oktober 1996

M.A.N.U.S.I.A D.A.Y.A.K

ORANG KECIL YANG TERPERANGKAP MODERNISASI

* Stepanus Djuweng * Vincentius Julipin
* Wolas Krenak * Paulus Florus * Nico Andasputra
* THG Mering Ngo * Benedict Topin
* Prof. KMA. Usop MA. * J.J. Kusni
* Suryadi * Roedy Haryo AMZ.

DAFTAR ISI

KALIMANTAN:
DULU, SEKARANG DAN MASA DEPAN
Sebuah Pengantar vii.

Bagian Pertama
LINTASAN SEJARAH:
SUATU SUKU PADA SEBUAH PULAU

01. Manusia Dayak, Orang Kecil Yang Terperangkap Moderenisasi 1.
02. Raja Dayak Diantara Para Sultan Melayu 7.
03. Rumah Panjang Jantung Kebudayaan Dayak 14.
04. Imigrasi Cina dan Emas Di Kalimantan Barat 20.
05. Dilema Pembauran Di Kalimantan Barat 28.
06. Mencermati Pola Hubungan Cina Dayak Di Kalimantan Barat 34.
07. Pergeseran Pola-Pola Penggunaan Bahasa Di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju 41.
08. Dayak Di Sarawak: Sebuah Perbandingan 51.

Bagian Kedua
KONDISI LINGKUNGAN DAN HAK-HAK ADAT

09. Dampak Sosial HPH (Kasus Semandang Kanan) 59.
10. Terjepit Hutan Produksi, Hutan Lindung Tempati Lahan Rakyat 69.
11. Hak Ulayat Hilang, Hilang Juga Masyarakat Adat 75.
12. Transformasi Budaya dan Hak Atas Sumber Daya Alam 80.

13. Tanah Dari Segi Adat, Religio Magis, dan Ekonomi Di Kalimantan Barat 88.
14. Simpukng Munan Dayak Benuaq: Suatu Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Hutan 95.

Bagian Ketiga
PESTA RAKYAT: KEBUDAYAAN UNIVERSAL

15. Pesta Rakyat: Kebudayaan Universal 111.
16. Pesta Budaya Dayak 116.
17. Dange: Pesta Padi Orang Kayan 121.
18. Naik Dango: Upacara Syukuran 126.
19. Upacara Tiwah, Mengantar Roh Ke Negeri Arwah 133.
20. Kaamatan, Festival Pasca Panen Rakyat Sabah 137.

KALIMANTAN: DULU, SEKARANG DAN MASA DEPAN

SEBUAH PENGANTAR

"...Apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu ... dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka; juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu, dan diam di sana, sebab kepadamulah Kuberikan negeri itu untuk diduduki....kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kamu: kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil..." (Bilangan, 33,51-54).

Kutipan di atas memang diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama. Jika itu benar, maka akibat dari kutipan di atas secara jelas dapat dilihat sekarang ini. Tanah Kanaan telah menjadi sumber konflik yang abadi. Tanpa pretensi untuk menyangkal pesan suci yang tersirat dalam kutipan itu --yang adalah tugas dari para teolog Kristen untuk menginterpretasinya secara benar--toh tetap saja ia menggelitik para pembaca yang awam. Satu hal yang sangat jelas, ia mengingatkan kita bahwa perampasan terhadap hak-hak tanah tradisional kaum pribumi, adalah sebuah persoalan klasik namun senantiasa aktual. Ia bermula sejak Bangsa Isreal kembali dari tanah Mesir. Kejadian serupa lantas terulang berkali-kali di sean-

tero pelosok planet kita, hingga menjadi bagian dari sejarah kehidupan umat manusia.

Pelayaran spektakuler Christoforus Columbus yang menemukan Amerika 500 tahun silam--yang diperingati secara besar-besaran tahun 1992--adalah peristiwa yang patut dicatat sebagai awal penindasan dan pengekspoloitasian bangsa kulit putih terhadap terhadap suku bangsa Indian. Sejarah kemudian terus bergulir, sarat dengan berbagai kekejaman dari bangsa kulit putih yang menyebut dirinya "beradab" terhadap kaum pribumi yang "primitif" di pelosok bumi ini. Di Hindia Belanda, perjuangan Pangeran Diponegoro agaknya merupakan contoh yang kolosal dari perjuangan kaum pribumi dalam mempertahankan perampasan terhadap tanah oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Disayangkan, teknik dan pengalaman kaum penjajah itu kemudian diadopsi dan dipraktekkan kembali oleh banyak pemerintah negara-negara merdeka dewasa ini terhadap rakyat mereka sendiri. Akibatnya, jutaan manusia menjadi korban karena pengambilalihan tanah secara paksa, yang dikemas secara elegan dalam suatu *moral insentive*, "demi kepentingan umum dan pembangunan nasional."

Dikavling Inggris dan Belanda

Borneo (Kalimantan), adalah Tanah Kanaan di Khatulistiwa yang sudah menjadi ajang sengketa sejak ratusan tahun silam. Biji emas yang dikandung perut bumi Kalimantan, telah mengundang sejumlah besar imigran dari daratan Cina. Pada pertengahan abad ke-19, ia menjadi rebutan antara Britania Raya dan Kerajaan Belanda.

Adalah James Brooke, seorang petualang kebangsaan Inggris--yang agaknya sering membaca Kitab Perjanjian Lama, sehingga hafal dan lantas menerapkannya secara gamblang--tiba di Kuching tahun 1839. Ia mendirikan pusat pemerintahannya dan mengangkat diri menjadi Raja Kulit Putih (The White Ra-

jah) hingga tiga generasi. Pelan-pelan, tanah Sarawak yang sudah dikuasai oleh Sultan Brunei diambil-alih, sambil menundukkan suku Bangsa Dayak, yang ditakuti sebagai pengayau tetapi tidak berdaya berhadapan dengan Sang Raja Putih itu.

Di belahan utara Claude Lee Moses (1865) membeli kawasan utara dari wilayah Kesultanan Brunei yang kemudian dijual kepada Alfred Dent, serang pedagang Inggris. Dent lantas membeli bagian Borneo yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu tahun 1884. Maka berdirilah *North Borneo [Chartered] Company* yang menguasai seluruh kawasan Sabah sekarang ini. Dengan demikian, jadilah wilayah Kesultanan Brunei terjepit di antara dua kekuasaan Inggris. Oleh karena itu, Kerajaan Britania Raya kemudian menempatkan seorang *British Adviser* di Bandar Seri Bengawan. Maka jadilah kawasan itu sebagai *British Protectorate*, istilah lain dari tanah jajahan.

Pembagian itu memang tidak dilakukan dengan cara membuang undi. Tetapi dengan kekuasaan Hindia Belanda di kawasan Selatan-Timur yang lebih Besar, James Brooke di kawasan Sarawak, dan *British Nort Borneo* di bagian Utara, serta Kesultanan Brunei terjepit di tengah, maka terbagilah tanah Borneo ke tangan empat penguasa. Pembagian ini, tentu tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dari penduduk asli di pulau itu. Tragis memang, tetapi itulah rekaman sejarah.

Lewat sebuah perjuangan panjang, kelompok anti penjajahan di kawasan Hindia Belanda memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, *Dutch Borneo* juga otomatis menjadi wilayah negara merdeka Indonesia. Sementara itu, kawasan Sabah, Sarawak dan Brunei yang secara resmi dikuasai Mahkota Kerajaan Inggris setelah PD II masih tetap merupakan daerah koloni Inggris. Ketika Inggris didesak PBB untuk memerdekakan wilayah itu, proposal Malaysia dicanangkan oleh Inggris dan Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Federasi Malaya. Kontan saja Soekarno menolak gagasan itu. Sikap serupa ditunjukkan oleh Presiden Pilipina D. Macapagal. "Pembentukan Malaysia tidak akan mengubah status Sa-

bah dan Sarawak. Yang akan berubah adalah pemindahan pusat penjajahan dari London ke Kuala Lumpur," kata Soekarno. E-kornya, konflik bersenjata tak terhindari. Peristiwa itu dikenal sebagai Konfrontasi Malaysia.

Akhirnya Sabah, Sarawak, Singapura dan Federasi Malaya membentuk Negara Federasi Malaysia, sedangkan Brunei yang kaya minyak tetap di bawah Inggris. Negara kecil itu baru merdeka pada 1984. Maka, setelah penjajah Inggris hengkang dari sana, Borneo terbagi kepada kekuasaan tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Konflik kepentingan

Meskipun era penjajahan telah berlalu, namun tidak berarti konflik juga berakhir. Bila pada era penjajahan konflik-konflik bersumber masalah politik-ideologi, maka dewasa ini konflik-konflik disebabkan oleh kepentingan ekonomi, pendekatan pembangunan dari atas yang kurang serasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta masalah keadilan sosial yaang belum merata.

Mering Ngo (1991), mengemukakan, pejabat pemerintah yang berasal dari luar Kalimantan pada umumnya tidak gampang untuk memahami karakteristik sosial budaya masyarakat Dayak. Implikasinya, tentu saja, sejumlah pendekatan pembangunan kurang mengena.

Begitu pula Undang-Undang yang dirumuskan di Jakarta, terkadang hanya berdasarkan pengalamam masyarakat di Pulau Jawa. Suatu penilaian terhadap UUPA No 5/1960, menyimpulkan bahwa UUPA ternyata diskriminatif terhadap masyarakat peladang di Kalimantan. Sistem pertanian di Kalimantan didasarkan pada siklus 10-15 tahun. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada tanah agar memiliki cukup humus untuk diladangi kembali. Menurut UUPA, penggarap yang demikian itu dikatagorikan sebagai penggarap pasif, dan tanah

garapan itu dianggap terlantar.

Masih tentang UUPA, di satu pihak mengakui keberadaan tanah-tanah adat (pasal 3 dan 5), sebaliknya pasal (19) junto PP No 10/1960, Junto Permen Pertanian dan Agraria No 62/-1982 mewajibkan para penguasa untuk mendaftarkan tanah-tanah kepada pemerintah untuk memperoleh sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tanah-tanah yang tidak ber-sertifikat dinyatakan sebagai tanah negara. Dalam pada itu, tanah-tanah adat tidak memiliki sertifikat. Jika demikian ia adalah tanah negara. Padahal, sebagian besar tanah-tanah adat suku-suku Dayak di Kalimantan sudah dikuasai secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan.

Kondisi ini biasanya lebih diperburuk lagi oleh ucapan oknum pejabat yang mengatakan bahwa di Kalimantan tidak ada tanah-tanah adat. Untunglah Seminar "Peranan Adat dalam Pembangunan" yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Untan 1988 berhasil mengoreksi kesalahan persepsi itu. Kendati demikian, pengakuan baru bersifat konsepsional semata. Yang lebih penting, bagaimana pengakuan seperti itu diterjemahkan secara langsung di lapangan.

Persoalan tanah ini semakin mencuat ke permukaan dengan masuknya sejumlah proyek-proyek yang memerlukan lahan luas ke Kalimantan Barat. Dalam pengambilalihan tanah-tanah itu, para investor menyalahgunakan fungsi dan peranan para Ketua Adat Suku Dayak. Mereka dianggap memiliki kekuasaan untuk menyerahkan tanah-tanah adat. Padahal, tanah-tanah adat adalah milik individu-individu anggota masyarakat Adat. Dengan demikian, para Ketua Adat tidak berhak menyerahkannya kepada pihak lain. Setidaknya hal itu dikemukakan oleh 30 orang kepala adat dari Kecamatan Simpang Hulu, Sungai Laur, dan Sandai-Kabupaten Ketapang (Kalbar).

Di sisi lain, kalau ada dana kompensasi pembebasan tanah-tanah itu, biasanya tidak sampai ke tangan masyarakat. Sebuah laporan resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Negara Perkebunan VII tahun 1984 dalam rangka peresmian pabrik

kelapa sawit di Meliau Kalbar, menyebutkan, tanah yang dipakai untuk lahan kelapa sawit itu dikompensasi Rp 49.000/ha atau Rp 4,9 setiap meter. Pada saat pembersihan lahan, sebagian masyarakat enggan menyerahkan tanah-tanah mereka, karena belum menerima kompensasi. Padahal, menurut laporan tersebut, uang kompensasi sebesar Rp 714 juta telah diserahkan kepada Pemda Kalbar.

HPH vs Peladang

Adalah para peladang yang senantiasa dikambinghitamkan sebagai perusak hutan di Kalimantan. Menurut data yang dikeluarkan Pemda Kalbar, luas hutan di Kalbar adalah 9.204. 425 ha atau sekitar 67 % dari luas wilayah propinsi itu. Sebaliknya, laporan dari *Regional Physical Planning Programme for Transmigation* (RePPProT) tahun 1986-1987 menyebutkan, luas hutan di Kalbar tidak lebih dari 8.701.000 ha.

Dari 9.204.425 ha versi Pemda tadi, 4.387.005 ha adalah hutan lindung dan cagar alam. Sedangkan hutan produksi tetap dan hutan produksi sementara serta hutan produksi yang dapat dikonversikan untuk perkebunan seluas 5.807.420 ha. Sementara itu, menurut data dari Kanwil Dephut terdapat 70 buah HPH yang pernah beroperasi di Kalbar dengan luas 6.201.500 ha. Ini bearti 394.080 ha lebih luas dari data hutan produksi menurut Pemda. Apakah ini berarti areal HPH telah merambah hutan yang dicadangkan sebagai hutan lindung? Atau ada hutan yang tidak terdata?

Menurut Edy Taryono, manajer lapangan PT Inyutas yang beroperasi di Kecamatan Simpang Hulu, setiap tahun mereka menebang dalam Rencana Kerja Tahunan seluas 2000 ha, dari 110.000 ha konsesi yang dimiliki PT Inyutas. Setiap hektare, ditebang antara 40-60 batang. Maka sisa penebangan oleh HPH akan mengering, dan diperlukan waktu bertahun-tahun untuk lapuk menjadi humus tanah. Keadaan ini menempati areal jutaan

hektar. Maka, bila kemarau tiba berarti sebagian besar hutan itu berpotensi untuk terbakar. Kondisi ini belum lagi ditambah dengan dibukanya sejumlah perusahaan perkebunan. PT SLA yang beroperasi di daerah kabupaten Ketapang, kini sedang melakukan pembersihan lahan sampai 10.000 ha. Tahun lalu, daerah itu mulai terbakar sejak bulan Juni, sementara para peladang membakar lahan mereka sekitar Juli-Agustus. Di daerah Tayan dan Sungai Ambawang, sebuah perusahaan lain juga sedang melakukan *land-claering* untuk HTI dan Perkebunan Kelapa, dengan areal puluhan ribu hektar. Pembakaran kawasan seluas itu, tentu berbeda dengan pembakaran ladang yang luasnya tidak lebih dari setengah sampai satu hektar. Hal lain yang tidak diketahui oleh publik, adalah manajemen pembakaran ladang yang dilakukan oleh para peladang suku Dayak. Atas dasar pegalaman secara turun-temurun, mereka memiliki pengetahuan sali (*indigenous knowledge*) yang tidak dipahami masyarakat luar. Pembakaran ladang mempertimbangkan sejumlah faktor seperti arah dan kekencangan angin, yang masing-masing berbeda pada saat pagi, siang dan petang hari. Selain itu, sebelum ladang dibakar, biasanya telah dibuat jalur pengamanan api *(piadang)* agar tidak merambah ke hutan sekitarnya. Sebab jika api merambah, mungkin ia akan menghabiskan kebun karet dan kebun buah-buahan. Selain itu, api juga dapat melahap tanah keramat atau tanah perkuburan, yang jika terbakar, selain dihukum secara adat, pemilik api juga mesti siap menanggung resiko yang tidak terlihat dari perbuatannya itu, yakni pembalasan yang mungkin berupa penyakit tertentu. Situasi ini sulit dipahami secara ilmiah. Tetapi inilah kebijakan traditional masyarakat Dayak dalam mempertahankan keharmonisan mereka dengan alam. Dan itu telah berlangsung berabad-abad.

Manakala HPH dan perkebunan bercokol di Kalimantan, asap kebakaran hutan sampai ke Malaysia dan Singapura. Sejumlah penerbangan sempat tertunda, dan bahkan sebuah pesawat mengalami musibah di Kalteng tahun lalu. Yang disalahkan adalah masyarakat peladang. Anehnya, peristiwa demikian

itu baru terjadi tahun lalu, sedangkan masyarakat Dayak telah berladang berabad-abad.

Ternyata, pada saat itu sedang terjadi pembukaan areal perkebunan secara besar-besaran di Kalbar. Bayangkan, jika areal seluas 5000 ha dibakar sekaligus. Yang mengherankan, semestinya para pejabat di daerah mengetahui hal itu. Tetapi tidak satupun tuduhan yang ditujukan kepada para investor. Para peladang tetaplah dijadikan kambing hitam, yang hampir tak mampu lagi bernapas.

Pencemaran dan "Kawin Kontrak"

Implikasi lain yang ditimbulkan HPH adalah tersumbatnya anak-anak sungai baik oleh jalan utama, maupun oleh jalan-jalan cabang. Di Daerah kecamatan Simpang Hulu dan Sei Laur, Kabupaten Ketapang misalnya, ratusan anak sungai tersumbat oleh jalan HPH. Kondisi air yang menggenang demikian, menyebabkan pohon-pohon di bagian hulunya mati, karena tergenang terus-menerus. Bulan Pebruari 1991 Ketua Adat Dayak dari Desa Kualan Hulu dan Semandang Hulu meleporkan sejumlah HPH yang beroperasi di daerah itu telah mengakibatkan endapan lumpur setebal 20-30 cm pada sejumlah sungai setempat. Air yang dulu jernih, kini keruh dan berlumpur.

Akhir September 1993, keadaan itu semakin parah. Telah terjadi longsor berat pada jalan HPH PT Erna Djuliawati yang melewati bukit Lubang Kijang (1000 kaki). Jalan itu melewati sebuah kolam di puncak Lubang Kijang. Menurut penduduk Semandang Hulu dan Kualan Hulu, kolam itu mengering. Padahal, dari situlah mengalir sumber air yang mengalir ke Sungai Kualan, Sungai Semandang dan Sungai Laur.

Sungai Semandang dan Kualan mengalami pengendapan lumpur yang luar biasa. Di dusun Legong endapan lumpur mencapai 1,5 m. Sungai yang semula dalam, kini tinggal 3-10 cm. Batu-batu besar yang dulu timbul kini tinggal tenggelam dalam

endapan lumpur. Dengan kondisi demikian, jika musim kemarau masyarakat mengambil air dengan menimbanya dengan menggunakan cawan bekas kemasan sabun B29. Sedangkan pada musim hujan, air menjadi tidak laik dikonsumsi, sementara timbunan lumpur semakin bertambah karena longsoran dari Bukit Lubang Kijang di atas dusun itu.

Pengaruh buruk HPH juga terasa terlihat dalam konteks kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Perusahaan mempekerjakan buruh dari luar. Maka kawin kontrak sudah menjadi hal yang lazim. Gadis-gadis Dayak dikawini, setelah beranak satu atau dua, ditinggalkan pergi, pada saat kontrak buruh yang bersangkutan dengan perusahaan telah habis. Di daerah Simpang Dua, sekurangnya terdapat sepuluh janda korban kawin kontrak. Satu dua di antaranya adalah mantan isteri kontrak warga negara asing. Adilkah jika kondisi seperti ditimpakan kepada masyarakat setempat yang jujur, terbuka dan percaya pada janji-janji lisan?

Contoh lain dari pembangunan dari atas yang tidak sesuai dengan kondisi lokal Kalimantan, adalah pencadangan hutan lindung yang merupakan pelebaran dari areal cagar alam gunung Palung, Kabupaten Ketapang. Ketika perintisan dilakukan, garis batas hutan lindung membagi dua dusun: Kembera, desa Mekaraya, Kecamatan Simpang Hulu. Untunglah, Camat Simpang Hulu, Drs. Silvanus Sungkalang menggeser batas itu hingga dua kilometer dari tengah dusun. "Ini pun tidak mencukupi," kata Gumpol, Ketua Adat dusun itu. Menurut dia, jika pemerintah menginginkan agar masyarakat tidak merambah hutan lindung, batas yang wajar adalah 6 sampai 8 km dari dusun. "Bagaimana mungkin, kebun-kebun karet dan pohon buah-buahan kami terkena hutan lindung," keluh Gumpol.

Ketika peristiwa itu ditanyakan kepada seorang petugas kehutanan yang sedang bertugas di basecamp PT Kayu Mukti di Lembawang bulan Mei 1992, diperoleh konfirmasi bahwa hutan lindung terpaksa menempati lahan-lahan pertanian Persekutuan Masyarakat Adat Suku Dayak. Jika tidak, tidak ada areal hutan

lindung Hutan primer (rimba) ternyata sudah tidak mencukupi karena sebagian besar sudah dijadikan hutan produksi, dikavling-kavling untuk HPH.

Tergusur

Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Rakyat Kalimantan di Pontianak tahun lalu menyimpulkan bahwa kehadiran unit-unit perekonomian modern yang kapitalistik telah menggusur sumber-sumber perekonomian rakyat Kalimantan. Sebaliknya, hanya sekitar 30 % dari hasil kegiatan semacam itu yang dihabiskan di Kalimantan. Sisanya mengalir ke luar pulau.

Sementara studi sosial ekonomi HPH yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) antara lain menyebutkan, HPH ternyata hanya menyerap 1,7 % tenaga kerja lokal. Yang lainnya didatangkan oleh perusahaan dari daerah lain.

Adalah Dr Masri Singarimbun, yang secara vokal mendesak pemerintah daerah Kaltim untuk mengembalikan hak ulayat masyarakat Suku Dayak setempat (Pembaruan, 11/2; Kompas 7/2; Manuntung, 5/2). Pengembalian dan pengakuan atas hak adat masyarakat Dayak agaknya perlu juga dilakukan oleh Pemda-Pemda Kalimantan yang lainnya. Jika tidak, bukan tidak, hal ini merupakan konflik potensial yang semakin hari semakin matang, dan pada gilirannya dapat meledak menjadi pertentangan terbuka.

Pada tahun 1987, masyarakat Dayak di Sarawak secara serentak melakukan blokade terhadap kegiatan HPH di seluruh kawasan Negara Bagian. Gerakan ini kemudian mengundang kecaman dari masyarakat internasional terhadap pemerintah Malaysia. Pengalaman Sarawak sungguh dapat dijadikan acuan bagi para pengambil keputusan pembangunan di Kalimantan.

"Kalimantan," tulis Ben Abel dari Itaca, New York, dalam *Borneo Research Bulletin* edisi September 1989, "merupakan ajang pertarungan kepentingan antara suku Dayak yang

lahir dan hidup di sana dan oleh karenanya beralasan untuk mengatakan bahwa tanah dan hutan adalah milik mereka, dengan para investor yang datang bermodalkan secarik lisensi dari negara untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pertarungan itu, masyarakat Dayak agaknya akan kalah, tergusur dari tanah kelahiran mereka."

Abel lantas menulis, "inikah yang dimaksudkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, *"Ask not what your country can do for you, but what can you do for your country?"* Ataukah karena masyarakat Dayak sudah mengamalkan senyatanya semboyan pembangunan kita, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dengan mengorbankan diri mereka?"

Buku ini memuat sejumlah rekaman peristiwa masa lalu dan kondisi kekinian Borneo/Kalimantan di penghujung abad ini. Versi awal dari hampir semua tulisan pernah dimuat di berbagai media massa seperti Harian *Suara Pembaruan*, *KOMPAS*, *The Jakarta Post*, dan *Kalimantan Review*. Dari apa yang direkam buku ini, kita diajak untuk berangan-angan mengenai wajah Kalimantan dalam abad mendatang.

Pontianak, Oktober 1996

Stepanus Djuweng

Bagian Pertama

LINTASAN SEJARAH: SUATU SUKU PADA SEBUAH PULAU

01

MANUSIA DAYAK, ORANG KECIL YANG TERPERANGKAP MODERENSISASI

Stepanus Djuweng dan Wolas Krenak

"Dayak," tulis *V.J. Vert*, seorang antropolog Belanda dalam bukunya tentang Kalimantan Barat yang terbit tahun 1854, "adalah suku-suku yang pada hakekatnya lahir untuk didominasi, ketimbang untuk menjadi penguasa."

Deskripsi ini, telah menjadi semacam legitimasi dan membentuk kristal-kristal keyakinan bagi para penguasa--layaknya seorang bocah kecil mempercayai dongeng-dongeng Hans Anderson--dalam menjalankan kekuasaan mereka terhadap suku Dayak. Implikasinya, orang Dayak, dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan penguasa, sebab Vert telah bersabda, bahwa nasib mereka memang untuk dikuasai. Setelah puluhan tahun hidup di alam kemerdekaan, bias dari Sabda Vert masih saja terasa. Pendapat Vert itu memang baru dibantah beberapa tahun lalu.

Adalah *Mill Rokaerts*, peneliti Belgia yang melakukan studi terhadap suku Dayak Linoh di Nobal, Sintang tahun 1985. "Orang Dayak yang saya jumpai di Pontianak dan Sintang," tulisnya, "Sama sekali bukan manusia primitif yang

legendaris atau budak belian yang enggan berbicara. Seperti suku-suku di Asia lainnya, mereka adalah rakyat kecil yang terperangkap dalam arus modernisasi ala Barat yang berimplikasi secara luas terhadap tatanan sosial, budaya dan kehidupan mereka." Ia lantas menggoreskan sebuah peringatan, "Pembangunan yang demikian itu, mengcancam keberlansungan manusia Dayak."

Asal-usul

Dayak, adalah nama kolektif yang kemudian membentuk sebuah label etnik untuk menyebut kira-kira 450 suku asli non-muslim yang mendiami pulau Kalimantan (Borneo). Pembagian dilakukan oleh beberapa antropolog Barat atas dasar atas kesamaan bahasa, hukum adat, dan ritus kematian. Menurut Drs. Bahari Sinju, peneliti pada *Institute of Dayakology Research and Development* (IDRD) Pontianak, pembagian ini mungkin tidak cukup akurat, baik dari segi jumlah subsuku, pemberian nama pada subsuku serta kriteria dasar pengklasifikasiannya. Sebagai contoh disebutkan, subsuku Kanayatn (penutur bahasa Kanayatn) adalah kelompok terbesar di Kalbar (sekitar 500.000-600.000 jiwa) yang mendiami daerah Kabupaten Pontianak dan Sambas. Dalam buku *Tjilik Riwut*, Kalimantan Membangun, tidak terdapat nama sub-suku Kanayatn. Begitu pula dalam buku *Bernad Sellato* Dra-gon and Hornbill.

Dari segi kriteria, tidak cukup dengan hanya menggunakan hukum adat, bahasa dan ritus kematian. Dapat ditambahkan faktor tempat tinggal, nama sungai, dan kesamaan musik, antara kelompok kecil yang disebut subsuku-subsuku itu.

Di balik sejumlah perbedaan bahasa, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, memang terdapat sejumlah persamaan-persamaan dari subsuku yang satu dengan yang lainnya. *Dr Fridolin Ukur* misalnya melihat bahwa persamaan fisik yang sangat mendasar dari setiap subsuku adalah tempat tinggal

berupa rumah panjang, senjata seperti sumpit dan mandau, pola dan motif anyaman dan tenunan. Hal lain yang agaknya perlu ditambahkan dari inventarisir ciri persamaan yang dikemukan oleh Dr Fridolin Ukur, adalah persamaan kebudayaan nonfisik seperti sikap egalitarian, demokratis, persamaan derajat antara pria dan wanita yang merupakan karakteristik sosial masyarakat Dayak, kecuali beberapa subsuku yang mengenai kelompok bangsawan dan kelompok proletar.

Dengan bukti-bukti itu, Fridolin lantas membantah pendapat para Antropolog Barat yang mengatakan bahwa tidak terdapat persamaan-persamaan antropologis di antara subsuku-subsuku yang tergabung dalam nama kolektif Dayak itu. Dengan demikian, kata Ukur, Dayak bukan hanya merujuk pada kesatuan magis relegius seperti yang dikatakan oleh para antropolog Barat, tetapi juga merujuk kepada label etnis dan antropologis. Pendapat serupa juga dikemukan oleh Dr Peter Kedit dalam tulisannya *Ethnicity in Multiethnic Society in Sarawak* (1988).

Bagaimanapun juga, di atas semua argumen tadi, tak seorang pun mengetahui secara persis asal-usul suku Dayak. Sejumlah sumber tertulis menyebutkan, mereka adalah keturunan kelompok Proto-Melayu yang berasal dari India Belakang, masuk ke Borneo melalui Semenanjung Malaya sekitar 4.000 tahun silam. Tetapi penemuan fosil manusia purba di Gua Batu Niah dekat Bintulu (Sarawak) membuktikan di Borneo sudah terdapat manusia sejak 50.000 tahun yang silam (Colchester, 1988).

Orang Dayak sendiri, berdasarkan tradisi lisan yang dituturkan secara turun-temurun oleh mereka memiliki teori sendiri tentang asal-usul mereka, yang bervariasi dari subsuku satu dengan subsuku lainnya. Menurut subsuku Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang, manusia pertama diciptakan oleh *Nek Duwata* (Jubata dalam bahasa Kanayatn, Alla Tuala dalam bahasa Iban), bersamaan dengan

terciptanya dunia. Dus, mereka memang sudah mendiami pulau Borneo sejak dunia diciptakan.

Mengenai asal-usul kata Dayak, juga sama kaburnya. Orang Dayak sendiri pada mulanya tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai **Dayak,** seperti halnya orang Indian di Amerika yang memiliki nama masing-masing. Dengan demikian, **Dayak** adalah label yang diberikan oleh kelompok lain.

Meskipun Dayak di Kalimantan Barat, pada tahun 1985 diperkirakan sebesar 41 % dari sekitar 2,8 juta penduduk (Pemda Kalbar, 1990), namun peranan mereka dalam bidang sosial ekonomi, budaya dan politik saat ini dapat dikatakan masih sangat rendah. Dalam bidang eksekutif misalnya, ranking tertinggi adalah kepala Biro di Kantor Gubernur. Sementara di tingkat Kabupaten dari tujuh Dati II, hanya seorang yang Kepala Daerah-nya orang Dayak. Sebaliknya, pada masa-masa setelah kemerdekaan, peranan mereka di bidang politik cukup dominan. Gubernur Kalbar pernah dijabat oleh putra Dayak, Oevang Oeray.

Tanah dan hutan: Sumber kehidupan

Tanah dan kekayaan alam lainnya, adalah pilar kehidupan masyarakat Dayak. Nilai ekonomis dari tanah dan hutan adalah satu kesatuan yang integral dengan aspek sosial budaya dan politik dan keagamaan. Dengan demikian, kehilangan hak atas tanah berarti lenyapnya sebuah tatanan kehidupan.

Secara sosio kultural, tanah menghubungkan generasi lalu, sekarang dan masa datang. Tanah bagi suku Dayak menyimpan sejarah yang tak tertulis. Ia menyimpan tulang belulang para para leluhur, dan tempat keramat, mesbah-mesbah pemujaan yang keberadaan masih tetap dipelihara. Di atas tanah pohon karet, durian, tengkawang, rotan, *sampuan* (tempat lebah bersarang) tumbuh dan terpelihara.

Pola penguasaan masyarakat Dayak terhadap tanah, berhubungan erat dengan cerita mengenai asal-usul dunia dija-

dikan. Masing-masing subsuku Dayak, memiliki cerita semacam itu. Menurut subsuku Simpang yang bermukim di perbatasan Kabupaten Ketapang, misalnya, *kampung loboh laman banua* (tanah air) dibuat oleh *Pareman Tuan* dari *risak sekayo tonah sakopal* (sebatang cengkodok dan segenggam tanah) untuk setiap orang, sehingga setiap manusia yang pernah lahir, berhak untuk menggunakan tanah itu untuk hidup, ataupun untuk mati. Kendati demikian, tak seorangpun dapat memperlakukan *banua* dengan segala isinya sekehendak hatinya. Jika terjadi hal demikian, maka ia akan dikenakan sanksi-sanksi, baik oleh masyarakat, maupun oleh yang di atas (pencipta). Oleh karena itu, manusia harus menjaga keserasian dan keharmonisan dengan alam. Sebab, perbuatan manusia terhadap alam, mencerminkan hubungannya dengan penciptanya.

Mengikuti falsafah dasar seperti ini, penguasaan atas tanah ditandai dengan pembukaan hutan primer untuk dijadikan muh (ladang). Sebelum hutan primer dibuka, biasanya diadakan upacara pembukaan lahan. Upacara itu bermakna sebagai meminta restu dan ucapan terima kasih kepada penciptanya. Belakangan ini, upacara itu sering disalahgunakan sebagai upacara penyerahan tanah.

Hutan primer yang sudah dibuka, secara otomatis dikuasai oleh pembukanya. Hal ini diakui oleh setiap anggota masyarakat. Penguasaan seperti ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Upacara penyerahan waris, biasanya disaksikan oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat luas. Untuk memperkuat pola penguasaan ini, biasanya di sekitar tanah itu ditanami dengan berbagai jenis pohon buah-buahan, seperti durian, tengkawang dan sejenisnya. Meskipun tanah dan tanam tumbuh di atasnya dikuasai secara pribadi, tetapi buahnya adalah milik bersama seluruh masyarakat. Artinya, setiap orang dapat memungut buah durian atau tengkawang, asal ia sudah matang dan jatuh karena kematangannya.

Dengan adanya kebutuhan untuk memenuhi keperluan

akan uang tunai, tanah-tanah bekas ladang ini pada umumnya dipergunakan untuk lahan kebun karet, lada atau rotan. Pola penguasaan semacam ini disebut sebagai hak milik adat (adat property rights) dalam istilah moderen.

Berhadapan dengan kedatangan para investor--sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan--ke Kalimantan Barat, penguasaan tanah secara adat ini menjadi perdebatan yang tiada akhir (Lihat Pengantar: Kalimantan Dulu Sekarang dan Masa Depan). Jika benar pembangunan didasarkan pada kebudayaan sendiri, secara nyata berarti pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam konteks Kalimantan, pengakuan akan keberadaan tanah-tanah hak adat adalah salah satunya.

Yang berlaku sekarang, masyarakat menyerahkan tanah-tanah mereka, biasanya dilakukan oleh para ketua adat. Mereka kemudian akan mendapatkan kembali seluas 2,5 ha, dengan mencicil secara kredit. Menurut buku Petunjuk tentang PIR Ngabang, kewajiban petani untuk membayar kembali adalah sebesar U$ 4.900 (1982). Ini artinya, setelah kehilangan tanah, masyarakat harus kehilangan pula sebesar U$ 4.900. Alasan pihak investor adalah, tanah-tanah itu tidak diganti rugi karena mereka akan mendapatkan kembali 2.5 hektar. Betapa kurang adilnya perlakuan yang demikian.

Pada saat tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah seperti pada saat ini, memang tidak ada reaksi yang berarti dari masyarakat. Tetapi manakala kesadaran mereka telah bangkit, dan melihat formula demikian sebagai sesuatu yang kurang, adil, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan protes secara terbuka.

Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib masyarakat Dayak di Kalimantan, rakyat kecil yang terperangkap dalam arus modernisasi.

***

02

RAJA DAYAK
DIANTARA PARA SULTAN MELAYU

Stepanus Djuweng dan Vincensius Julipin

Di antara sejumlah Kesultanan Melayu yang tersebar di Kalimantan Barat, ternyata terdapat sebuah Kerjaan Dayak yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Ulu Are atau Ulu Aik (Raja Hulu Sungai) tetapi luput dari rekaman sejarah. Sebutan ini, agaknya erat kaitannya dengan pusat kerjaan itu yang terletak di dusun Sengkuang, Kecamatan Sandai, pedalaman Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Meski pun Raja Ulu Are tidak memiliki kekuasaan eksekutif seperti lazimnya para Sultan Melayu--yang tercermin dalam pemungutan pajak hasil bumi--namun eksistensinya sebagai raja diakui oleh sejumlah kelompok subsuku Dayak yang bermukim di Kecamatan Sandai, Sungai Laur dan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan sejumlah subsuku Dayak yang bermukim di daerah Kabupaten Sanggau. Tidak hanya itu. Kerajaan Tanjungpura yang berpusat di desa Tanjungpura dekat Ketapang, Kerjaan Matan yang berpusat dideket Teluk Melanau, Kabupaten Ketapang, secara tegas mengakui keberadaan Raja Ulu Are.

Lambang Supremasi Persekutuan

Menurut sejumlah para Ketua Adat dari Kecamatan Simpang Hulu, Raja Ulu Are adalah lambang Supremasi Persekutuan Adat Masyarakat Dayak di daerah itu. Lebih dari itu, Raja Ulu Are dititipi kuasa untuk menjaga ketentraman suku bangsa Dayak oleh *Pareman Tuan Datuk Patara Guru* (Sang pencipta). Kuasa itu dilambangkan oleh sepotong logam yang dikenal sebagai *Bosi Koling Tungkat Rakyat* (Baja Koling Penyangga Rakyat).

Menurut kepercayaan, apabila *Bosi Koling Tungkat Rakyat* itu genting (mengecil bagian tengahnya), maka masyarakat suku Dayak menghadapi situasi sulit. Mungkin perperangan, wabah penyakit, musim kemarau yang berkepanjangan, bencana alam, atau kekurangan bahan pangan (paceklik). Keadaan yang demikian itu dipercayai disebabkan ulah manusia yang tidak taat dengan adat istiadat atau melanggar pantangan-pantangan tertentu. Sebut saja misalnya, hamil di luar nikah,penyelewengan-penyelewengan seksual, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemimpin, pembakaran hutan dan tempat-tempat keramat, atau sejenisnya. Akibat semuanya itu, kehormonisan hubungan anatara alam dan manusia dan antara alam-manusia dan Sang Pencipta terkendala. Dalam bahasa adat kondisi ini dilukiskan sebagai *dorik dah mee bamacan, tolok dah mee banabo* (macan di gunung sudah lari dan naga diteluk sudah pindah). Oleh karena itu, *Pareman Tuan Datuk Patara Guru* memberikan hukuman kepada manusia. Untuk memperbaiki semua itu, kampung halaman perlu dibersihkan dengan sebuah upacara adat yang dinamakan *Babantan*. Upacara ini bermakna sebagai penebusan dosa-dosa individu dan sosial manusia, dan sekaligus merestorasi keharmonisan antara manusia dengan alam, serta memperbaiki kembali hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu, setiap orang berpartisipasi dalam upacara, yang diwujudkan dengan menyumbangkan

sejumlah beras, ayam, telur, babi, kambing, atau barang lainnya secara sukarela. Tradisi menyumbang untuk upacara Babantan ini, disebut sebagai Pupu-caup.

Itu semua, berasal dari legenda Karanamuna Karanamuning, yang dalam versi Melayu Ketapang dikenal sebagai Putri Junjung Buih atau Betung Tujuh Ruas.

Pada saat manusia masih langka, tersebutlah seseorang bernama Aji Mantelok. Dinamakan denmikian, karena memperoleh keturunannya dengan cara bertelur. Sebuah di kiri jalan, dan yang lainnya di kanan jalan. Alasannya, jika nantinya kedua anak itu pria dan wanita, maka mereka boleh dikawinkan, karena sudah dibatasi oleh sebuah jalan. Dari kedua telur itu, lahirlah seorang pria dan seorang wanita, masing-masing dinamainya Karanamuna dan Karanamuing. Maka, Aji Mantelok kemudian menikahkan kedua anaknya itu.

Meskipun Karamuning telah hamil selama tujuh tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari, namun tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan melahirkan.Yang ia rasakan, adalah keingin untuk memakam hati kera (monyet) putih. Maka berangkatlah sang sumi Karanamuna, dengan membawa sebatang sumpit untuk mencari seekor kera putih. Sampai di hutan belantara, Karanamuna melihat seekor kera putih. Ketika ia mengarah-kan sumpitnya, tiba-tiba kera itu berkata, "Dengan ini saya umumkan kepada seluruh binatang untuk berkumpul di tempat ini, dua hari setelah hari ini. Pada hari itu ada wejangan penting yang akan saya berikan. Pada hari itu pula, saya akan mati." Seusai berkata demikian, sang kera putih tiba-tiba lenyap.

Pada hari yang telah ditentukan, Karanamuna mengunjungi tempat itu, yang sudah dipenuhi oleh berbagai jenis binatang. Ketika ia sampai, sang kera bertutur, "Binatang dan manusia masing-masing memiliki norma dan nilai hidup yang berbeda. Manusia hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Adat merupakan aturan dasar hidup manusia, yang jika dilanggar, kepada sang pelanggar harus dikenakan sanksi-sanksi." Kera putih lantas menuturkan berbagai aturan dan sanksi

pelanggarannya. Salah satu diantaranya, manusia tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Hukuman bagi pelanggar adalah dimasukkan ke dalam bubu bemban (sejenis tumbuhan) yang diikat dengan kawat, lalu dihanyutkan di sungai. Kepada terhukum diberikan sebilah pisau timah. Apabila mereka dapat memutuskan ikatan bubu dengan pisau timah, berarti pencipta mengizinkan mereka untuk hidup, tetapi apabila tidak, berarti mereka menanggung resiko pelanggaran itu.

Seusai bertutur demikian, kera putih menuruni pohon, lantas disumpit oleh Karenamuna untuk diambil hatinya. Sesampai di rumah, ternyata Karamuning telah melahirkan tujuh orang anak. Maka, Karanamuna menitipklan anak itu kepada *Patara Guru* lewat sebuah upacara. Ia dan Karanamuning, menghanyutkan diri di dalam sebuah bubu bemban seperti yang dituturkan oleh kera putih. Ketika mereka hanyut, bubu itu tersangkut pada duri rotan, dan pada saat yang sama, seekor tengkuyung memutuskan kawat ikatannya.

Sementara itu, *Patara Guru* mengambil ketujuh anak mereka dan ditempatkan di dalam betung tujuh ruas di tengah ladang Raja Siak Bulun. Ketika Raja Siak Bulun membelah betung itu, keluarlah tujuh orang anak. Yang tertua membawa sepotong logam bernama Tamongong (Tumeng-gong) Ria Bansa, dan yang bungsu seorang putri, bernama Dayang Kutung, membawa sebungkah emas sebesar buah mentimum, sedangkan empat orang lainnya tidak membawa apapun. Oleh sang raja, emas itu diiris dan dibagi-bagikan kepada keempat orang yang tidak memiliki apa-apa tadi. Bagian yang terbesar diberikan kembali kepada sang putri. Karena masih kecil, putri Dayang Kutong tidak kuat membawa emasnya. Emas itu jatuh dan digigit anjing. Selanjutnya emas jatuh ke tanah dan digigit babi. Emas lalu tenggelam ke dalam tanah. Maka menangislah sang putri.

Raja Siak Bulun kemudian menghibur sang putri, bahwa emas itu akan menyejukkan alam dan menyuburkan tanah. Oleh karena itu, kelima saudaranya yang lain akan membayar

kepada Sang Putri berupa hasil bumi selama tujuh belas generasi.

Cerita kemudian berlanjut. Ringkasnya, sang Putri kemudian menurunkan raja-raja Melayu, sedangkan Tamongong Ria Bansa bermukim di daerah hulu Sungai Keriau (anak Sungai Pawan). Ia adalah Raja Ulu Are yang pertama. Saudaranya yang lain menyebar di daerah-daerah sekitarnya.

Masih dihormati

Menurut Timotius Ajim, salah seorang keturunan Raja Ulu Are yang kini bekerja di Pontianak, masyarakat desa Sangkuang dan sekitarnya, masih sangat menghormati *Bosi Koling Tungkat Rakyat.* Keturunan langsung Raja Ulu Are yang kini menyimpan pusaka itu adalah pamannya, bernama Poncing, berusia sekitar 60 tahun. Logam itu, menurut Ajim, panjangnya kira-kira sejengkel (20 cm) dengan lebar sama dengan daun lalang (1 cm). Menurut cerita dari mulut ke mulut, pada mulanya *Bosi Koling Tungkat Rakyat* lebih besar dari itu. Semakin tahun, ia semakin kecil. Semakin banyak kesalahan yang dibuat oleh masyarakat, semakin cepat ia mengecil. Apabila *Bosi Tungkat Rakyat* habis, maka dunia pun akan berakhir. Pusaka itu disimpan dalam peti khusus yang dibalut dengan kain berwarna kuning, dalam kamar khusus pula. Tak seorang pun boleh melihat pusaka itu, kecuali Sang Raja, pada saat dia dilantik. Itu pun dengan sebelah mata, sebab setelah ia melihat pusaka tadi, mata itu akan menjadi buta. Maka ahli waris asli Raja Ulu Are biasanya picing (buta mata sebelah).

Agar tidak habis, setiap tahun diadakan upacara *Maruba,* pada saat purnama dalam bulan Juli. Kini, kata Ajim, Poncing lah yang memimpin seluruh upacara penghormatan tadi. Pada hari pertama dari upacara yang berlangsung tiga hari itu, Sang Raja, dengan mata terpejam memeriksa *Bosi Koling*, sambil mengoleskannya dengan minyak yang sudah dicampur dengan

rempah-rempah. Setelah itu, Raja bersemadi sembari berpuasa sehari suntuk.

Cerita lain tentang Raja Ulu Are, dituturkan oleh seorang Ketua Adat suku Dayak Simpang yang bermukim di daerah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Sekitar tahun 1930-an ia menyaksikan perjumpaan seorang Raja Ulu Are yang bernama Patinggi Jambu, dengan Sultan Kerajaan Matan. Keduanya sedang dalam perjalanan. Di Rumah (Kampung) Bukang, Sultan Simpang bertatap muka dengan para pemuka Suku Dayak. Sesaat kemudian Raja Ulu Are sampai juga ke desa itu.

Setelah Patinggi Jambu naik ke Rumah Panjang, ia menyembah untuk menghormati Sultan Matan. Dengan cekatan, Sultan Matan mengelak dari arah sembahan Raja Ulu Are. Pada saat itu, sebuah Tiang Utama Rumah Panjang yang berada di belakang Sultan Simpang terbelah dua. Sultan Matan kemudian menyembah Raja Ulu Are. Menurut para sisa saksi mata, pada saat itu Sultan Simpang berujar, bahwa ia adalah saudara muda dari Raja Ulku Are, karenanya ia tidak layak menerima penghormatan. Jika saja ia tidak mengelak dari sembahan tadi, maka mungkin perutnya sudah terbelah dua.

Kemerdekaan Indonesia berimplikasi pada berakhirnya kekuasaan para Sultan Melayu. Era ini mengakhiri pula pembayaran pajak bumi oleh masyarakat Suku Dayak kepada para Raja Melayu. Oleh para pemuka masyarakat Dayak setempat, hal ini dianggap sebagai penggenapan dari titah Raja Siak Bulun kepada Dayang Kutung, bahwa ia hanya boleh memungut hasil bumi dari pada saudara-saudaranya selama tujuh belas generasi saja. Benar atau tidak, cerita ini telah menandai hubungan suku Dayak setempat dengan para Sultan Melayu dari Kerajaan Simpang dan Kerjaan Matan. Betung tujuh ruas, kini diabadikan dalam bentuk lambang Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ketapang.

Mill Rokaerts, seorang peneliti dari Belgia mencatat, bahwa Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan para Sultan

Melayu sebagai *proxy*-nya untuk menjajah suku bangsa Dayak. Dengan demikian, suku Dayak dijajah berlapis-lapis. Dalam pada itu, terkadang perlakuan oleh pihak penguasa terhadap suku bangsa Dayak memang kurang manusiawi. Suku Dayak Linoh di dekat Sintang, termasuk salah satu kelompok suku bangsa Dayak yang diperhamba oleh para Raja setempat.

Penjajahan yang berlapis-lapis terhadap suku bangsa Dayak, telah menimbulkan trauma bagi putra-putri Dayak. Sebelum tahun 1950-an, orang Dayak merasa hina dan malu ditulis sebagai Dayak. Tidak hanya itu, sejumlah putra Dayak mengubah nama mereka, meniru nama orang Jawa atau Batak. Disayangkan, kata seorang peneliti IDRD, tidak setiap orang Dayak menyadari kondisi ini, temasuk kaum intelektual yang sudah menikmati pendidikan tinggi. Sikap rendah diri--laiknya kelompok yang tertindas--juga tercermin dalam sikap hidup keseharian masyarakat Dayak, sekurangnya di Kalimantan Barat.

Contoh konkrit, katanya, orang Dayak cenderung bertahan pada situasi yang kritis. Apabila seorang anak Dayak dipukul di jalan, temannya yang lain ramai-ramai mengeroyok sang pemukul. Persoalan kami sekarang, katanya, bagaimana menyadarkan orang Dayak untuk berbuat maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Rasa solidaritas mestinya tidak hanya muncul pada saat-saat kritis, tetapi berlangsung setiap hari demi peningkatan kesejahteraan. Tapi ini tugas yang maha besar, katanya, sembari menambahkan, bahwa suku bangsa Dayak telah terperosok dalam kesadaran magis oleh berbagai faktor. Untuk mengangkat mereka ke tingkat kesadaran kritis rasional, perlu upaya konsientisasi yang terus menerus, katanya menutup pembicaraan.

***

03

RUMAH PANJANG
JANTUNG KEBUDAYAAN DAYAK

Stepanus Djuweng

Selama puluhan dekade, suku Dayak membangun tatanan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka di sekitar rumah panjang. Rumah panjang atau rumah batang, adalah rentetan rumah-rumah pribadi (bilek atau lawang) yang bersambung menjadi satu-kesatuan, dibangun dengan konstruksi dari kayu belian yang kokoh.

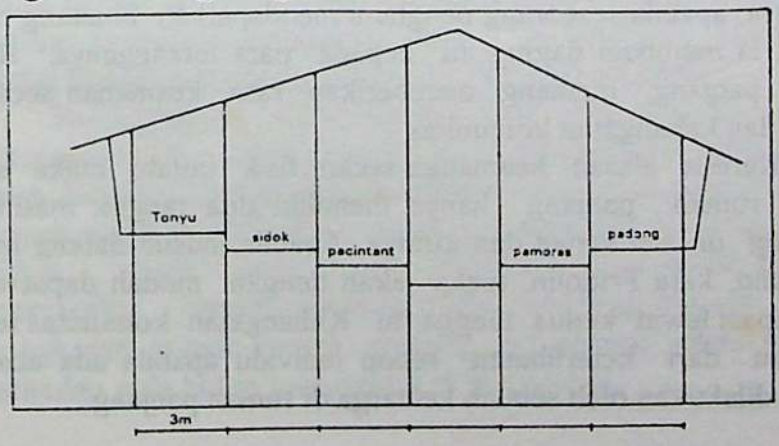
Tulisan ini bercerita tentang secuil kehidupan di rumah panjang yang pernah menjadi pusat kebudayaan suku Dayak Simpang, di kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Penulis artikel, adalah generasi terakhir yang masih sempat menghabiskan masa kanak-kanaknya di rumah panjang itu. Kini, kenangan-kenangan baiklah dituliskan, untuk sekedar merekam kisah kehidupan yang pernah ada dan pernah dialami. Dan barangkali bermanfaat untuk mereka yang tiudak pernah dan tidak akan pernah lagi mengalami kehidupan komunal yang harmonis dan penuh kekeluargaan seperti itu. Sayang, bahwa pusat kebudayaan itu kini telah punah. Tetapi biarlah ia sebagai sebuah tanda bagi sebuah peradaban pada suatu masa, di suatu tempat, di dunia ini.

Bentuk Fisik Rumah Panjang

Rumah panjang yang dimiliki suku Dayak Simpang memiliki dua bagian. Separoh dari rumah panjang adalah bagian terbuka yang disebut soah. Bagian ini dipergunakan untuk berbagai kegiatan keseharian para penghuninya, sedangkan bagian yang tertutup disebut rumah atau bilek atau lawang.

Bagian rumah terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama di dekat pintu masuk, disebut pacintatn. Di situ terletak dapur dan peralatan masak memasak. Tingkatan kedua, disebut sidok. Makanan dihidangkan di situ. Selebihnya ia berfungsi sebagai ruangan duduk keluarga. Bagian akhir, adalah tonyu, tempat tidur. Di sisi bagian atas, terletak paleper, tempat untuk menyimpan harta benda.

Tiang-tiang utama rumah panjang yang asli, berukuran 20 x 40 cm dengan panjang vervariasi antara 9-15 meter. Sebuah lawang atau bilek memerlukan 24 tiang utama seperti itu, yang ditunjang puluhan tiang lainnya. Kesemuanya itu dikerjakan dengan tehnologi parang, beliung dan rimas (alat pelicin kayu). Pada masa itu, belum ada gergaji, apalagi *chainsaw*. Tiang-tiang itu diangkut ke perkampungan dari hutan rimba di sekitarnya. Diperlukan 10-15 orang tenaga manusia untuk mengangkat sebatang tiang rumah panjang.



Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkan bahan-bahan sebuah lawang atau bilek, berhadapan dengan terbatasnya alat bantu (teknologi). Pembangunan rumah panjang tidak bisa dilakukan oleh 3-4 tenaga kerja. Adalah hal yang biasa dalam masyarakat Dayak untuk bergotong-royong dalam melakukan banyak pekerjaan. Memang hanya dengan ketekunan, kebersamaan dan kesetiakawanan kelompoklah sebuah bilek dapat dibangun, dan untaian bilek-bilek itu membentuk sebuah rumah panjang.

Tiap-tiap lawang atau bilek biasanya dihuni satu keluarga, yang adalah basis terkecil dari komunitas sosial masyarakat Dayak Simpang. Meskipun famili-famili itu membentuk satukesatuan sebagai masyarakat rumah panjang, namun mereka tetap memiliki kebebasan secara individu. Tidak ada kelas-kelas atau klan dalam masyarakat suku Dayak Simpang. Namun demikian, bukan berarti tidak ada seorang pemimpin. Kepala sebuah rumah panjang, biasanya adalah *Domong*

Jantung Kehidupan

Di rumah panjang, kata *Dr Fridolin Ukur* dalam tulisannya berjudul Kebudayaan Dayak, tidak ada yang kaya dan yang miskin. Yang berlebihan membagi kepada yang berkekurangan, dan yang kuat mebantu yang lemah. Contoh konkritnya, apabila seseorang penghuni mendapatkan binatang buruan, ia membagi daging itu kepada para tetangganya. Rumah panjang, memang memberikan rasa keamanan secara fisik dan kehangatan komunitas.

Karena alasan keamanan secara fisik itulah, maka sebuah rumah panjang hanya memiliki dua tangga masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Apabila musuh datang menyerang, kata Fridolin, maka akan dengan mudah dapat diantisipasi lewat kedua tangga itu. Kehangatan komunitas tercermin dari keterlibatan setiap individu apabila ada acara yang dilakukan oleh sebuah keluarga di rumah panjang.

Dalam kehidupan sehari-hari, bagian soah yang terbuka adalah tempat para pemuda suku Dayak belajar kepada tetua mereka. Di situlah sejarah lisan, tradisi, dan filsafat hidup dan berbagai kebijaksanaan tradisional (traditional wisdom) dan pengetahuan asli (indigenous knowledge) manusia Dayak yang terkandung sejumlah cerita rakyat (oral traditions), dan kisah-kisah kepiawaian nenek moyang diturunkan kepada generasi berikutnya. Para puteri suku Dayak, belajar menganyam dan menenun secara bersama-sama di rumah panjang. Di disitu pula acara-acara ritual diberlangsungkan, pengadilan adat yang demkratis digelar, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dirundingkan dan keputusan bersama ditaati oleh setiap orang. Singkatnya, rumah panjang adalah pusat segala aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat Dayak. Maka ia adalah jantung kehidupan Suku Dayak.

Individualistis

Gerakan pembongkaran rumah panjang sekitar dua dekade silam, telah menghancur jantung kebudayaan itu. Satu dua dekade setelah kemerdekaan, pendapat umum di negara ini dengan nada negatif mengecam kehidupan di rumah panjang. Pola hidup di rumah panjang dikatakan kolot, tidak higienis dan rawan kebakaran. Setidaknya, begitulah rekaman *Drs. Hieronymus Bumbun, OFM. CAP*, Uskup Agung Pontianak ketika diminta penilaiannya tentang pergeseran kehidupan sosial budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Sesungguhnya, kata Uskup yang adalah putra Dayak Muawalang itu, untuk mencapai modernisasi dan pola hidup yang hiegenis, bukan dengan penyuluhan untuk membongkar rumah panjang, melainkan menciptakan modernisasi dan pola hidup hiegis yang sesuai dengan tatatan sosial budaya masyarakat rumah panjang. Nyata memang, katanya, pembongkaran rumah-rumah panjang berdampak lebih negatif terhadap pola hidup masyarakat di pedalaman.

Perubahan pola tempat tinggal suku Dayak dari rumah panjang ke rumah tunggal, mendorong berkembangnya sikap individualitis, dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Dayak, di samping sejumlah faktor penyebab lainnya.

Sikap individualistis juga didorong oleh persentuhan-persentuhan dengan kebudayaan luar. Di samping itu, pengelolaan bantuan-bantuan pembangunan yang kurang baik yang diberikan pemerintah maupun non-pemerintah adalah faktor lain yang melunturkan sikap gotong royong masyarakat Dayak, secara umum. Pada saat mereka masih relatif terisolasi, rasa persatuan di kampung-kampung masih tampak nyata. Sebagai contoh, misi Katolik dulu membantu penyelenggaraan pendidikan di daerah pedalaman. Masyarakat dengan suka rela membangun gedung sekolah, dan bahkan membantu penggajian tenaga pengajar. Padahal, jika benar bahwa pembangunan berhasil meningkatkan pendapatan rakyat, kemampuan ekonomis masyarakat kala itu tentu lebih rendah daripada saat ini.

Jika saja masyarakat Dayak Kalimantan Barat tetap tinggal dalam persekutuan rumah panjang sambil melakukan modernisasi, mungkin situasinya sedikit berbeda dari yang terlihat saat ini. Di satu pihak, sementara orang berteriak-teriak agar pembangunan dan moderenisasi dilaksanakan berdasarkan kebudayaan sendiri. Di sisi lain, sejumlah unsur positif dari kebudayaan itu telah terkikis oleh pendekatan pembangunan yang terkadang kurang serasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Komoditas Pariwisata

Kini, kehangatan dan keharmonisan masyarakat rumah panjang tinggal merupakan nostalgia masa lalu. Di tempat-tempat tertentu, memang masih terdapat rumah panjang.

Bagi suku Dayak Simpang, kini tertinggal sebuah rumah panjang di Desa Gema, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupa-

ten Ketapang. Rumah yang didirikan sebelum tahun 1900 itu masih berdiri kokoh, tetapi atapnya mengalami kerusakan berat.

Yang tampak sekarang, pada saat pariwisata menjadi salah satu andalan devisa, rumah panjang dianggap salah satu primadona pariwisata di Kalimantan. Mungkin karena kelangkaannya itu. Oleh karena itu, sebuah rumah panjang yang masih tertingga di desa Gema itu, mungkin sepatutunya direnovasi.

Rumah panjang. Ia pernah begitu dominan dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia Dayak, khusnya Dayak Simpang. Tetapi, kemudian dikecam dan diburu untuk dimusnahkan karena dianggap kolot, primitif, dan tidak higienis. Kini ia diburu untuk dirayu sebagai komoditas tontonan para turis. Menyedihkan.

***

04

IMIGRASI CINA DAN EMAS DI KALIMANTAN BARAT

Stepanus Djuweng

Sulit mengetahui secara pasti jumlah penduduk keturunan Cina di Kalimantan Barat. Menurut taksiran beberapa sumber, mereka sekitar 17 % dari 3,8 juta penduduk provinsi ini. Kendatipun secara prosentase kecil dibandingkan penduduk suku Dayak dan Melayu yang ditaksir masing-masing sekitar 41% dan 39%, namun mereka menguasai sektor perekonomian, baik di daerah urban maupun di pelosok-pelosok. Mereka, secara turun temurun membangunan kehidupan dari sektor perdagangan, yang kemudian berkembang ke sektor jasa dan industri. Sebagian kecil lainya membangun kehidupan dengan berbagai profesi: petani, nelayan, buruh, guru, dokter dan bahkan pastor dan pendeta.

Tertarik Emas

Menurut dokumentasi Direktorat Sospol Kalbar berjudul *Sejarah dan Masalah Cina Di Kalimantan Barat* (1981), kehadiran masyarakat keturunan Cina di Kalimantan merupakan bagian dari sejarah perdagangan dan

politik di Asia. Para pedagang Cina datang pertama kali ke Kalimantan sekitar abad ketiga.

Di Sarawak dan Kalbar, para pedagang Cina itu menemukan peluang bisnis baru, yakni mendulang emas. Maka, imigran semakin meningkat dari masa ke masa, dengan tujuan untuk mengadu keberuntungan.

Ketika Khubilai Khan berkuasa di Cina, ia mengirim ekspedisi untuk menundukkan raja Kertanegara. Tentara-tentara Cina dan Mongol itu berhasil dipukul mundur. Sewaktu pulang, sebuah kapal mengalami kerusakan dan kehabisan logistik. Maka merapatlah kapal itu. Rupanya pulau itu adalah Kalimantan bagian Barat.

Sementara sebagian kapal diperbaiki prajurit-prajurit Cina yang sebenarnya membenci atasan mereka--para perwira bangsa Mongol--melakukan desersi. Dari daerah pesisir, mereka pelan-pelan masuk ke kawasan pedalaman. Sebagian bergabung dengan masyarakat Cina yang sudah datang lebih dahulu. Dan sebagian lainnya menikah dengan wanita Dayak.

Pada saat itu, Monterado, Budok Kabupaten Sambas) dan Mandor (Kabupaten Pontianak) merupakan sentra perkampungan Cina. Di kedua daerah itu, banyak terdapat biji emas.

Berita mengenai aktivitas penggalian biji emas itu tersiar secara cepat tersiar di daratan Cina. Implikasinya, terjadilah gelombang imigran secara besar-besaran dari daratan Cina ke Kalimantan. Sebagian menetap di Sarawak, dan sebagian lainnya menetap di Kalimantan Barat.

Pada tahun 1745, Sultan Sambas dan Mempawah secara sengaja mendatangkan orang-orang Cina untuk dipekerjakan secara paksa di pertambangan-pertambangan emas dalam wilayah kekuasaan mereka.

Populasi orang Cina kemudian mencapai ribuan orang. Hal itu memberikan peluang bagi mereka untuk mengorganisir diri. Mereka membentuk persekutuan-per-

sekutuan yang disebut Kongsi. Beberapa tahun kemudian, Kongsi-Kongsi itu menjadi sangat kuat.

Mendirikan Negara

Pada tahun 1770 Kongsi Monterado dan Budok melepaskan diri dari kekuasaan Sultan Sambas. Hal ini diikuti pula oleh Kongsi Mandor yang memisahkan diri dari kekuasaan Sultan Mempawah. Maka Kongsi-Kongsi itu merupakan negara merdeka di tengah-tengah teritorial kekuasaan Sultan.

Orang-orang Dayak, ternyata tidak mau tunduk terhadap Kongsi-Kongsi. Peperangan antara kelompok- kelompok suku Dayak dengan Kongsi tak dapat dihindari. Alhasil, Kongsi-Kongsi yang sudah lebih terorganisir itu memenangkan perperangan.

Kondisi ini membuat raja-raja Melayu mengubah kebijakan mereka terhadap Kongsi-Kongsi dengan mewajibkan Kongsi-Kongsi untuk tunduk kepada para Sultan. Pengakuan kekuasaan Sultan oleh Kongsi-Kongsi itu antara lain dimanifestasikan dalam upeti-upeti yang harus diserahkan penguasa Kongsi setiap bulan, bukan setiap tahun seperti sebelumnya.

Sebaliknya, pihak Kongsi mendapatkan otoritas untuk membentuk kekuasaan otonomi dengan pengadil-an dan perangkat keamanan sendiri.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Profesor Lo Hsiang Lin (1941) dosen Sejarah pada Universitas Beijing yang dimuat di *Sarawak Museum Journal* pada tahun yang sama disebutkan, pada pertengahan pemerintahan Kaisar Chung Lung, dari dinasti Tsing, seorang pahlawan nasional Cina bernama Lo Fang Pah berimigrasi ke Pontianak bersama sekitar 100 orang pengikutnya. Ia lantas mengorganisir masyarakat Cina yang sudah ada di Kalbar untuk membentuk sebuah negara

koloni.

Pada tahun 1777, atau sekitar 6 tahun setelah kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrachman, Lo Fang Pah membentuk negara Republik dengan sistem pemeritahan presidentil. Negara ini dikenal sebagai republik pertama Cina Perantauan.

Dalam berbagai rekaman yang ada di Pontianak, nama Lo Fang Fah tidak pernah disebut-sebut. Yang ada hanyalah Lo Fong Pak. Namun membandingkan kedua catatan itu, Lo Fang Pah yang dimaksud oleh Lo Hsing Lin tidak lain dari Lo Fong Pak yang disebut dalam berbagai rekaman sejarah di Kalbar.

Menurut Lontaan, Lo Fang Fak mendarat di daerah Siantan (Pontianak). Pada waktu itu sudah ada Kongsi Tsu Sjin yasng berpusat di Mandor menganggap Lo Fang Fah sebagai orang penting dari negeri leluhur. Maka ia diangkat untuk mengepalai pemeritahan Kongsi itu. Perangkat kekuasaan di bawah dia adalah *Taiko* (abang yang paling besar), kemudian *NyiKo* (abang kedua), *Kaptai* (Kapten Besar) yang dibantu oleh *Kap Tjong*. Sedangkan peringkat terendah yang setingkat dengan Kepala Desa adalah *Lo Tai*.

Pada tahun 1795 Lo Fang Pak meninggal dunia, dan wilayah kekuasaannya terpecah belah. Namaun sepanjang kekuasaannya ia mengirim upeti tiap tahun kepada Kaisar Cina di Daratan Cina. Melihat kenyataan ini, ia agaknya tidak tunduk kepada para Sultan baik Mempawah mau pun Pontianak.

Setahun kemudian masyarakat Cina memberontak terhadap Belanda. Tetapi perlawanan ini dapat dipatahkan. Namun perang gerilya tetap diteruskan. Para penguasa masyarakata Cina mengumumkan hadiah sebesar setail emas untuk setiap kepala Belanda. Belanda menarik semua personelnya dari pedalaman ke Pontianak. Akhirnya Pemerintah Belanda mengadakan

perundingan dengan pihak Cina dan dicapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Setelah itu terjadi sejumlah pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Cina. Selain itu mereka juga mendirikan sejumlah organisasi baik yang berskop politik atau kebudayaan, secara legal dan ilegal.

Menyusul perang antar Kongsi-Kongsi tahun 1854, Kongsi Monterado dan Kongsi Mandor dibubarkan masing-masing tahun 1856 dan 1884. Pembubaran dua pusat pemukiman Cina ini menyebabkan orang-orang Cina menyebar ke seluruh Kalimantan Barat.

Sebelum itu, daerah Kalbar sudah jatuh ke tangan Pemerintah Belanda secara definitif (1823) ditandai dengan adanya perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Raja-Raja Kerajaan Melayu. Dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Pontianak, Mempawah, Sambas, Matan, Tayan, dan Sanggau, perjanjian itu disebut *Lange Poliitieke Contracten*, yang dikenal dengan *Lange Verk-laring*. Sedangkan dengan kerajaan kecil seperti Simpang, Kubu, Sukadana, Sekadau, dan Sintang diadakan *Korte Politieke Contracten* yang dinamai *Korte Verklaaring*. Inti dari perjanjian itu bahwa kerajaan-kerajaan diberi hak untuk memerintah sendiri. Daerah itu disebut juga *Zelfbestuursgebieden* atau Pemerintah Swapraja. Untuk mengurus dan melindungi kepentingan pemerintah Belanda ditempatkan pegawai Kolonial seperti Contreleur.

Eksklusif

Dalam tahun 1914, Belanda mengatur kelompok-kelompok masyarakat Cina di daerah Kewedanaan Pontianak, Mempawah dan Singkawang. Maka berlakulah struktur seperti berikut: Kepala kampung Cina disebut *Lao-thay*, dibantu seorang *Kaptjong*. Beberapa kampung dijadikan distrik yang diperintah oleh *Kap-tay*. Di atas i-

tu ada dua wilayah besar persekutuan rakyat Cina masing-masing berpusat di Singkawang dan dan Mempawah--yang dikepalai seorang *Mayor* dan dibantu seorang *Kapitan*. Struktur ini di bawah pengawasan ketat pemerintah Belanda. Namun demikian mereka memiliki pegawai sendiri yang bertugas untuk mengamankan politik Belanda; mengawal pergerakan orang Cina; memberikan laporan bidang ekonomi; menetapkan dan memungut pajak di kalangan Cina; memungut sewa tanah di kalangan orang Cina; dan urusan-urusan lainnya. Di antara pajak-pajak itu, hanya pajak tanah yang diberikan kepada para raja Melayu.

Seorang *Mayor* dan *Kapitan* Cina memiliki pengaawal khusus yang disediakan oleh Pemerintah Belanda. Kondisi ini menciptakan eksklusivisme di kalangan orang-orang Cina. Dengan demikian tidak ada lagi asimilasi antara orang Cina dan penduduk pribumi.

PGRS-Paraku

Kekosongan kekuasaan setelah 1945 memunculkan barisan milisi pemuda-pemuda Cina yang bernama Penjaga Keamanan Umum dan kemudian diubah menjadi Pasukan Keamanan Umum. Mereka adalah kelompok yang beraliran nasionalis (pro Kuo Min Tang). Pasukan ini mengalami bentrokan dengan kelompok pribumi.

Catatan sejarah lainnya merekam, kelompok ini sesungguhnya bagian dari organisasi *Sin Min Hui* atau *Chinese Volunteers* (Relawan Cina) yang berpusat di Malaya.

Bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, Kuo Min Tang di bawah Chiang Kai Sek yang nasionalis tergusur oleh PKC di bawah Mao (1949). Di Kalbar, terjadi pula perebutan kekuasaan untuk mengontrol perkumpulan-perkumpulan sosial, sekolah-sekolah Cina, dan

asosiasi-asosiasi perdagangan Cina. Akhirnya golongan yang pro-Mao keluar sebagai pemenang. Pada saat yang sama, pemerintah RI mengakui RRC sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah.

Tahun 1950, pemerintahan khusus dan persekutuan-persekutuan Cina dihapuskan. Pemerintah RI kemudian mengeluarkan PP. No 10/Tahun 1959 yang intinya melarang orang Cina yang berwarganegara asing untuk membuka bisnis eceran kecil di luar ibukota propinsi dan Kabupaten. Pada kenyataannya, ketentuan ini dilanggar dengan memanfaatkan peraturan perburuhan yang membenarkan orang Cina warga negara asing untuk bekerja sebagai buruh. Selain memutus mata rantai pendukung Komunis, gerakan orang Dayak mengusir orang Cina dari pedalaman adalah juga dalam rangka menegakkan aturan itu.

Tahun 1963, Federasi Malaysia yang ditentang oleh Soekarno diproklamasikan. Tanggal 8 Desember 1962, terjadi Revolusi Brunei yang dipimpin Ketua Partai Rakyat Brunei (Brunei People's Party) Azhari yang membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) sebagai organ militer dari Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang menetang proposal Malaysia. Soekarno mengakui keberadaan negara itu, sambil memberikan dukungan diplomasi dan perlindungan kepada pelarian politik dari Sarawak dan Brunei yang anti Malaysia.

Pada tahun 1963 RRC mengirim Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok untuk menemui Yap Chung Ho, Wong Hon, Lim Yen Hwa dan Yacob, para pemimpin Komunis Sarawak yang telah hijrah ke Kalbar. Pertemuan antara utusan Beijing, Yap Cs, dan Azhari berlangsung di Sintang.

Pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan

Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-Paraku) (Kadarusno, 1973). Gerakan ini kemudian bergabung dengan kelompok Cina di Kalbar yang berhaluan Komunis, dan bergerilya di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak, terutama sesudah G-30/PKI.

Tahun 1967, kelompok masyarakat Dayak di Kabupaten Pontianak dan Sambas mengusir masyarakat Cina di daerah pedalaman, karena sebagian dari mereka adalah pendukung PGRS-Paraku. Gerakan ini merupakan bagian dari strategi militer untuk menumpas PGRS-Paraku (Kadarusno, 1973). Dengan demikian dia tidak dapat dilihat sebagai pertentangan internal antar etnis, melainkan harus dinilai dalam konteks politik saat itu.

Dewasa ini, tragedi politik ini bisa jadi masih membekas, utamanya bagi para korban langsung dari kejadian itu. Sesungguhnya, kelompok Dayak-Cina sangat mudah berasimilasi. Dan memang, setelah kejadian itu, bentrokan antar kedua kelompok ini tidak pernah terjadi lagi.

***

05

DILEMA PEMBAURAN DI KALIMANTAN BARAT *

Vincentius Julipin

Peran Pemerintah dalam proses pembauran cukup sebatas menyarankan dan membina, sebab peran utama yang menentukan sukses atau gagalnya pembauran adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembauran yang dibina secara alami dan ditunjang dengan kebijakan-kebijakan sosial-budaya, ekonomi dan politik para aparat, akan lebih menam-pakkan hasil untuk mengurangi kecemburuan yang dapat memperuncing konflik etnik.

Demikian dikemukakan *Drs. Mahyudin Syafei MA* Dosen Sosiologi Politik Universitas Tanjungpura, Pengacara *M. Akil Mochtar SH* dan Rohaniwan Katolik *Drs. Petrus Rostandy OFM Cap* yang ditemui secara terpisah sehubungan dengan evaluasi proses pembauran antara keturunan Cina dengan kaum pribumi Indonesia di Kalimantan Barat.

Pemerintah Kolonial Belanda tempo dulu yang menganakemaskan Cina di dunia tata niaga, hingga kini ma-

---

* Tulisan ini dibuat pada tahun 1993, dan pernah dimuat di Suara Pembaruan.

sih meninggalkan luka lama yang belum sembuh bagi warga pribumi.

Belanda dan Cina dalam dunia perdagangan dapat *side by side* untuk memperluas usahanya. Oleh karena itu, keturunan Cina menganggap perlakuan itu sebagai peluang dan kesempatan dalam meraup dunia perdagangan sebagai ruang gerak, karena kesempatan semacam ini tak diperolehnya di tanah leluhurnya.

Sementara itu di sisi lain, kelompok pribumi yang memang sudah tertindas dari sisi kehidupan ekono-mi, politik dan ideologi berabad-abad lamanya, semakin dongkol dengan keistimewaan perlakuan penjajah terhadap Cina pendatang.

Pada titik kulminasi direbutnya Kemerdekaan RI, dimana rakyat Indonesia merasa diri sebagai rakyat yang merdeka, maka sejak itu *political will* para pengambil keputusan tergambar dalam produk hukum untuk mewujudkan *nation building* yang diidamkan sebagai negara yang merdeka dan berhak menentukan haluan negara yang mencita-citakan kesejahteraan dan kemak-uran Bangsa Indonesia.

Namun disayangkan sikap *arogan* yang ditunjang dengan kemapanan ekonomi warga Cina sejak jaman penjajahan sudah terbentuk, sehingga di kalangan mereka sendiri sulit melupakan perlakuan 'anak emas' oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dan sampai kinipun masih terbawa-bawa dalam kehidupan sosial ekonomi dan bahkan semakin kompleks dengan diwarnai semakin kental dipeliharanya tatanan adat-istiadat dari tanah leluhur mereka. Sikap ini muncul sebagai sebab akibat perlakuan aparat sendiri.

Mahyudin Syafei menilai, kemapanan ekonomi dan budaya yang selama ini dinikmati warga keturunan di dalam masyarakat yang pluralis tidak akan menimbulkan konflik etnik sebagaimana yang dikhawatirkan. Alasan-

nya, karena stabilitas politik dalam pengertian cakupan wawasan nasional sudah terjalin.

Tetapi yang kasuistik dapat saja terjadi, seperti ketidakseragaman pola pengupahan bagi karyawan Cina dan pribumi di sebuah badan usaha swasta milik Cina yang hingga kini masih saja terjadi di Pontianak namun sulit dibuktikan. Tapi nanti, suatu saat akan muncul kepermukaan dan menjadi terbuka dengan sendirinya.

Akil Mochtar justru menilai sebaliknya. Justru kemapanan sosial ekonomi warga keturunan yang diwarnai dengan semakin kental dipeliharanya adat-istiadat yang dibawa dari tanah leluhur itu justru akan memperuncing sumbu konflik. Fakta membuktikan, aparat dari instansi manapun akan lebih memprioritaskan pelayanan kepada warga keturunan. Dan bahkan ruang gerak ekonomi warga keturunan mendapat pengamanan ekstra dari petugas keamanan. Ini lantaran dibalik prioritas tadi ada maksud pamrih tertentu yang diharapkan.

Oleh karena itu kemapanan hidup, perlakuan dan perhatian khusus kepada warga negara keturunan dapat saja memperuncing konflik etnik antar golongan apabila tatanan kehidupan sosial politik ekonomi tidak segera dibenahi dari awal.

Jadi, untuk kondisi pluralisme masyarakat Kalimantan Barat bukan tidak mungkin konflik etnik ini, baik tertutup maupun terbuka, akan mencuat kepermukaan dan terjadi.

Sementara itu--setelah kemerdekaan--dari sisi kehidupan orang Cina sendiri yang cenderung ekslusif, sampai kini masih berkembang *image* sebagai warga negara kelas dua. Perasaan seperti ini mereka rasakan sewaktu 'jimat' SBKRI menjadi suatu senjata ampuh untuk menteror rasa nasionalisme mereka.

Eksklusif

Mega H. Andhika SH, salah seorang intelektual warga keturunan dan mantan Ketua PMKRI St. Thomas More Pontianak mengatakan, *image* semacam ini bukan saja merugikan warga keturunan itu sendiri tetapi secara keseluruhan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Diungkapkannya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi belum secara utuh menerima warga keturunan sebagai bagian dari aset bangsa. Dimisalkan-nya, gadis Cina dipanggil *amoi,* lelaki tua dipanggil *Pak lau* dan perempuan tua dipanggil *Mak lau*. Pemuda C-ina dipanggil *jang*. Dan ungkapan yang terkasar adalah *kau ni, dasar cine kafir.*

Menurut Mega, panggilan-panggilan seperti ini sebenarnya tidak diinginkan lagi oleh warga keturunan, namun kenyataannya mereka masih disapa dengan sebutan tersebut. Sehingga konsientisasi integritas dalam kehidupan sehari-hari menjadi buyar. Dalam kondisi keseharian ini akhirnya, warga keturunan yang memang sudah mapan dari segi ekonomi semakin memperlihatkan aroganismenya, sehingga mempengaruhi pola pemukiman yang ekslusif dan cenderung homogenitas.

Dampak lain yang dirasakan, juga di dunia pendidikan. Dari pola pemukiman yang homogen akhirnya berpengaruh pada pemilihan tempat pendidikan yang juga cenderung homogen. Jadi tidak mengherankan kalau sekolah-sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta jurusan tertentu menjadi sasaran utama mereka yang rata-rata sudah mapan kehidupan ekonominya.

Komparasi pembinaan proses pembauran menurut Mahyudin Syafei, dalam kondisi apapun lebih baik yang terjadi di bangku sekolah daripada di luar sekolah. Bagaimanapun juga proses pembauran yang terjadi di se-

kolah sudah terpantau dengan pola pembinaan guru dengan murid sesuai dengan kurikulum. Tetapi di luar sekolah mereka kembali ke sarang yang eksklusif lagi.

Namun Petrus Rostandy dan Akil Mochtar berpendapat lain. Proses pembauran sulit terjadi baik di bangku sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di tempat tinggal, mereka terbentuk dalam binaan komunitas etnis yang masih kuat sementara di sekolah faktor *iner* tersebut tetap dibawa tanpa ada perasaan bersalah.

Petrus Rostandy yang juga dosen di Akademi Widya Dharma Pontianak ini pernah bereksperimen dengan memberi tugas diskusi trio bagi mahasiswa-mahasiswinya. Apa hasilnya? Ketika diskusi kelompok dimulai terbentuk dengan sendirinya trio etnik yang sejenis. Instruksi diskusi trio yang harus heterogen tersebut disambut dengan gerutu satu sama lain. Jangankan di luar di bangku di sekolah saja sulit.

Sementara Akil Mochtar melihat dari sisi kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengimbau agar komposisi pribumi dan warga keturunan setidaknya 60 berbanding 40. Ditekankannya, itu sifatnya imbauan semata. Tetapi realitanya anak-anak usia sekolah dari warga keturunan yang mapan ekonomi selalu memilih sekolah favorit, sekalipun mahal. Akhirnya pola pengelompokan terjadi lagi.

Bisa dihitung dengan jari berapa jumlah warga keturunan di sekolah-sekolah negeri, begitu juga sebaliknya berapa persen saja anak-anak pribumi yang duduk dibangku sekolah swasta.

Dari pola pergaulan yang terjadi di sekolah swasta dimana terjadi pola pengelompokan warga keturunan yang masih kental menggunakan bahasa ibu, terbukti sangat berpengaruh besar terhadap rasa *at home* anak-anak pribumi yang jumlahnya hanya segelintir orang saja. Namun sebaliknya tidak terjadi di sekolah negeri yang war-

ga keturunannya sedikit sekali.

Rohaniwan Katolik itu pun melihat hal yang sama. Saat istirahat, anak-anak warga keturunan dengan royal membelanjakan uangnya hanya untuk makanan, sementara itu anak-anak pribumi harus mengikuti derap ekonomi orang tuanya. Sisi lain lagi, masalah bahasa. Hingga kini dan ini yang membuat anak-anak pribumi--sekali pun berada pada taraf ekonomi yang sama--tidak kerasan di sekolah swasta yang didominasi siswa dari warga keturunan yang bebas menggunakan bahasa Cina. Dan siswa pribumi akhirnya lebih memilih pindah sekolah.

Sementara itu peran BAKOM PKB Kalbar lebih mengarah pada kegiatan ceremonial dan lebih berorientasi politis. Terjadi, pribadi-pribadi tertentu berupaya mengklaim warga keturunan yang bernaung di dalam BAKOM PKB sebagai pendukung salah satu kekuatan politik.

Alhasil, Akil Mochtar menilai bahwa gaung pembauran yang selama ini dikumandangkan pemerintah belum seirama dengan gerak para pelakunya. Sedangkan kegiatan yang ada hanya kulitnya saja dan kurang menyentuh aspek hakiki dari makna pembauran itu sendiri.

***

06

MENCERMATI POLA HUBUNGAN CINA DAYAK DI KALIMANTAN BARAT

Stepanus Djuweng

Di Kalbar, belum banyak studi dilakukan--untuk tidak menyebutkan tidak ada sama sekali--tentang hubungan etnik, sebut saja misalnya antara Dayak dan Cina. Padahal, studi ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam merancang pembangunan di daerah yang penduduknya merupakan *multiethnic society*, seperti di Kalbar.

Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui secara mendalam hubungan antara etnik Dayak dengan masyarakat keturunan Cina. Di Sarawak misalnya, hasil studi yang dilakukan (Richard C. Filder, 1978) menunjukkan hubungan Cina dengan suku Dayak Iban--pada tingkat basis--memiliki pola yang saling tergantung satu sama lain. Suku Dayak, adalah masyarakat agraris yang menghasilkan sejumlah komoditas yang laris di pasaran internasional, tetapi

mereka tidak menguasai seni pemasaran. Masyarakat Cina membangun kehidupan mereka pada sektor perdagangan, dan karena itu tergantung kepada suplai dari orang-orang Dayak. Setiap tauke Cina di pasar memiliki sejumlah "klien" orang Dayak yang menyuplai permintaannya akan komoditas-komoditas tertentu.

Pola hubungan ini memang berangkat dari kepentingan ekonomi. Tetapi faktor-faktor sosial dan budaya yang non-ekonomis justeru sangat berperanan. Sangat jelas,bahwa tanpa rasa saling percaya yang dibangun melalui pengenalan karakter pribadi, kelompok dan kemudian masyarakat yang lebih luas, pola hubungan timbal-balik secaara ekonomis itu tidak akan berlangsung. Selain itu, hubungan dagang semacam ini merupakan hasil tradisi dan karya masing-masing kelompok, baik Cina maupun Dayak.

Memang, seperti diungkapkan beberapa pakar, masyarakat Cina dalam melakukan kegiatan bisnis mereka terkadang menyelipkan kiat-kiat khusus yang merupakan gabungan dari kepiawaian manejemen dengan pemahaman terhadap karakter sosial budaya kelompok yang mereka jadikan parner dalam dunia bisnis. Hal itu masih ditambah lagi dengan menggunakan celah-celah ketidaksempurnaan hukum dan perilaku aparatus penguasa yang "gampang diatur". Dengan kepiawaian yang dibungkus secara elegan lewat istilah mentereng *human relations* itu, meskipun partner dan penguasa ditipu sedikit, mereka tidak merasakannya.

Apa Kata Toke

Seorang pemuka masyarakat Dayak dari kecamatan Menjalin Kabupaten Pontianak menceritakan pengalam-

an masyarakatanya dalam berhubungan dengan tauke-tauke keturunan Cina.

Dalam rangka membina hubungan baik dengan para "klien" yang adalah penduduk Dayak setempat, para pedagang Cina bersifat sangat akomodatif. Pada masa itu perjalanan dari kampung ke kampung hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Ketika sang "klien" datang setelah berjalan 1 hingga 3 jam, dengan ramah Tauke memberi salam a la Dayak, "Gajah, udah lama kita' na' ataknng pauda' a, diahe kita'?" (Waduh, paman sudah lama tidak muncul, ada apa?" Merasa disapa ramah, ia pun singgah di toko itu. Oleh Tauke ia langsung disambut hangat dan diajak makan sambil minum arak sedikit.

Pada saat karet ditimbang, Tauke memberitahunya, "Getah paman sekian kilo. Duitnya sekian rupiah" Sang "klien" pun menjawab santai, "Au' ahe ja kita' ma'an" (Yah apa katamu sajalah). Ketika ditanya apa yang akan dibelinya, tanpa memikirkan jumlah uang yang tersedia ia pun menyebut sesuai keperluan, "Tembakau, garam, gula, minyak tanah, cuka getah ..." Ketika ia pulang semua barang sudah lengkap, tanpa memandang berapa jumlahnya. Semuanya sudah diatur oleh Tauke.

Di Kalimantan Barat, pola hubungan Cina-Dayak dapat dikatakan saling membutuhkan, walaupun belum tentu saling menguntungkan. Pola ketergantungan Cina-Dayak di Kalbar juga mirip seperti temuan Felder di Sarawak.

Hubungan itu berpangkal pada saling ketergantungan secara ekonomis tetapi kemudian merembes ke bidang-bidang lain. Ada yang positif, tetapi juga tidak dapat disangkal, memiliki sisi-sisi negatif. Salah satu kriostalisasi dari hubungan semacam itu lahirlah sikap pandang seperti ini, "Kalau berdagang, tak bisa lawan

Cina." Sisi negatif dari hal semacam ini adalah adanya rasa tidak percaya diri pada orang Dayak untuk bergerak dalam bidang perdagangan.

Dan memang, jika orang Dayak harus bersaing dalam bidang bisnis dengan orang Cina, Dayak memiliki lebih besar peluang untuk kalah. Pengalaman sehari-hari membuktikan hal itu. Di sebuah perkampungan Dayak yang tidak jauh dari Pontianak, cerita ini bermula. Seorang tokoh masyarakat Dayak setempat memiliki kebun karet yang menghasilkan sekitar 100 kg sehari. Ia kemudian *meraih* (berdagang kecil-kecilan), dibantu seorang kerani (penjaga toko) yang adalah keturunan Cina. Selang beberapa tahun kemudian, sang kerani memisahkan diri memulai usahanya menjadi pedagang keliling. Tahun berikutnya ia membeli sebidang tanah lalu membangun rumah dan mulai menetap. Tahun kedua, mantan induk semangnya sudah bangkrut, dan berbelanja kepadanya untuk keperluan sehari-hari. Padahal, mereka menjual karet dan membeli barang kepada Tauke yang sama di Pontianak. Ketika diselidiki, justeru di situlah letak kuncinya. Sang Tauke, membeli karet dari rekannya yang keturunan Cina lebih mahal dan menjual barang kepadanya Cina lebih murah, dibandingkan kepada rekannya yang orang Dayak tadi. Bos mereka berdua ini, juga keturunan Cina.

Sekarang, pola ini masih berlaku. Jika seorang pedagang bukan keturunan Cina asal Pahauman (130 km dari Pontianak) menjual karet kepada pengumpul karet di Pontianak harganya sama--kalau tidak lebih murah--daripada harga yang dipasang pedagang Cina yang datang ke Pahauman untuk membeli di tempat. Padahal, hasilnya dijual kepada pedagang pengumpul yang sama. Hal ini berlaku pula bagi produksi pertanian lainnya. Konon, harga ini sudah diatur oleh semacam "sindikat" perdagangan.

Di Pontianak sendiri, jika seseorang berbelanja menggunakan bahasa Cina, harga lebih miring dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak heran, sejumlah orang Dayak berbahasa Cina secara fasih. Lagi-lagi, bahasa itu disebut "bahasa perdagang-an".

Anekdot

Masih dalam konteks perdagangan Cina Dayak, anekdot ini gambaran lain dari hubungan itu. Dua bersaudara (Dayak) bernama Juan dan Calek menjual buah labu paraggi dan buah mentimun ke pasar. Ketika masuk ke sebuah toko, sang Acek (Tauke Cina Tua) bertanya dalam bahasa Indonesia yang tidak fasih, "Apa calek?" (Cari apa?). Juan lantas berkata kepada Calek, "Gajah, kanal ia ka' kao. Ayukg na' apa' de'e ngka'ya Barek buah paranggi koa ka'ia." (Maksudnya: Waduh kenal dia kepadamu. Mungkin ia kawan bapak kita dulu. Berikan buah labu paranggi itu kepadanya). Dan Calek pun memberi cuma-cuma buah labu yang dibawanya.

Perjalanan diteruskan ke toko berikutnya. Kali ini sang tauke bertanya, "Apa juan?" (Jual apa?). Calek berkata kepada Juan, "Kanal uga' ia ka' kao. Manyak sidi ayukng na' apa' de'e, uwah?. Barek buah timun koa. (Waduh, kenal juga ia kepadamu. Banyak juga kawan bapak kita dulu. Berikan buah timunmu itu padanya.)

Akhirnya Calek dan Juan pulang tanpa membawa apa-apa. Cerita ini mungkin hanya sebuah anekdot. Tetapi jika tradisi lisan adalah cerminan kondisi masyarakat pada suatu masa, maka peristiwa di atas adalah sketsa hubungan antara masyarakat Dayak dan Cina pada waktu itu.

Pengaruh Budaya

Di balik kegagalan orang Dayak meyerap seni perdagangan dari orang Cina, mereka (Dayak Kanayatn yang bermukim di Kabupaten Pontianak dan Sambas khususnya) berhasil menyerap praktik kebudayaan Cina yang lain.

Pertama, bahasa. Di samping sejumlah orang Dayak mengusai salah satu dialek bahasa Cina secara fasih, sejumlah kosa kata bahasa Kanayatn berasal dari salah satu dialek bahasa Cina.

Kedua kebiasaan menggunakan alat sumpit dan cara pengelompokan dalam makan bersama pada saat pesta. Dalam pesta perkawinan orang Dayak (di desa, khususnya) cara makan menggunakan sepit (chop-stick). Selain itu cara duduk pada waktu makan yang mengelompok antara 6 sampai 10 orang, disebut tok juga berasal dari tradisi Cina. Maka jika ada pertanyaan, "Berapa orang yang datang ke pesta perkawinan A? Jawabannya adalah 5 tok atau sepuluh tok, bukannya 50 orang atau seratus orang.

Ketiga, nama-nama tempat. Nama-nama tempat di daerah Kabupaten Pontianak dan Sambas pada umumnya berasal dari bahasa Cina: Pak U Nam (Pakunam), Liongkong (Lie Ong Khong), Tainam (Tai Nam), dan lain-lain.

Faktor lain yang mengakrabkan hubungan etnik Dayak dan Cina adalah persamaan-persamaan dalam tradisi makan dan minum. Pada masyarakat Dayak orang yang makan sepiring dan minum segayung (tidak ada perbedaan makan minum) berarti keluarga. Pandangan mendasar semacam ini terefleksi secara nyata dalam sikap keterbukaan yang kemudian menjadi faktor adesif dalam konteks hubungan budaya antara kedua belah pihak.

Selain itu, sejumlah besar kaum tua Cina dan Dayak percaya bahwa pada masa lalu terjadi asimilasi secara besar-besaran antara orang Dayak dan orang Cina. Ketika arus imigran Cina masuk ke Kalbar, mereka sebagian besar terdiri dari kaum lelaki, karena perjalan laut yang sedemikian jauh tidak mudah untuk mengikursertakan kaum wanita. Lantas para lelaki ini menikah dengan wanita suku Dayak. Proses asimilasi semacam ini masih terjadi sekarang, meskipun dalam skala yang kecil. Dan tidak hanya laki-laki Cina menikahi gadis Dayak, tetapi juga terjadi sebaliknya. Berkembangnya ajaran Kristen di kalangan masyarakat Cina dan Dayak kemudian memperlonggar sekat-sekat budaya, sehingga perkawinan antar kedua etnis menjadi hal yang lumrah.

Peristiwa Politik

Peristiwa berdarah tahun 1967 adalah sisi hitam sejarah hubungan etnik Cina-Dayak. Menurut Catatan Kodam XII Kadit Sospol Kalbar orang Cina terbunuh dalam peristiwa tersebut. Selain itu, ribuan masyarakat Cina yang bermukim di pedesaan terdesak ke kota-kota pesisir, meninggalkan harta benda yang mereka miliki.

Sulit dilacak bagaimana kesan masyarakat Cina yang mengalami peristiwa ini sekarang. Yang jelas, ini adalah peristiwa politik sulit didefiniskan hitam-putih.

***

07

PERGESERAN POLA-POLA PENGGUNAAN BAHASA DI KALANGAN MASYARAKAT DAYAK NGAJU

Oleh Dr. JJ. Kusni

Kata "pergeseran" melukiskan adanya suatu gerak atau perubahan tempat dari suatu kedudukan, letak, ruang, ke kedudukan, letak atau ruang yang lain dalam proses perjalanan waktu. Artinya, ketika mengatakan terjadi "pergeseran", sekaligus diungkapan telah terjadi perkembangan. Memang wajar jika segala sesuatu itu berkembang, bergerak atau berubah. "Segalanya mengalir", ujar Heraclitus. "Sembarang barang akan tetap rehat atau bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada kakasnetto yang bekerja padanya", ujar Gerry Van Klinken dalam artikelnya "Sejarah gerak: Antara Aristoteles dan Galileo" (Majalah Kritis, No. 3 Th. VI, Salatiga, Januari 1992, Hlm. 9). Masalahnya, apakah perubahan dan perkembangan itu merupakan gerak mundur atau maju?

Dengan arti kata pergeseran seperti di atas, kita dapat melihat maju atau mundurnya proses perkembangan tersebut. Begitulah ketika mengatakan: "Pergeseran pola-pola Penggu-

naan Bahasa Dalam Masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah", sudah tersirat pemahaman bahwa pola-pola penggunaan bahasa dalam masyarakat Dayak Ngaju sekarang sudah berubah selama kurun waktu tertentu. Untuk tulisan ini waktu tersebut dipilah ke dalam dua priode yaitu Periode Pemerintahan Soekarno (1945-1966) dan periode Pemerintahan Soeharto (1967 sampai sekarang). Dua tahap dengan ciri-ciri berbeda dan dengan dampak masing-masing terhadap segala bidang kehidupan, termasuk pola pengguanaan bahasa. Tidak terkecuali terhadap bahasa Dayak Ngaju. Bagaimana isi dan bentuk perubahan itu? Maju atau mundurkah? Mengapa isi dan bentuk perubahan itu mengambil ujud seperti sekarang? Titik berat yang diulas adalah periode pemerintahan Orba.

Usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dimulai dari masalah yang paling akhir, karena masalah tersebut sesungguhnya memperlihatkan peranan bahasa dalam masyarakat.

Bahasa Adalah Alat Yang Netral ?

Pandangan yang umum dianut di negeri ini pada masa pemerintahan Sukarno mengenai bahasa, agaknya dipengaruhi oleh pandangan negeri-negeri sosialis, baik Uni Soviet maupun RRC dengan mana pemerintahan RI mempunyai hubungan sangat erat. Pandangan tentang bahasa di negeri-negeri sosialis pada waktu itu tergambarkan pada tulisan J. Stalin "Mar-xisme Dan Masalah-masalah Linguistik". Stalin berpendapat, bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia adalah netral. Tidak memihak klas manapun, karena siapa saja menggunakan bahasa yang sama. Tujuan penggunaan alat itulah yang memberikan corak corak pemihakan atau pengabdian alat yang ciri dirinya sendiri sesungguhnya bersifat netral.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas adalah pendapat yang sekarang mulai menyusup ke kalangan para cendikiawan Indonesia, melalui pengaruh pendidikan Barat, yang mengang-

gap bahwa bahasa itu sendiri sebagai alat tidaklah netral. Arel Heryanto, pengajar pada Universitas Kristen Satya Wacana, juga Dr. Kuntowijoyo dari Universitas Gajah Mada, berpendapat bahwa bahasa sebagai simbol pemaknaan manusia atas dunianya berperan bagi kekuasaan, malah penting bagi kekuasaan, sebab (i). bahasa merupakan presensi realitas dan tempat terjadinya peristiwa sehingga realitas dan peristiwa yang dicipta dan dipahami oleh orang selalu tertata dalam bahasa, dan (ii). bahasa memiliki kekuatan dahsyat dan tajam bila sudah dipakai orang lain (Ariel Heryanto, "Berjangkitnya Bahasa Bangsa Indonesia", Prisma, No. 1, Jakarta, 1989, hlm. 3-17; Kuntowijoyo, "Politik Kebudayaan", Editor, IV, Jakarata 17 Januri 1991; Lorens Bagus, "Tirani Kata", Matra, 53, Jakarta, Dessember 1990). Sedangkan Joko Saryono dan Herlinawati Syaukat, dalam kata-kata lugas menunjukkan betapa bahasa itu senantiasa digunakan oleh penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan secara efektif. Kedua penulis mengusut jauh ke dalam sejarah Indonesia sampai kepada praktik raja-raja Mataram II, khususnya Sultan Agung, dan juga mencari contoh-contoh dari luar negeri untuk menunjang dalil tentang ketidak-netralan bahasa itu (cf. Joko Saryono dan Herlinawati Syaukat, "Bahasa Indonesia Sebagi Cermin Dinamika Kekuasaan ORBA", Basis, XLII, No. 2, Yogyakarta, Februari 1993, hlm.55-67).

Melalui bahasa diciptakan simbol-simbol baru, dihancurkan simbol-simbol lama yang tidak sesuai dengan proses konsolidasi dan memperluas kekuasaan sebagai tujuan utama berpolitik (cf. Nicolo Machiavell, "Sang Penguasa", PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 66). Penegakan simbol-simbol acuan ini diiringi oleh proses yang disebut oleh filosof Perancis, Jean-Francois Lyotard, bapak dari post-modernisme, sesungguhnya sebagai proses atomisasi masyarakat dan ilmu pengetahuan (cf. Jean-Francois Lyotard, "The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge", Montreal, 1980, 109 hlm.). Dalam proses ini pihak kekuasaan melakukan paksaan-paksaan, mengontrol bahasa untuk menyaring kekuatan-kekuatan pemikiran lain yang

mungkin dikomunikasikan oleh bahasa. Di satu pihak berkembangnya elitisme dan atomisasi masyarakat, tapi pihak lain muncul dengan kuat arus yang oleh Dr. Max Ferro dari 1"EHESS, Paris, disebuit gejala "penyeragaman". Akibatnya le grand recit (karya besar lisan/tulisan tentang kenyataan maupun imajinansi) dan le recit emancipatoris (karya lisasn/tulisan yang mengandung anjuran emansipasi, seperti karya Voltaire yang mempengaruh kebangkitan revolusi Perancis) kehilangan kredibilitas, menjadi delegitim. Sedangkan atomisasi, elitisme, uniformise mendapatkan legimitasnya melalui pilihan poilitik pemegang kekuasaan, diproteksi oleh Keynesisme. Artinya, tujuan-tujuan politik kekuasaan berperan sebagai pengendali pergeseran-pergeseran yang berlangsung.

Bentuk Dan Isi Pergerseran

Bentuk dan isi pergeseran hanyalah bagian kecil saja dari suatu kerangka besar tujuan politik seperti yang diungkapkan oleh Machiavelli. Untuk tujuan tersebut Orba menerapkan pendekatan keamanan dan kestabilan. Pendapatan nasional bruto (PNB) yang meningkat diharapkan menetes ke bawahnya sesuai dengan besaran pertambahan PNB (trickle down effect). Lalu kemakmuran pun akan meninggi. Pendekatan dan tujuan-tujuan inilah yang memfilter, membimbing pembangunan bahasa, memedomani penciptaan simbol-simbol, mengemudi pembinaan mentalitas para warga-negara, patokan bagi semua indoktrinasi (bukan discourse yang berarti dialog dengan argumentasi-argumentasi), penakar baik dan buruk, mengatur uniformitas dan bukannya kebhinnekaan. dalam struktur kenegaraan. Pendekatan ini paling serasi dengan bentuk sentralisai yang kuat. "Top down" bukannya "down top". Instruksi bukan partisipasi. "Manusia baru Indonesia " yang dilahirkannya bercirikan acuh tak acuh, berbudaya takut, egois, cari selamat sendiri, kurang prakarsa dan penurut (budakisme), menunggu restu.

Bentuk-bentuk kongkret dari simbol-simbol Orba misalnya untuk melukiskan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa lewat kata SARA, GPK, OTB, oknum, bersih lingkungan, keterpengaruhan, subversi, ektrim kiri, ekstrim kanan, anti pembangunan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kiranya orang tidak lupa akan simbol PETRUS yang angker . Pada zaman pemerintahan Sukarno, untuk mengeliminasi dan menghancurkan kekuatan-kekuatan yang mengancam kekuasaan Orde Lama diciptakan istilah-istilah anti revolusi, ganyang, sikat, gilas, kontra-revolusi, dan semacamnya" (cf. Djoko Saryono dan Herlinawati Syaukat, 1993:59).

Setelah menciptakan simbol-simbol ancaman, disisi lain ditanamkan watak patuh, penurut, menunggu perintah melalui kata-kata: ANDA, SAUDARA, BUNG. Nampak bahwa citra yang dilukiskan oleh simbol-simbol pada zaman pemerintahan Sukarno, melalui kata-kata Bung atau Saudara menempatkan manusia warga negara Republik ini pada posisi setara. Tidak dalam posisi hirarkis, tinggi-rendah sehingga individu mungkin mengembangkan individualitasnya. Kesadaran politik warga negara pada periode pemerintahan Sukarno jauh lebih menonjol dari pada periode Orba di mana sering politik dikutuk sebagai sesuatu "yang kotor". Proses depolitisasi masyarakat pada zaman Orba berlangsung dengan "masa memgambang", "normalisasi kampus", dll. Sedangkan pada zaman pemerintahan Sukarno berlangsung proses sebaliknya di mana "politik sebagai panglima".

Tetap dalam kerangka besar tujuan politik, suasana rukun oleh Orba dilambangkan dengan kata-kata : KARYAWAN, KEKELUARGAAN, AZAS TUNGGAL, KONSENSUS NASIONAL. Kata "buruh" tidak disenangi karena dikatakan "melukiskan perjuangan klas" yang dianggap bertentangan dengan azas Pancasila. Sedangkan pada masa pemerintahan Sukarno, buruh dan tani digambarkan sebagi "soko guru revolusi" dan revolusi digambarkan sebagai "belum selesai". Semangat bertarung oleh pemerintahan Sukarno juga didorong

melalui program "membangun kebudayaan yang berkepribadian nasional" atau "ambil alih" untuk bidang ekonomi. "Angkatan ke lima" untuk bidang militer.

Orba menggambarkan citra baik dirinya melalui antara lain unngkapan-ungkapan pelembut yang berkembang subur, seperti "masa bakti" (pengganti "masa jabatan" atau "masa berkuasa"), "rawan pangan" (kelaparan), "komersialisasi jabatan" (korupsi), "penyesuaian" (kenaikan), "pengamanan" (penangkapan). Sedangkan pemerintahan Sukarno memecat seseorang dengan istilah "ritual".

Untuk meredam emosi masyarakat terhadap suatu kenyataan digunakan istilah-istilah seperti: jer basuki mawa bea, mikul dhuwur mendhem jero, demi kepentingan umum, keterbukaan, kita perlu mengetatkan ikat pinggang, demi pembangunan, dan sebagainya. Jika diteliti, pergeseran bentuk-bentuk yang berlangsung, metamorfose-metamorfose yang terjadi, tidak satupun yang terlepas dari kerangka besarnya. Bentuk memang mencermin-kan isi.

Kasus Dayak Ngaju

Masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah pun tidak luput dari dampak keadaan yang berlangsung secara nasional. Lebih-lebih ditopang oleh struktur sentralistis yang kuat ditambah dengan sistem "droping" untuk jabatan pos-pos kunci di pemerintahan.

Masuknya banyak kosa kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Dayak sewajarnya tidak menjadi suatu keberatan, karena proses saling mendekat antara bahasa daerah dengan bahasa nasional, saling mengisi dan memperkaya. Tetapi soalnya menjadi lain apabila pembangunan bahasa nasional didasarkan atau bertumpu pada beberapa bahasa tertentu. Persoalannya pun akan semakin menjadi lain lagi apabila pendekatan di atas ditrapkan di daerah-daerah yang memiliki latar dan budaya lokal

sendiri.. Misalnya mentalitas budakisme atau neo-feodal yang diungkapkan melalui kata BAPAK, IBU sudah mulai umum dipakai, setidak-tidaknya di kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Palangka Raya. Padahal dalam bahasa Dayak Ngaju "bapak", "ibu" mempunyai konotasi persis untuk menunjukkan hubungan darah antara anak dan orang tua saja. Bapak dan ibupun tidak akan berang jika dipanggil dengan "ikau" (kau), asal saja tidak menyebut nama orang tua, paman, kakek, nenek, yang memperlihatkan hubungan demokratis dalam keluarga dan masyarakat. Dipertegas lagi oleh tidak adanya tingkat-tingkat dalam bahasa Dayak Nagju. Pentrapan pendekatan stabilitas nasional serta rangkaian politik yang mengikuti agaknya menimbulkan gesekan dengan dasar dan budaya lokal. Sesuai dengan latar belakang dan dasar budaya ini, sampai waktu tertentu nampaknya orang-orang Dayak memilih sikap "menunggu dan melihat" perkembangan. Sejauh ini sebgaian besar orang Dayak Ngaju masih akrab dengan bahasa Ngaju sendiri daripada bahasa nasional. Mereka masih lebih leluasa mengungkapkan diri dalam bahasa Dayak Ngaju daripada dalam bahasa nasional. Sehingga konsepsi-konsepsi, simbol-simbol yang mau ditegakkan melalui bahasa nasional tidak sepenuhnya mulus berlangsung. Kecuali untuk lapisan kecil elit yang menyatu dengan struktur. Ketika mereka mengucapkan kata "bapak", agaknya simbol yang dibawakan oleh kata tersebut tidak diresapi. Mereka mengucapkannya sebagaimana mereka menyebutkan nama seseorang, julukan saja. "Sansana", "takir petak", "takir laseh", "manasai", "lahap", simbol-simbol masih kuat menyertai kehidupan sehari-hari. Keakraban dengan bahasa dan budaya sendiri ini lebih diperkuat lagi oleh jumlah orang-orang Dayak Nagju di Kalimantan Tengah masih sangat berarti. Etnik-entik lain yang berasal dari luar, oleh imbangan demografis yang masih menguntungkan orang Dayak Ngaju merasa perlu belajar, paling tidak kata-kata kunci bahasa Dayak Ngaju. Apakah bukan karena gesekan budaya dan simbol-simbol ini maka terjadi unjuk aspirasi orang Dayak dalam masalah

pemilihan gubernur Kalteng setelah Drs. Suparmanto merampungkan masa jabatannya ? Mereka sudah tidak bisa lagi berdiam terus dan merasa sudah "peda" (cukup!). Konsep "peda", menurut pengamatan saya masih cukup dalam tertanam pada diri mayoritas orang Dayak Nagju Kalimantan Tengah. Padanan simbol ini adalah "mamut-meteng" (gagah-berani).

Peranan budaya Dayak Ngaju sebagai penangkal ini juga nampak jelas ketika menghadapi "politik ragi usang" pemerintah kolonial Hindia Belanda dan segala citra buruk terhadap orang Dayak yang disebarkan ke segala penjuru. Kristenisme yang masuk ke tanah Dayak diterima oleh orang Dayak Ngaju atas dasar budaya mereka. Karena itu jarang ada kasus orang Dayak yang kemudian menganut agama kristen lalu menyangkal ke-Dayak-annya. Sungguh menarik mengamati bagaimana orang-orang Dayak kristen melukiskan kehidupan dalam litani atau lagu-lagu gereja :

"itah belum hung kalunen
kilau dimpah tasik wei
amun Yesus hung kamburi
ela mikeh sanang wei"

("di dunia manusia kita hidup
tak ubah bagai menyeberang laut
apabila di belakang Yesus ada
janganlah takut, tenang saja").

Simbol-simbol yang digunakan dalam bait ini sungguh sesuai dengan lambang-lambang yang hidup dalam budaya Dayak: tasik, perahu, atau jukung adalah alat transport yang sangat akrab dengan kehidupan orang Dayak Ngaju. Sedangkan pesan "janganlah takut, tenang saja" paralel dengan semangat "mamut-meteng" yang hidup dalam legenda-legenda mereka. Ketika penyebar-penyebar agama kristen memaksakan simbol-simbol mereka, agama ini memperoleh kesulitan mendapat

pegikut di kalangan orang Dayak. Pergesekan lambang dan fisik terjadi yang bahkan sempat memakan korban nyawa penyebar-penyebar kristen dari Eropa. Dalam hubungan ini, menjadi sangat menarik permintaan maaf keuskupan gereja Katolik Kaledonia Baru kepada masyarakat Kanaki pada kesempatan Natal 1993 yang lalu. Atas nama gereja Katolik, uskup minta dimaafkan atas kesalahan gereja yang telah menyebabkan kerusakan pada budaya Kanaki. Hal serupa diungkapkan oleh Niko Likumahuwa dalam artikelnya "Dampak Penyebaran Injil Terhadap Budaya Asli dan Inkulturasi" (lihat: KRITIS, No. 1, th. VI, Salatiga, Juli 1991, hlm.-hlm.47-56).

Sedangkan dalam kebiasaan berdoa orang Dayak Kristen sekarang, saya melihat paralelismenya dengan kepercayaan orang Dayak akan "kaji-kaji", "kekuatan dunia lain", kepada "penguasa yang di atas" dan "yang di bawah". Selain dari kata-kata "kaji" yang sering diungkapkan dengan istilah "imbasa" (dibaca), kekuatan bahasa dan atau kata-kata juga nampak dari kepercayaan orang Dayak Ngaju pada "sapa" (kutukan).

Kesimpulan

Pergeseran dalam bahasa Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah terjadi dalam proses saling mendekat antara bahasa Dayak Nagju dengan bahasa nasional serta bahasa-bahasa daerah lainnya. Pergeseran itu berbentuk pe-merkayaan kosa kata bahasa Dayak Ngaju dengan mengambil kosa kata bahasa-bahasa lain. Tapi simbol-simbol dominan yang ditampilkan oleh pola penggunaan bahasa masih tetap berdasarkan budaya Dayak Ngaju sendiri.

Kontak dengan pihak luar membawa keuntungan bagi kedua-belah pihak. Agaknya antara nilai dan simbol-simbol yang mau ditegakkan oleh pendekatan keamanan dan stabilitas nasional dari pusat dengan nilai dan simbol-simbol budaya Dayak nampaknya bukan menimbulkan pergeseran tapi lebih banyak

menjurus pada pergesekan. Pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk bisa berhasil dan terkonsolidasi, perlu kesa-daran tanpa paksaan.

***

08

DAYAK DI SARAWAK: SEBUAH PERBANDINGAN

Stepanus Djuweng

Di Sarawak, yang adalah salah satu Negara Bagian dari Federasi Malaysia, suku bangsa Dayak, terdiri dari 44 % dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk, masyarakat keturunan Cina 30 %, Melayu 19%, dan Melano 6 % dan kelompok lainnya sekitar 1%.

Masyarakat Dayak pada umumnya memeluk Agama Kristen. Yang terbesar adalah pengikut Anglican, menyusul Katolik dan beberapa Sekte Kristen lainnya. Masyarakat Cina sebagian besar masih menganut kepercayaan lama, dan sebagian lainnya beragama Kristen. Sedangkan masyarakat Melayu seluruhnya beragama Islam, dan suku Melano terbagi antara pemeluk Kristen dan Islam. Menurut catatan Dr PM Kedit, masyarakat Dayak Sarawak terdiri dari sekitar 30 subsuku. Kelompok yang terbesar adalah Iban (Sea Dayak), kemudian Bidayuh (Land Dayak), Orang Ulu (Kayan dan Kenyah) serta sejumlah kelompok kecil lainnya. Suku Dayak Iban berasal dari daerah Kapuas Hulu (Kalbar) sedangkan suku Dayak Kayan dan Kenyah sebagian besar berasal dari daerah Kaltim.

Penghasilan utama Sarawak adalah minyak dan gas, kayu, dan hasil-hasil perkebunan. Pendapatan perkapita (1990) sebesar M$ 3.527 (waktu itu M$ 1 sekitar Rp 650). Dengan

patokan garis kemiskinan sebesar M$ 375, angka kemiskinan di Sarawak pada tahun yang sama tercatat sebesar 24,7 %.

Peranan Politik

Dewasa ini, peranan politik suku Dayak di Sarawak tidak sedominan pada masa-masa sehabis kemerdekaan, pada saat sejumlah pemimpin Dayak memegang posisi puncak baik di tingkat Negara Bagian maupun di tingkat Federal. Kesemuanya itu, berkaitan erat dengan campur tangan politik Kuala Lumpur yang sangat dominan di Negara Bagian itu.

Masyarakat Dayak Sarawak--secara politis--terbagi menjadi pendukung sejumlah partai politik. Polarisasi semcam ini telah berlangsung sejak masa sebelum terbentuknya Federasi Malaysia. Pada waktu itu terdapat enam partai politik di Sarawak. Hasil pemilu pertama Sarawak tahun 1963 menunjukkan, masyarakat Dayak memilih *Sarawak National Party* (SNAP) dan *Parti Pesaka Anak Sarawak* (Pesaka) sebagai penyalur aspirasi politik mereka. SNAP didirikan dan dipimpin oleh Datuk Stephen Kalong Ningkan, seorang putera Dayak Iban dari daerah Saribas. Sedangkan Pesaka, dipimpin oleh Tun Tumenggong JUGAH pemimpin traditional Iban dari daerah Batang Rejang.

Masyarakat keturunan Cina mendukung *Sarawak Chinese Association* (SCA) dan *Sarawak United People's Party* (SUPP). Sementara suku Melayu dan Melano memiliki partai masing-masing, yakni *Barisan Rak'yat Jati Anak Sarawak* (Barjasa) dan *Party Negara Sarawak* (PANAS).

Datuk Stephen Kalong Ningkan, menyusul pemilu pertama itu dilantik sebagai Chief Minister (Ketua Menteri) Sarawak yang pertama. Sementara itu Tun Tumenggong Jugah yang nyaris buta huruf diharapkan menjadi Kepala Negara Bagian (Yang di Pertua Negeri). Tunku Abdul Rahman, PM Federasi Malaysia waktu itu melihat, skenario ini me-

nempatkan suku Melayu pada posisi pinggiran dari arena politik Sarawak. Untuk itu, Tunku menciptakan Kementerian Urusan Sarawak (The Ministry of Sarawak Affairs) pada Kabinet Federal. Tun Jugah kemudian diangkat untuk menjadi Menteri Negara Urusan Sarawak. Di Sarawak, seorang pemimpin suku Melayu dilantik sebagai Kepala Negara Bagian.

Kehendak Kuala Lumpur untuk memberlakukan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Negara Bagian Sarawak ditolak oleh Ketua Menteri Datuk Stephen Kalong Ningkan, karena dianggap melanggar persetujuan pembentukkan Federasi Malaysia. Krisis politik tak terelakkan. Akhirnya Kabinet Ningkan digoncang mosi tak percaya, dan ia jatuh tahun 1966 dan SNAP menjadi partai oposisi. Setelah itu, Penghulu Tawi Anak Sli dari Pesaka ditunjuk untuk menggantikan Ningkan. Pesaka berkoalisi dengan *Parti Bumiputera* yang adalah gabungan dari Barjasa dan Panas.

Seusai pemilu 1970, Pemimpin Bumiputera, Adul Rahman Ya'kub dari suku Melano dan beragama Islam membentuk pemerintahan bersama SUPP dan SCA, sementara Pesaka tidak diajak dalam negosiasi itu. Beberapa hari kemudian, dua pemimpin Pesaka bergabung dengan Abdul Rahman Ya'kub. Tahun 1973, Pesaka berfusi dengan Bumiputera menjadi *Parti Bumipoutera Bersatu* (PBB). Sejak itu, kontrol partai sepenuhnya dilakukan oleh faksi Bumiputera, sementara mantan pemimpin Pesaka hanya sebagai pelengkap.

Situasi ini telah menempatkan masyarakat Dayak di Sarawak sebagai kelompok mayoritas yang dikuasai kelompok minoritas. Para pemimpin Dayak di SNAP tidak puas dengan situasi ini. Setelah gagal merebut kepemimpinan SNAP dari Datuk Amar James Wong (1983), Datul Leo Moggie Anak Irok, wakil Presiden SNAP, putra Dayak Iban, keluar dari SNAP. Bersama sejumlah Pemimpin Dayak lainnya ia membentuk *Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS).*

Dalam pemilu 1983, PBDS meraih 5 kursi. Jumlah per-

olehan itu bertambah menjadi 15 kursi pada pemilu 1987. tetapi dalam pemilu 1991 lalu, PBDS yang adalah opoisi di tingkat Negara Bagian, tetapi anggota Barisan Nasional di tingkat Federal, hanya memperoleh 7 kursi dari 56 kursi *Dewan Undangan Negeri* (DUN) yang diperebutkan. Kekalahan itu, antara lain bersumber pada sikap mendua Presiden PBDS, Datuk Leo. Ia memang menduduki jabatan empuk dalam Kabinet Mahathir, Menteri Pekerjaan Umum.

Nyatalah, meskipun sejumlah putera Dayak Sarawak seperti Datuk Celestin Ujang dan Datuk Alfred Jabu memegang jabatan penting sebagai Menteri di tingkat Negara Bagian, ditambah Datuk Leo di tingkat Federal, dan Datuk Robert Jacob Ridu (Speaker DUN), namun peranan politik suku Dayak Sarawak tidak sedominan seperti pada periode 1963-1970.

Lebih maju

Masyarakat Dayak di Sarawak, seiring dengan kemajuan zaman sudah banyak yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka menekuni berbagai profesi baik dalam pemerintahan maupun swasta. Dibandingkan dengan saudara mereka di Kalimantan, kesan umum yang lansgsung dapat ditangkap adalah, Dayak Sarawak sudah jauh lebih maju. Sebagai contoh sederhana, kini terdapat sekitar 15-20 orang bertitel Ph.D., puluhan dokter medis, ratusan Master. Gelar bachelor sudah menjadi hal yang lazim.

Di samping mereka tinggal di daerah urban, sejumlah besar masyarakat Dayak tinggal dalam rumah panjang di daerah pedalaman. Mata pencarian utama adalah bercocok tanam, padi dan palawija, yang teknik pengolahan tanahnya sama dengan masyarakat peladang di Kalimantan (Indonesia). Untuk mendapatkan uang tunai mereka beternak ayam dan babi. Andalan lain adalah komoditi tanam keras seperti karet,

koko dan lada. Selain itu mereka juga memungut hasil hutan. Seperti halnya suku Dayak di Kalimantan, mereka juga dituding sebagai perusak hutan dan lingkungan hidup. Yang agak melegakan, terdapat puluhan publikasi mengenai sistem perladangan yang adalah hasil penelitian para pakar. Menurut publikasi tersebut, sistem perladangan meskipun berdampak pada masalah lingkungan, tetapi tidak sehebat dampak yang ditimbulkan oleh HPH.

Kelompok suku Dayak Penan di daerah Belaga dan Baram, pada umumnya masih sangat mengandalkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Bahan makanan pokok orang penan adalah sagu, seperti halnya sebagian masyarakat di Irian Jaya. Untuk memenuhi kebutuhan akan daging, mereka berburu binatang liar.

Melawan HPH

Beroperasinya sejumlah perusahaan HPH di pedalaman Sarawak, mengakibatkan tergusurnya sumber-sumber perekonomian rakyuat setempat, sementara penduduk lokal tidak memiliki pengealaman dan ketrampilan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan itu.

Kondisi ini, telah merangsang masyarakat setempat untuk melawan penebangan hutan oleh HPH-HPH itu. Gerakan itu, memuncak berupa blokade terhadap kegiatan HPH yang dilakukan secara serentak di dua belas tempat terpisah pada awal 1987.

Oleh para aktivis lingkungan hidup Malaysia yang dipelopori oleh Sahabat Alam Malaysia (SAM) gerakan itu dipandang sebagai pembelaan terhadap kelestarian hutan tropis. Sementara itu, para politisi oposisi di Kuching menggunakannya untuk mengecam pemerintah setempat yang memberikan lisensi kepada HPH, tetapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam usaha meredam gerakan itu, PM Mahathir Mohamad melakukan penangkapan dan penahanan. Sekurangnya 16 orang pemuka Suku Dayak ditahan tanpa proses pengadilan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (Internal Security Act-ISA). Malangnya, penahan itu malah mengundang kecaman keras masyarakat pers dan LSM Internasional. Sejak itu, masalah hutan tropis menjadi perhatian masyarakat dunia.

Akhirnya, perusahaan-perusahaan itu membayar sejumlah uang kompensasi kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Masyarakat di daerah Tatau dekat Bintulu, misalnya, menerima kompensasi sebesar M$ 380.000 atau sekitar 296 juta atas sejumlah kerusakan lingkungan mereka. Selain itu, HPH membayar M$ 0,5 untuk setiap meter kubik kayu balok yang diambil dari hutan-hutan di sekitar pemukiman masyarakat Dayak.

Satu kesimpulan yang sangat jelas dari rentetan peristiwa itu: Bahwa masyararkat Dayak di Sarawak sudah memilki posisi tawar menawar yang cukup kuat. Di samping itu, mereka juga sudah memiliki kesadaran tinggi untuk mempertahankan hak-hak traditional mereka. Sesuatu yang masih langka di kalangan masyarakat Dayak di Kalimatan.

***

Bagian Kedua

KONDISI LINGKUNGAN DAN HAK-HAK ADAT

09

DAMPAK SOSIAL BUDAYA HPH (KASUS SEMANDANG KANAN)

Stepanus Djuweng

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan sektor kehutanan telah memberikan kontribusi yang memadai untuk pembiayaan pembangunan di negara ini. Bersamaan dengan itu, terjadi pula kerusakan alam sekitar yang diakibatkan pembabatan hutan oleh perusahaan-perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH), pengembangan perkebunan dan pemukiman baru, proyek-proyek hutan tanaman industri (HTI), pertambangan dan usaha-usaha pembangunan lainnya, yang pada pokoknya dimulai dengan pembabatan hutan. Kondisi ini masih diperburuk pula oleh limbah industri yang mengolah produk-produk kehutanan, perkebunan dan pertambangan itu.

Tulisan ini adalah bercerita tentang dampak HPH terhadap kehidupan sosial budaya Suku Dayak Simpang, khususnya yang bermukim di desa Semandang Kanan, desa Mekaraya dan desa Gerai Mantok, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kaliman-

tan Barat. Data-data dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara dengan penduduk dan para pemuka masyarakat, ketua adat dan kepala desa serta karyawan perusahaan. Sebagai pelengkap, wawancara dilakukan pula terhadap tokoh masyarakat, aktivis LSM Lingkungan di Pontianak. Selain itu data-data sekunder juga diperoleh dari media massa dan literatur-literatur lainnya. Versi awal dari tulisan ini dimuat di Harian Suara Pembaruan Jakata, edisi 9 Juni 1992, dengan judul yang berbeda.

Kerusakan Alam Sekitar

Di Kalimantan Barat, seperti diakui Gubernur Kalimantan Barat *H.Pardjoko Suryokusumo*, terjadi pendangkalan pada sungai Kapuas sebagai akibat sedimentasi, karena, antara lain, kurangnya vegetasi hutan di daerah tangkapan air hujan. Sejumlah pejabat di daerah ini menuding, kerusakan lingkungan di Kalbar disebabkan oleh masyarakat peladang yang membabat hutan, di daerah perhuluan.

Pendapat ini, dibantah oleh *Soemarsono Suryoprojo*, presidium Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat. Menurut dia, masyarakat peladang sangat kecil kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan. Hal serupa, juga diungkapkan oleh Sandra Moniaga SH, Kordinator Pengembangan Hukum Lingkungan Sekretariat WALHI. "Pendangkalan air sungai, baik karena penyusutan volume air maupun karena pengendapan lumpur, bukan disebabkan oleh peladang berpindah, melainkan oleh beroperasinya perusahaan-perusahaan HPH, pertambangan, proyek perkebunan, pengembangan pemukiman dan bahkan proyek-proyek HTI, "ujar Sandra.

Soemarsono becerita bahwa berdasarkan pemantauan WALHI Kalbar, ribuan anak sungai tersum-bat o-

leh jalan-jalan HPH. Sebuah HPH yang arealnya sekitar 40.000 ha saja, katanya, memiliki jalan utama, jalan cabang, dan jalan-jalan menuju ke setiap blok. Total panjang jalan dalam areal seluas itu, tidak kurang dari seribu kilometer. Badan jalan utama biasanya, tidak kurang dari 15 meter, ditambah lagi dengan pengerukan tanah dikiri-kanannya. "Anda dapat membayangkan, di Kalbar terdapat lebih dari 6 juta hektare hutan produksi. Kalau 40.000 hektar saja jalannya seribu kilometer, maka kalikan saja dengan luas HPH yang ada. Nah, jalan-jalan tanah itu tererosi pada musim hujan. Lumpurnya mengalir ke sungai-sungai."

Apa yang dikatakan Soemarsono, memang terjadi di lapangan. Di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Hilir dan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalbar dari 10 sampai 20 Mei 1992 lalu, mendapat penjelasan serupa dari masyarakat sekitarnya. Di tiga Kecamatan terdapat enam HPH, masing-masing PT Dayak Besar, PT. Trika Sari PT. Erna Juliawati, PT. Melan, PT. Hutan Raya Utama dan PT. Inyutas. PT Hutan Raya Utama dan Inyutas saja, memiliki dua jalan utama yang panjang-nya tak kurang dari dua ratus kilometer. Disamping jalan-jalan utama itu, terdapat puluhan jalan cabang, ratusan anak-cabang dan ribuan jalan blok. Di sepanjang jalan itu, ratusan anak-anak sungai tersumbat. Karena kondisi air yang menggenang pada bagian hulu sungai-sungai yang tersumbat itu, pohon-pohon meranggas dan mati.

Sungai Tercemar

PT Hutan Raya Utama, telah beroperasi di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang sana sejak 1979, sedangkan PT Inyutas yang arealnya berbatasaan dengan PT Hutan Raya Utama beroperasi sejak 1989. Seorang informan yang me-

ngaku secara sukarela mengamati jalannya operasional perusahaan itu, sejak munculnya perusahaan tadi, tatanan air sungai Simpang yang merupakan urat nadi perekonomian untuk masyarakat menuju Telok Melano (kota Pantai terdekat), menjadi tidak stabil. Musim hujan, pasang mencapai ketinggian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sementara pada musim kering, volumenya turun hingga tidak dapat dilayari sampai desa Simpang Dua. Kejadian serupa juga dapat dilihat di Sungai Laur, yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Sei Laur dengan kota Ketapang.

Seorang guru SMP di lokasi memberi kesaksian, kehadiran HPH di daerah itu telah mengakibatkan sungai berubah warna karena lumpur yang tidak pernah mengendap. Sementara itu, masyarakat setempat menggunakan air sungai untuk mencuci, mandi, dan air minum. Sungai juga merupakan tempat untuk mencari ikan. Sungai, adalah kehidupan.

Pengendapan lumpur yang cukup parah juga dialami oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Kualan dalam wilayah Kecamatan Simpang Hulu. Di daerah itu beriperasi PT. Erna Juliawati. Menurut masyarakat di Desa Botong, batu-batu yang dulu terlihat di dasar sungai, kini telah ditutupi lumpur. "Tebal lumpur di dasar sungai ini sekitar 20-30 sentimeter," kata seorang kepala adat salah satu desa di aliran Sungai Kualan. Selain endapan lumpur yang mencemari air, akibat lain kehadiran HPH di perhuluan Sungai Kualan, juga labilnya volume air. Padahal, sungai itu adalah urat nadi perekonomian sekitar 10.000 jiwa masyarakat di daerah itu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari dipasok dari Pontianak melalui Sungai Kualan. Begitu pula hasil-hasil dari masyarakat setempat. Terhambatnya lalu lintas angkutan sungai, selain berakibat pada terhambatnya suplai barang-barang juga mengakibatkan kenaikan harga yang

terkadang mencapai ambang batas toleransi.

Di sisi lain, kehadiran perusahaan-perusahaan HPH itu merangsang masyarakat untuk ikut mengambil kayu, demi peningkatan kesejahteraan. Sejak 1980-an, masyarakat di sepanjang sungai Simpang, Kualan dan Laur, mengerjakan kayu balok lokal yang dijual kepada para penampung baik di Ketapang, Teluk Melano mau pun Pontianak. Dibandingkan dengan HPH, tentu omset mereka sangat kecil.

Seorang pekerja kayu log lokal menyebutkan, selama tiga bulan 4 orang pekerja hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 120 kubik, sementara perusahaan HPH dapat menghasilkan sampai 30.000 kubik dalam periode yang sama. Seperti halnya di daerah lain, mereka juga terkena penertiban. "Ini mematikan kami sebagai rakyat kecil. Jika masyarakat dilarang kerja kayu, perusahaan juga harus dilarang. Jika perusahaan diberi HPH, masyarakat juga mestinya diberi HPH, terutama sepanjang aliran sungai," katanya mengeluh.

Masyarakat setempat sangat sedikit yang bekerja di keenam perusahaan HPH itu. Kalau ada, bila mereka melakukan kesalahan yang kecil saja, langsung dikeluarkan. Maka, yang menikmati hasil rimba Kalimantan, adalah pekerja dari luar. "Kami di sini hanya mendapatkan debu kendaraan perusahaan yang lalu lalang saja, keuntungan milik orang lain," kata seorang informan yang lulusan STM di Pontianak.

Buka Keterisolasian

Namun demikian, kehadiran HPH memang tidak seluruhnya bersisi negatif. Seperti diakui masyarakat setempat, jika musim kering tiba, supir-supir perusahaan dapat diajak "kompromi" untuk mengangkut karet para pedagang dari desa menuju pelabuhan perusahaan yang

tidak terpengaruh oleh penyusutan volume air. Begitu pula sebaliknya, mereka bersedia mengakut barang dari pelabuhan ke desa-desa. Kontribusi lain, masyarakat yang ingin berpergian, dapat menumpang kendaraan perusahaan, meskipun tidak setiap saat. Sedangkan jalan-jalan itu, dapat pula dilalui oleh sepeda motor milik penduduk. Di sisi lain, kondisi ini tentu memiliki resiko tinggi. Selama ini sudah terjadi banyak kecelakaan yang merenggut banyak jiwa.

Selain itu, perusahaan juga membantu pembuatan jalan yang menghubungkan beberapa desa. Menurut *Pastor Johan,* misionaris Katolik asal Belanda yang pernah bertugas di Simpang Dua, untuk membuat jalan sepanjang enam km pada tahun 1987, ia membayar kepada perusahaan sebesar Rp 3.750.000.- Di desa Semandang Hulu, PT Inyutas memberikan bantuan berupa buku paket senilai Rp 100.000.- kepada SD di Kenanga. Selain itu, 9 orang siswa menerima bantuan berupa alat tulis dan pakaian seragam. Menurut keterangan Kepala SD Negeri Kenanga, kesembilan siswanya itu menerima bantuan selama setahun. Setelah itu, pihak perusahaan tidak pernah lagi membantu. "Bantuan itu, tidak jelas tujuannya, dan tidak ditindak-lanjuti. Hal itu terjadi begitu saja, dan hilang begita saja."

Bantuan itu masih terlalu kecil. Bila perusahaan HPH sungguh-sungguh berkeinginan membantu masyarakat, mereka dapat mendirikan SMA dan menanggung biaya operasionalnya sekaligus di tempat itu.

Hal serupa juga dikemukan Ketua Keluarga Besar Pelajar dan Mahaiswa Simpang di Pontianak. Dibandingkan dengan kerusakan alam sekitar dan pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang ditimbulkan perusahaan-perusahaan itu, bantuan tadi tidak ada artinya. Saya pun bisa membantu Rp 100.000 katanya, sambil menunjuk sejumlah anak daerah itu yang ditampungnya di sebuah pondok

pribadi di bilangan Kota Baru Pontianak. "Jika perusahaan sungguh melaksanakan ketentuan HPH Bina Desa, tolong buatkan penginapan bagi sekitar 100 orang pelajar dan mahasiswa asal Simpang Hulu dan Sungai Laur di Pontianak ini. Itu baru bantuan. HPH Bina Desa harus dijelaskan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat, lewat LSM, atau Organisasi Swadaya, harus diperkuat dalam posisi tawar-menawar dengan perusahaan. Kalau hanya diomongkan di Jakarta, tidak cukup bermanfaat bagi kami di sekitar HPH itu. Yang ada sekarang, bukan HPH Bina Desa, tetapi HPH perusak lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat."

"Kawin Kontrak"

Sisi lain dari kehadiran sejumlah HPH di tiga kecamatan itu sangat berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat di sekitarnya. Seperti dituturkan seorang informan sejak 1979, sekurangnya terdapat 13 janda mantan isteri para pekerja perusahaan. Sebagian meninggalkan anak, sebagian lainnya dikawini dua tiga bulan lantas ditinggalkan pergi. Menurut dia, sejumlah warga Malaysia yang bekerja di tempat itu sempat mengawini gadis-gadis setempat. Begitu kontrak kerja dengan perusahaan habis, maka usai pulalah usia perkawinan mereka. "Inilah yang kami sebut dengan istilah kawin kontrak. Mereka hanya numpang kawain pada saat bekerja di perusahaan. Kondisi ini menimbulkan dekadensi moral."

Seorang informan lain memberi mengatakan, di samping korban kawin kontrak tadi, disinyalir adanya prostitusi terselubung. "Cewek-cewek di sini berpola pikir sederhana. Mereka tergiur dengan rayuan dan uang," katanya memberikan deskripsi. Hal itu, diakui oleh sejumlah pekerja yang dijumpai di lokasi itu. Tentu

saja, mereka tidak menyangka sedang berbicara dengan wartawan. Sejumlah pemuda di lokasi itu mengatakan, mereka sempat menonton *video blue* yang diputar di rumah seorang penduduk di dusun Selantak. Mereka tidak tahu, siapa pemilik kaset itu.

Alkohol dan Perjudian

Penyakit lain yang ditularkan oleh para pekerja HPH kepada pemuda setempat, adalah budaya meneguk minuman keras. Seorang pemilik warung di Sungai Piang, desa Semandang kanan mengatakan, selama ia mampu menjual tidak kurang dari 20 peti bir hitam kepada orang-orang perusahaan. Mereka biasanya mentraktir para pemuda setempat sampai *teler* (mabuk). Tentu saja, para pemuda itu tidak punya uang untuk membeli bir hitam. Maka, arak putih dan anggur cap orang-tua pun jadi. Seusai minum, mereka mabuk, sampai sempat membongkar jembatan.

"Ini budaya baru. Pada masa sebelum kehadiran HPH, masyarakat pada umumnya hanya minum tuak. itu pun dilakukan pada saat pesta, bukan setiap saat. Kini, minuman keras menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama kaum muda." kata seorang pemuka masyrakat di dusun Bukang.

Ketika mengunjungi dusun Simpang Dua, sejumlah pemuda bergerombol menyabung ayam. "Perilaku ini baru muncul dalam dua tahun belakangan ini. Mereka bertaruh sampai Rp 150.000." kata seorang penyabung. Diakui ia pernah punya seekor ayam jago yang handal. Selama dua bulan, ayam itu menghasilkan lebih dari Rp 1.500.000. Ayam itu, katanya, akhirnya tewas di medan penyabungan.

Selain dengan menyabung ayam, judi juga dapat dilakukan lewat papan catur, atau kartu domino. Taru-

hannya, bervariasi dari segelas arak sampai jutaan rupiah. Di samping itu, pembelian SDSB mencatat rekor yang cukup spektakuler. Di desa Semandang kanan yang berpenduduk tidak lebih dari 3.000 jiwa, setiap kali periode penarikan terjual antara 100 sampai 150 buku, atau sekitar Rp 2.500.000 sampai Rp 3.750.000. Penjual kupon SDSB itu berasal dari Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir. Selain pembelian kupon resmi, penjualan nomor buntut juga menjadi salah satu cara untuk mengadu untung. Dari informasi yang dikumpulkan diperoleh keterangan, belum seorang pun yang kepercikan rezeki dari SDSB itu.

Kepala Adat desa Semandang Kanan menjelaskan sekitar peranan adat mengatakan, sebagian dari adat-istiadat memang masih diakui keberadaannya, terutama oleh masyararakat setempat. "Tetapi berhadapan dengan para pendatang, adat menjadi tidak berdaya. Denda adat, diukur dengan barang pecah belah, yang bila diuangkan, harganya sangat murah. Padahal, sanksi adat sesungguhnya sanksi moral. Bahwa sanksi itu dalam bentuk barang, tidak lebih dari sekedar simbol. Bagi anggota masyarakat adat, dikenakan denda adat berarti sebuah hukuman moral, bahwa yang bersangkutan melanggar norma-norma adat bagi para pendatang, adat tidak mengikat. Mereka menilainya sebagai sanksi ekonomis belaka."

Perlu Perhatian

Sampai kapan kondisi demikian berlangsung sulit diramalkan. Menurut Lukas Gembira, seorang penduduk Pontianak asal desa Mekaraya, kini terdapat lebih dari 30 orang sarjana yang berasal dari Kecamatan Simpang Hulu. Belum satu pun di antara mereka yang kembali ke sana. Gembira, yang adalah salah di antara me-

reka, mengharapkan perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten. Kalau saja Pemda campur tangan, HPH berpotensi untuk meningkat berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebut saja, katanya, dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan beasiswa atau membuat asrama dan menyediakan buku bacaan.

***

10

TERJEPIT HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG TEMPATI LAHAN RAKYAT

Stepanus Djuweng

Dusun Kembera, memang terletak di tengah rimba belantara. Di situ, bermukim sekitar 450 jiwa subsuku Dayak Simpang. Kampung ini, masuk dalam bilangan desa Mekaraya, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kembera, dapat dijangkau dalam 4 jam berjalan kaki dari dusun Banjur, pusat pemerintahan desa Mekaraya. Cara lain pergi ke sana, adalah dengan menumpang motor air dari Teluk Melano, kota pesisir terdekat, yang adalah ibukota Kecamatan Simpang Hilir selama 20 jam perjalanan.

Meskipun terisolir dan telah hidup di tengah belantara Kalimantan selama berabad-abad, bukan berarti masyarakat dusun Kembera manusia liar yang tidak beradab. Di situ, mereka menetap, berladang, berburu, bertanam kopi, karet, durian, tengkawang. Pada masa lalu, di situ mereka membangun rumah panjang, dan kini, Kembera, meskipun pelan, tetapi secara pasti mulai mengubah wajahnya menjadi perkampungan yang moderen.

Dari kampung sunyi di kaki gunung itu, muncul nama besar seperti *Pateh Juak*. Ia adalah Ketua Adat dan pahlawan perang Sebango. Pateh Juak, memimpin masyarakat Kembera dan masyarakat desa-desa sekitarnya melawan Belanda. Sayangnya, tidak terdapat catatan-catatan mengenai Perang Sebango itu. Dan tulisan ini mungkin merupakan catatan pertama yang menyinggung nama besar Pateh Juak.

Modernisasi di Kembera, dimulai oleh misionaris Katolik sejak tahun 1960. Di situ didirikan sekolah rakyat tiga tahun. Setelah naik kelas empat, mereka pindah ke SR Banjur Karab yang jaraknya sekitar 12 km. Sekitar lima belas tahun lalu terdapat Sekolah Dasar Negeri di Kembera. Sejumlah putera-puteri Kembera, kini melanjutkan ke SLA, dan bahkan Perguruan Tinggi di Pontianak.

Dibelah Dua

Sejak penghujung 1989, masyarakat dusun Banjur dan Kembera (desa Mekaraya) terusik oleh adanya perintisan yang dilakukan oleh petugas Kantor Departemen Kehutanan Kabupaten Ketapang. Menurut penuturan Kepala Desa Mekaraya *Adorya Nitti*, para petugas dari Departemen Kehutunan melakukan perintisan garis batas Hutan Lindung. "Mereka sudah merintis tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat Pemerintahan Desa, apalagi musyawarah dengan masyarakat."

Di kampung Banjur ini, sejumlah besar jamih (lahan pertanian kering) masyarakat termasuk dalam hutan lindung. Berhadapan dengan gencarnya usaha masyarakat menanam karet dan pohon buah-buahan, perlakuan yang demikian sulit untuk dapat diterima, apalagi mereka da-

tang ke tanah kita tanpa pemberitahuan, kata *Saing* (60 tahun), mantan kepala desa dan Tumenggong Adat.

Para pemuka adat dari dusun Kembera menjelaskan, pada mulanya garis pemisah hutan lindung itu membelah dua dusun kembera. Sebagian dari dusun kami termasuk dalam hutan lindung. Mungkin mereka menganggap kami binatang langka yang harus dilindungi. Dikatakannya, atas desakan dari penduduk, garis hutan lindung tadi digeser sekitar 2 km dari pusat kampung.

Seorang informan lain mengatakan, meskipun sudah digeser sejauh 2 km, namun sejumlah kebun karet rakyat setempat masih termasuk ke dalam areal hutan lindung. Ini memberatkan kami. Kebun karet, adalah sumber pendapatan masyarakat. "Yang tidak dapat kami terima, hutan lindung ini mestinya menempati areal rimba (hutan primer, Red), bukan *jamih* (tanah perladangan) atau bahkan kebun karet rakyat," katanya. Atas prakarsa penduduk setempat, kini batas hutan lindung itu mereka geser sekitar 5 km dari pusat kampung. "Hal ini kami lakukan bukan untuk menentang Pemerintah, atau tidak setuju dengan adanya hutan lindung. Sebaliknya, hutan lindung bagi kami merupakan sumber kehidupan. Di sana, binatang buruan dapat berkembang secara aman. Bila mereka keluar dari hutan lindung, kami dapat menangkap dan memburunya.Ini artinya, prakarsa kami menggeser tapal batas itu adalah untuk kepentingan bersama. Jika hutan lindung menempati areal garapan kami, bukan salah kami jika tanah garapan itu, pada suatu saat kami ladangi. Untuk itu, kami mohon pengertian Pemerintah. Kami telah bermukim di sini, sejak ratusan tahun lalu. Lihatlah pohon durian dan tengkawang kami."

Ditanami Karet

Menghadapi kenekatan petugas kehutanan yang

mencaplok lahan pertanian rakyat untuk dijadikan hutan lindung, masyakat dusun Banjur, juga berindak tak a-kalah nekadnya. Dalam dua tahun terakhir ini, lahan pertanian masyarakat yang diduduki hutan lindung, mereka ladangi dan ditanam dengan karet. "Rasanya aneh, jika hutan lindung menempati lahan pertanian masyarakat. Lahan pertanian itu bukan hutan. Hutan adalah rimba belantara," kata petani setempat yang alumni SMA Negeri I Pontianak.

Seorang guru SD Negeri di dusun itu mengungkapkan karena petugas tidak berkompromi dengan masyarakat, maka kami anggap mereka tidak serius. Jika mereka serius, tentu ada kesepakatan bersama. Karena petugas tidak menghormati kami, mengapa kami harus menghormati mereka? Kami penduduk asli di sini. Nenek moyang kami telah telah ada di sini ratusan tahun lalu. Sesunguhnya kami sangat menghormati Pemerintah. Tetapi aparat Pemerintah yang tidak menghormati rakyat, tentu juga sulit diterima.

Sejumlah tokoh masyarakat lainnya yang dijumpai menyatakan, mereka ikut bertanggungjawab atas tindakan mereka meladangi tanah pertanian mereka yang dicaplok menjadi hutan lindung itu. "Hutan lindung itu baru muncul dua tahun silam. Nenek moyang kami sudah membuka hutan di situ ratusan tahun lalu. Secara tradisonal, kami lebih berhak atas tanah pertanian kami. Masih banyak hutan belantara yang patut dijadikan hutan lindung. Masalahnya, di mana-mana sudah ditemukan bekas tebangan dan jalan *pete* (istilah untuk menyebut perusahaan HPH). Menurut saya, hulu-hulu sungai yang digarap *pete* itu yang harus dilindungi, agar air minum kami tidak keruh, ikan di sungai tidak lari," kata seorang pemuda di dusun Banjur.

Enggan Tandatangani

Drs. FX. Sungkalang, camat Simpang Hulu, ternyata enggan menandatangi berita acara hutan lindung di wilayah kecamatannya itu. Pak camat tampaknya keberatan menandatangani sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika dipanggil Bupati Ketapang, *Mas'oed Abdullah* ke Ketapang, di hadapan Bupati ia bersedia menandatangani dokumen itu, tetapi minta dibawa oleh petugas ke penginapannya. Sampai di penginapan, pak camat menolak menandatanganinya, kata seorang stafnya yang dijumpai di Balai Berkuak, ibukota kecamatan yang terletak sekitar 70 km dari dusun Kembara. Jarak itu dapat ditempuh dengan 24 jam berjalan kaki. Sungkalang sendiri, pada saat itu sedang dalam perjalanan dinas ke ibukota Kabupaten.

Tindakan camat Simpang Hulu itu, dibenarkan oleh seorang petugas kehutanan yang dijumpai di *based-camp* PT Inyutas yang terletak di desa Semandang Kanan. "Baru setelah adanya perubahan tapal batas yang disepakati masyarakat, Camat mengesahkan dokumen itu," katanya memberi keterangan.

Terdesak Hutan Produksi

Menurut petugas kehutanan tadi, adanya hutan lindung itu pada prinsipnya demi kepentingan rakyat. Sedang batas-batas yang dirintis sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. "Kita di lapangan memang berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri. Tentu saja dilakukan penyesuaian-penyesuaian," katanya memberi penjelasan.

Ditambahkannya, kasus Kembera, memang sempat menimbulkan sedikit masalah, yang pada pokoknya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hu-

tan lindung. Diakuinya, penyuluhan memang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketika ditanya mengapa hutan lindung justeru menempati lahan pertanian masyarakat yang sesungguhnya bukan hutan primer, ia menjawab, "Karena sudah terdesak hutan produksi. Kalau tidak mengambil sebagian dari tanah garapan rakyat, hutan lindung tidak ada lagi. Hutan di daerah ini, kecuali di puncak-puncak bukit, adalah hutan produksi."

Pendapat ini sejalan dengan ketidakcocokan data tataguna hutan di Kalbar. Menurut data Pemda, hutan produksi di Kalbar menempati areal seluas 5.8807.420 hektare, sedangkan hutan lindung dan hutan suaka alam dicadangkan seluas 4.387.005 hektare. Sementara itu data yang diperoleh dari Departemen Kehutanan menyebutkan, terdapat 70 perusahaan HPH yang beroperasi di propinsi Kalbar. Seluruhnya memiliki areal seluas 6.201.500 hektare. Dengan demikian terdapat perbedaan seluas 394.080 hektare antara hutan produksi menurut Pemda dan hutan produksi menurut daftar dari Departemen Kehutanan. Bila dikonfrontir dengan keadaan di lapangan, bahwa hutan lindung trelah terdesak hutan produksi, maka sinyalmen bahwa hutan produksi sudah menempati areal yang dicagangkan untuk hutan lindung adalah masuk akal. Apalagi keterangan semacam itu diberikan oleh petugas lapangan dari Departemen Kehutanan sendiri.

***

11

HAK ULAYAT HILANG, HILANG JUGA MASYARAKAT ADAT

Vincentius Julipin

Pemda Tingkat I Kalbar dalam rangka perolehan lahan yang diperlukan untuk proyek perkebunan inti rakyat (PIR) yang diformulasikan dalam proyek PIR Berbantuan dan PIR Khusus, pada prinsipnya tidak memberi ganti rugi karena pemilik tanah diprioritaskan untuk diikutsertakan.

Namun berdasarkan Permendagri Nomor 15/ 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, ditetapkan bahwa tanah-tanah yang dibebaskan akan mendapat ganti rugi jika tanah tersebut berupa tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan UU Nomor 5/1960 dan tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.

Dalam Permendagri tersebut diatur pula penetapan ganti rugi terutama atas tanaman-tanaman dan bangunan yang berada diatasnya. Khusus pembebasan tanah untuk swasta, Pemda setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi. Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada dasarnya harus dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan dengan pemberi ganti rugi dengan berpedomankan azas musyawarah. Namun kenyataannya Pemda Kalbar telah mempunyai prinsip sendiri untuk tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang digunakan bagi areal perkebunan.

Ini berarti ada perbedaan cara pandang antara hukum adat dan hukum formal yang berlaku. Setidaknya bagi masyarakat Dayak di pedalaman Kalbar yang masih mengandalkan keabsahan hukum adat sebagai landasan berpijak, yang ternyata paralel dengan hukum formal yang ada sekarang ini sesuai dengan isi UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Thadeus Yus SH MPA, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak mengemukakan, permasalahan timbul karena tanah itu bersifat tetap. Artinya, tidak bertambah luasnya, sedangkan di lain pihak jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Maka semakin luas tanah yang dipergunakan untuk tempat penampungannya. Selain itu, kegiatan pembangunan fisikpun semakin meningkat, yang juga memerlukan tanah sebagai tempat kegiatannya.

Untuk menyesuaikannya dengan hukum ekonomi tersebut maka mau tidak mau timbul antisipasi baru dalam kebudayaan Dayak untuk mengukur nilai ganti rugi terhadap barang atau benda atau tanaman yang dimilikinya.

Misalnya, hasil musyawarah adat (Musdat) Dayak kabupaten Sambas, Kalbar Juni 1986, diatur pokok-pokok ketentuan tentang nilai ganti rugi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di kawasan hukum adat.

Sepohon durian dan tengkawang yang belum menghasilkan misalnya diganti rugi Rp 2000,- sampai Rp20.000,- sedangkan yang sudah menghasilkan nilai ganti ruginya Rp 30.000,- Kelapa dan cengkeh, nilai ganti ruginya yang belum menghasilkan Rp 150,- sampai Rp1.500,- sedangkan yang telah menghasilkan diganti Rp 15.000,-. Karet, keranji, sagu, pisang, kemiri dan mangga yang belum menghasilkan nailai ganti ruginya Rp 50,- - Rp 500,- sedangkan yang telah menghasilkan diganti Rp 5.000,-. Penentapan ganti rugi ini dibuat berdasarkan tuntutan semakin luasnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan.

Bersifat Azasi

Prof. Moh. Koesnoe dalam makalahnya yang berjudul "Beberapa Masalah Hukum Adat yang Berhubungan dengan Pembebasan Hak Atas Tanah" yang disampaikan dalam seminar "Peranan Hukum Adat" di Universitas Tanjungpura, Pontianak Desember 1988 lalu, mengatakan, hak ulayat/watas bersifat azasi dan abadi dengan masyarakat hukumnya. Hilang hak ulayat, hilang masyarakat hukum itu.

Dengan demikian, menurutnya hak watas masyarakat hukum tidak dapat dicabut karena penghapusan hak itu dapat berarti menghapuskan eksistensi masyarakat hukum yang bersangkutan yang menjadi dasar negara kita. Bagi warga masyarakat, hukum yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hak hidup diatas tanah warisan nenek moyangnya sendiri. "Jadi pembebasan tanah watas dalam teori adalah tidak mungkin dan itu akan berlawanan dengan undang-undang."

Ungkapan senada disampaikan Silvester Thomas Daliman, SH, dosen Fakultas Hukum Untan Pontianak, bahwa kalaupun upaya pembebasan tanah itu terpaksa dilakukan, harus tetap berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Jadi tidak dapat diwakili aparat pemerintah desa atau ketua-ketua adat.

Teori pendekatan *key person* (orang kunci) yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan merangkul ketua-ketua adat adalah salah kaprah, sehingga dalam pelaksanaanya justru berbenturan dengan anggota masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dan yang tak pernah dibayangkan oleh orang luar adalah rusaknya harga diri ketua adat itu sendiri terhadap masyarakat yang diayominya, sehingga berbuntut pupusnya rasa memiliki terhadap hukum adatnya sendiri yang dirongrong dari luar dan dalam.

Kalau kondisi ini terjadi, berarti apa yang dikuatirkan oleh Prof. AP Parlindungan sewaktu seminar "Peranan Hukum Adat" di Untan (Pontianak) tahun 1988, tentang hapusnya eksistensi

masyarakat hukum adat itu sendiri, bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan.

Fungsi dan kedudukan ketua adat dalam lingkungan masyarakat Dayak adalah mengayomi masyarakat hukum adatnya berikut tanah serta alam yang dimanfaatkan bagi sepenuhnya kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, berfungsi melepaskan tanah-tanah adat yang berupa hak watas itu dan menyerahkannya kepada orang lain, sebagaimana yang dibayangkan para pengelola perkebunan. Kasus pelepasan tanah adat yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua Adat dengan pihak pengelola perkebunan pernah terjadi di Kabupaten Ponti-anak, Kab. Ketapang, dan Kab. Sintang.

Di Kecamatan Tumbang Titi (Ketapang-Kalbar) misalnya, pihak perusahaan Benua Indah Group bersama dengan Pemda setempat merekayasa upacara pelepasan tanah adat secara adat bersama ketua adat setempat tanpa sepengetahuan anggota masyarakat hukum adat disana, sehingga timbul reaksi di dalam tubuh masyarakat hukum adat itu sendiri.

Musyawarah

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Parlindungan manyarankan agar rakyat hendaknnya diajak bermusyawarah untuk melepaskan tanah adatnya jika mereka dapat diyakini tentang nilai-nilai pembangunan untuk mereka. Dan yang penting adanya kejujuran dari pejabat untuk benar-benar ingin meningkatkan kehidupan rakyat.

Penyediaan lahan untuk pemukiman harus sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan kepentingan pertanian kita. Jika akan mempergunakan penitia pembebasan tanah maka harus diusahakan agar rakyat tidak menjadi lebih miskin dan terlantar seperti jaman penjajahan dulu.

Sedangkan bagi pemerintah sendiri disarankan agar dalam pembebasan tanah untuk kepentingan swasta, pemerintah tidak boleh berpihak kepada investor, tapi harus melindungi rakyat

dari penekanan dan ancaman, sekalipun rakyat ini "terbelakang" dan dapat dikibuli. Ketegasan pemerintah dalam pembebasan tanah dengan tetap memperhatikan rakyat yang lemah harus selalu merupakan sikap dari setiap aparat pemerintah sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tinggi.

Sebagai pegangan pengetahuan bagi Ketua Adat dan masyarakt hukum adat S. Jacobus E.Frans L. BA, SH dalam bukunya "Hak Watas dalam pandangan Masyarakat Hukum Adat" (1988), mengemukakan untuk menentukan obyek watas setidaknya berpedoman pada 2 hal penting, yaitu watas utama dan watas turutan.

Watas utama terdiri dari tanah, air, tumbuhan dan binatang liar yang hidup bebas di dalam kawasan watas. Watas turutan bagi suatu kawasan watas yang telah lama dikuasai dan didiami maka selain watas utama yang menjadi hak bersama suatu kelompok masyarakat hukum adat, juga akan ada watas ikatan.

Misalnya tembawang, yaitu bekas tempat pemukiman atau perkampungan yang ditinggalkan suatu kelompok masyarakat persekutuan hukum adat tertentu yang diatasnya terdapat tanaman dan tumbuhan, baik menghasilkan buah atau lainnya, yang dimanfaatkan serta berniai ekonomis, atau kuburan umum sebagai yang dimaksud watas ikutan.

***

12

TRANSFORMASI BUDAYA DAN HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM

Wolas Krenak

Ada dua hal mendesak bagi suku Dayak agar mampu *survive* menghadapi era globalisasi saat ini. *Pertama*, masalah transformasi budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari bentuk baru dari pengaplikasian nilai-nilai luhur warisan nenek moyong, yang oleh perjalanan waktu dan perubahan zaman, ternyata tidak dapat lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak dewasa ini. Padahal, dalam praktik-praktik kebudayaan *(cultural practices)* seperti itulah nilai-nilai kehidupan manusia Dayak yang paling mendasar termanifestasikan.

Kedua, perjuangan untuk memperoleh pengakuan --dari pihak yang berwenang--terhadap hak-hak tradisional masyarakat suku Dayak. Berhadapan dengan kedatangan perekonomian modern yang padat modal dan dimiliki individu atau kelompok dari luar yang tidak memahmi niali-nilai budaya Masyarakat Dayak, maka

hak-hak adat masyarakat suku Dayak atas sumber daya alam semakin tergusur (Singarimbun, 1992).

Di pihak lain, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), agaknya dibuat berdasarkan pengalaman masyarakat petani dan pola pemilikan lahan masyarakat yang bermukim di Pulau Jawa. Pasal-pasal tertentu dari UUPA, tidak akomodatif terhadap pola penguasaan dan pengelolaan lahan masyarakat petani di Kalimantan. Dengan demikian, jika berhadapan dengan pihak investor yang berpegang pada UUPA, masyarakat Dayak, akhirnya harus menyerahkan tanah-tanah mereka. Sementara itu, para Ketua Adat, yang mestinya melindungi hak-hak masyarakat, malah diperalat oleh para investor untuk menandatangani surat penyerahan tanah (Rokaert, 1983). Padahal, Ketua Adat Suku Dayak sama sekali tidak memiliki otoritas yang demikian itu. Maka, Ketua Adat yang bertindak demikian ibarat pagar makan tanaman. Disayangkan, Ketua Dewan Adat tingkat Kabupaten, misalnya, belum memiliki sikap yang jelas terhadap kasus-kasus penyerahan tanah oleh para Kepala Adat di tingkat desa.

Demikian rangkuman diskusi pada seminar sehari bertema "Proses Transformasi Budaya Dayak Untuk Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap II" yang diselenggarakan dalam rangka Pesta Adat *Naik Dango* Kabupaten Pontianak, di desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, 26 April 1992. Seminar yang dihadiri sekitar 100 orang peserta itu menampilkan dua pembicara, masing-masing *Albert Rufinus,MA* dan *Drs Paulus Florus* Keduanya adalah peneliti pada *Institute of Dayakology Research and Development* (IDRD) Pontianak. Seminar selain dihadiri oleh para Ketua Adat sekabupaten Pontianak, juga diikuti oleh sejumlah intelektual dan pemuka Masyarakat Dayak yang berdomisili di Kotamadya Pontianak.

Masyarakat suku Dayak, berbeda dari sejumlah persepsi yang masih mewarnai titik pandang orang luar terhadap mereka, ternyata memiliki nilai-nilai luhur yang menuntun mereka untuk bertahan di tengah perubahan zaman. Seperti diungkapkan oleh sejumlah tetua Adat suku Dayak Kanayatn, nilai-nilai luhur yang terekspresi dan termanifestasi dalam praktik kehidupan orang Dayak, pada fitrahnya berasal dari *Nek Jubata* (Sang Pencipta), yang diterjemahkan ke dalam bahasa manusia lewat mitos, legenda, dongeng, atau bentuk-bentuk tradisi lisan lainnya. Tradisi lisan yang sarat makna itu kemudian menjadi semacam pedoman tata kehidupan manusia. Ia mengatur hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan sesama dan manusia dengan kelompok masyarakat.

Hubungan yang trasendental antara manusia dengan *Nek Jubata,* diungkapkan dalam sejumlah acara ritual. Satu di antaranya, adalah upacara "Naik Dango", yang merupakan puncak dari seluruh upacara gembira dalam siklus waktu setahun. "Naik Dango" adalah ungkapan rasa syukur atas panenan padi pada tahun itu, dan mohon berkat untuk keselamatan pekerjaan dan kelimpahan panen pada tahun berikutnya. "Naik Dango" adalah puncak ekspresi ritual yang berkenaan dengan proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan penggunaan padi. Dari sisi ini, tercermin sebuah penghormatan masyarakat Dayak terhadap padi dan tanah tempat dimana padi itu tumbuh. Bagi masyarakat Dayak umumnya, adalah padi, hak atas tanah, pohon tekawang merupakan sumber dan cermin dari nasib sebuah sisi kehidupan. Maka apabila padi di ladang tidak tumbuh dengan sempurna, sering terdengar ungkapan, "tahun ini kita akan mendapat kesulitan". Begitu pula bila tengkawang tidak berbunga.

Budaya Balalek

Proses pemilihan lahan, tebang-tebas, pembakaran, penanaman (penugalan), pemiliharaan dan pemanenan padi selain rangkaian aktivitas ekonomi, juga merupakan ekspresi sosial dan budaya bagi Masyarakat Dayak. Bahwa kegiatan itu bersifat ekonomis sangat jelas: sebuah ladang, diharapkan menghasilkan panen baik berupa padi maupun tanaman sampingan lainnya. Hasil ini selain dikonsumsi sendiri juga dijual ke pasar.

Sebagai ekspresi dan peristiwa sosial budaya, praktik-praktik itu merupakan aktulisasi dari kehidupan sosial budaya yang tidak dapat dihitung secara ekonomis, seperti kebersamaan, komunikasi, forum ekspresi dan aktualisasi diri, yang pada pokoknya mempererat dan memperbaharui hubungan antara individu-individu, lalu pada gilirannya memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kelompok.

Hubungan sosial horizontal semacam itu, pada kehidupan suku Dayak Kanayatn dihayati senyatanya pada saat *balalek (*gotong-royong dalam mengerjakan pekerjaan di ladang). Pada saat itu, muda-mudi saling bertukar pantun, yang adalah ungkapan perasaan. Pada saat itu, para tetua suku menceritakan pengalaman dan sejarah nenek moyang masa lalu. Pada saat itu lagu-lagu gembira dinyanyikan. Maka di dalamnya terdapat kehangatan dan cinta kasih, saling menerima dan memberi. Di dalamnya termanifestasi semangat kebersamaan dan solidaritas untuk saling meringankan beban sesama.

Dari peristiwa sosial budaya semacam itu tumbuh rasa kebersamaan, rasa aman, rasa saling menghargai dan saling membutuhkan dalam pergaulan seperti itu. Maka, balalek, selain merupakan pemenuhan kebutuhan ekonomi, ia juga pemenuhan kebutuhan sosial emosional horisontal antar individu dan kelompok.

Selain itu, rentetan siklus dalam berladang dapat juga disebut peristiwa religius, karena upacara-upacara ritual yang diselenggarakan sehubungan dengan siklus perladangan menandai hubungan timbal-balik yang vertikal antara manusia dengan sang Penciptanya.

Kesemuanya itu, berasal dari solidaritas masyarakat rumah panjang (*Betang - Bahasa Dayak*), salah satu pusat transformasi kebudayaan Dayak yang telah musnah. Meskipun rumah panjang sudah langka, tetapi semangat solidaritas dan bentuk-bentuk pengamalannya tadi masih tercermin dalam kehidupan masyarakat Dayak, terutama di daerah pedesaan. Pertanyaan yang mesti dijawab, seperti diungkapkan Paulus Florus, apakah masyarakat Dayak yang berdomisli di daerah perkotaan masih mempraktikkan hal itu? Munculnya berbagai proyek seperti perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI), berarti pula memutuskan rantai ekspresi budaya itu, sebab, masyarakat Dayak yang bergabung dengan proyek-proyek itu tidak lagi melaksanakan upacara pencarian lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan padi. Mereka juga tidak lagi menyelenggarakan *balalek*. Di pihal lain, mereka adalah orang Dayak, tetapi tidak lagi melaksanakan praktek-praktek kebudayaan mereka. Maka, jika tidak mencari bentuk-bentuk baru untuk mewarisi semangat solidaritas, yang antara lain, termanifestasi dalam peristiwa *balelek* tadi, maka golongan ini akan tercerabut dari budaya sendiri.

Menurut *Dr.PM Kedit* (1988), gejala ini dialami pula oleh masyarakat Dayak di Sarawak dan masyarakat Kadazan di Sabah. Anak-anak orang Dayak yang lahir di kota, menyebut diri Dayak, tetapi tidak menuturkan bahasa Dayak. Mereka, mengalami apa yang disebut para sosiolog sebagai *anomie*. Dalam konteks ini, bagi generasi muda, *Naik Dango* adalah salah satu cara untuk mengalami peristiwa budaya. Dari pengalaman itu

mereka diharapkan mampu merasakan cipratan semangat solidaritas dan kesetiakawanan, sambil melakukan refleksi dan mencari alternatif untuk menemukan bentuk-bentuk baru dari pengamalan semangat solidaritas tadi.

Mencintai Hutan

Albert Rufinus mencatat, *Naik Dango* semestinya digunakan secara maksimal sebagai forum untuk menganalisa permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat Dayak, khususnya Dayak Kanayatn. Menanggapi ajakan itu, para Tumenggung Adat, menilai, betapa para petani Dayak dituduh sebagai peladang yang merusak hutan. "Kami peladang tidak merusak hutan. Kami mencintai hutan. Ladang itu ada aturannya. Ada adatnya," kata seorang Tumenggong dari Kecamatan Sengah Temila, menanggapi peserta lainnya.

Kenyataan lain, adanya harapan agar Dewan Adat suku Kanayatn lebih terlibat dalam permasalahan keseharian masyarakat Dayak. Selama ini, menurut sejumlah kalangan, pengurus Dewan Adat hanya memerankan lakon sebagai figur saja. "Dewan Adat, harus berani bersuara terhadap persoalan yang menyangkut tanah adat-tanah adat. Yang terjadi sekarang, Ketua Adat menyerahkan tanah masyarakat kepada pihak investor. Ini bertentangan dengan kaidah hukum adat. Oleh karena itu Ketua Dewan Adat harus mampu mengoreksi hal semacam ini.

Bahaudin Kay, Ketua Dewan Adat Dayak Kanayatn tingkat Kabupaten menegaskan bahwa apa yang dihimbau oleh generasi muda Dayak itu memang patut untuk dipikirkan lebih lanjut. "Masalah tanah adat, katanya, perlu perhatian dari pihak penguasa. Sebab bila tanah a-

dat habis terjual dan tergusur perusahaan swasta, ladang padi hilang, akhirnya ada upacara *Naik Dango* ikut punah. Tanah-tanah mesti diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Jangan orang lain menjadi makmur di atas tanah rakyat, tetapi pemiliknya secara adat menderita di atas tanah sendiri".

Ia lantas memberikan contoh, tanah-tanah yang dijadikan lahan Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR), masyarakat sudah menyerahkan tanah mereka seluas sekuranganya 7,5 hektar. Tetapi untuk mendapatkan kembali 2,5 hektar saja, mereka harus membayar jutaan rupiah. Selain itu, tenaga kerja biasanya didatangkan dari tempat lain. Para petani peserta PIR di Ngabang, Kabupaten Pontianak harus membayar sekitar US $ 4,900 untuk dua hektar kelapa sawit, 0,25 hektar lahan perumahan dan 0,25 hektar lahan tanaman pangan. Kredit itu, dicicil dalam tempo 20 tahun.

Pemegang Saham

Sejumlah pengamat masalah pertanahan di Kalbar yang dijumpai menyatakan, formulasi penyerahan 7,5 hektar kepada investor dan pemilik tanah mendapatkan kebun dan tanah 2,5 hektar setelah membayar kredit 4. 900 dollar adalah suatu yang perlu dikoreksi. Hal ini, tidak sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Dayak, dan juga tidak mengikuti Permendagri tentang tata cara pembebasan tanah. Formula yang paling adil, kata Thomas Daliman, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, adalah himbauan Presiden Soeharto, bahwa pemilik tanah adat diikutsertakan sebagai Pemegang Saham pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan tanah-tanah mereka. Selain itu, mereka juga bekerja pada proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak dirugikan dan

perusahaan masih tetap untung.

Formula lain, adalah seperti yang diungkapkan *T. Arsen Rickson, SH*, Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan DPRD I Kalimantan Barat. Menurut dia, sebaiknya investor menyewa tanah-tanah masyarakat untuk masa 20 tahun. Dan, masyarakat yang disewa tanahnya, ikut pula bekerja pada perusahaan penyewa. Tempo 20 tahun, diharapkan masyarakat mengerti nilai-nilai baru yang dibawa oleh proyek-proyek perkebunan. Dengan demikian, tata nilai sosial budaya dalam masyarakat tidak serta-merta diubah dengan adanya proyek-proyek baru. Jika demikian, bukan hanya proyeknya yang terancam tidak sukses, tetapi secara politis hal itu kurang menguntungkan pemerintah. Dan masyarakat tidak mampu menyerap nilai-nilai baru yang dibawa proyek-proyek itu.

Pengalaman para pengelola investasi perkebunan di Sabah dan Sarawak yang telah mempraktekkan pola itu. Ternyata, tenaga kerja Indonesia berbondong-bondong berimigrasi untuk menjadi buruh perkebunan. Hitung-hitung, gaji mereka lebih besar dari penghasilan petani pemilik kebun kelapa sawit di sini. Padahal, komoditasnya dalah kelapa sawit yang sama. Ongkos produksi dan investasi di Sabah dan Sarawak, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Dan, meskipun menggaji buruh lebih tinggi, perusahaan perkebunan di sana masih mengantongi keuntungan yang wajar. Ironis, bila tanah habis tergusur, petani tak berladang padi dan upacara *Naik Dango* pun menjadi sirna pula.

***

13

TANAH DARI SEGI ADAT, RELIGIO MAGIS, DAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT

Vincentius Julipin

Wilayah Kalimantan Barat seluas 146.807 km2 km2 yang terdiri dari 63,7 persen kawasan hutan dan 37,3 persen non kawasan hutan. Kawasan non hutan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti permukiman dan jalan, lahan pertanian dalam arti luas, serta penggunaan lainnya.

Potensi sumber daya manusia berdasarkan sensus tahun 1990, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 3,2 juta jiwa, dan lebih dari 75 persen penduduk menggantungkan usahanya pada sektor pertanian. Maka pemecahan masalah perekonomian di Kalimantan Barat erat keterkaitannya dengan pembangunan masyarakat pedesaan. Dan hal itu menyangkut antara lain, masalah tanah adat. Potensi lahan yang tersedia cukup luas, baik untuk pertanian tanaman pangan lahan kering (1,5 juta Ha), lahan basah (sawah) pada daerah cekungan dan lahan untuk perkebunan (2,3 juta Ha), lahan penggembalaan ternak (2,7 juta Ha), lahan untuk pertambakan (13 juta Ha). Namun hampir seluruhnya merupakan jenis tanah podsolik merah kuning yang sangat rendah tingkat kesuburannya dengan PH yang masam. Struktur dan tekstur tanah kurang baik sehingga sangat mudah tererosi dengan topografi yang bergelombang hingga berbukit-bukit.

Sebagai daerah yang mempunyai areal yang luas, masalah yang mencuat ke permukaan adalah tidak seimbangnya luas lahan dengan jumlah petani. Hal ini merupakan kendala sulitnya melaksanakan program intensifikasi tanaman. Sistem intensifikasi pada tanaman memerlukan perhatian dan disiplin yang tinggi. Jika lahan terlalu luas, sementara tenaga kerja jumlahnya terbatas, maka sudah tentu perhatian terhadap tanaman akan semakin kurang. Kebutuhan modal untuk penyediaan sarana produksi juga tinggi.

Transmigrasi

Tidak dapat disangkal lagi, penopang terbesar kehidupan kota justru dari hasil produksi di daerah pedesaan. Tetapi dilemanya adalah tingkat konsumsi yang terbatas akibat penduduk yang kecil, maka tingkat produksi yang tidak bisa terlalu besar menjadi kurang ekonomis.

Sedangkan potensi lahan pertanian dan perkebunan belum tergarap secara menyeluruh. Maka alternatifnya ialah melalui pendekatan kependudukan. Di sini pemerataan penyebaran penduduk lewat program transmigrasi perlu dipacu. Tetapi disini timbul masalah peralihan pemilikan tanah.

Namun *Parjoko S.*, Gubernur Kalbar, dalam Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Rakyat Kalimantan di Pontianak, 4 Agustus 1991 lalu mengakui, program transmigrasi yang ada belum dapat memecahkan masalah tersebut di daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan masih ditemuinya usaha tani transmigran dari daerah asalnya yang tidak sesuai dengan usaha tani yang dihadapinya di daerah baru. Disamping itu program transmigrasi selama ini masih lebih berat berorientasi pada aspek kuantitas dalam arti orientasi pada pemenuhan/ target transmigran, dan kurang orientasinya pada aspek kualitas dalam arti peningkatan kesejahteraan transmigran secara berkelanjutan.

Pembukaan diskusi tentang pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah dan pembangunan dalam kaitannya dengan Hukum Adat, 10 September 1988, dikatakannya bahwa akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah untuk keperluan usaha di sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan oleh pihak swasta dalam rangka upaya pemerintah menggalakkan peningkatan komoditi ekspor non migas.

Permasalahan yang diangkatnya, ternyata para investor mengalami kesulitan dalam masalah tanah terutama pada tahap pembebasan tanah milik rakyat atau tanah dengan hak adat. Sementara itu, persoalan tanah adat dalam kenyataannya sangat penting bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat hukum adat.

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah sumber kemakmuran rakyat, sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam GBHN Tap MPR No. II/MPR/1988 ditetapkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatnnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Lebih jelas lagi dalam konsideran Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dikemukakan, dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagian hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sehingga harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 4 adalah tercapainya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuh-nya; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan.

Konsep keseimbangan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembukaan areal perkebunan secara besar-besaran tampaknya luput dari pemantauan para pemerhati lingkungan hidup. Bukan hanya dari sudut eksistensi hukum adat yang mengaturnya, tetapi juga dari keseimbangan ekosistem lingkungan hidupnya dari hutan heterogen ke "hutan" homogen.

Hak Watas

Menurut *YC. Thambun Anyang SH*, dosen Hukum Adat pada Universitas Tanjungpura, Pontianak, tanah adat hanya terdapat pada masyarakat hukum adat. Dengan kata lain masyarakat hukum adat itu merupakan pemegang tanah adat. Jadi yang termasuk tanah-tanah adat meliputi tanah hak milik perorangan (warga masyarakat hukum adat) dan tanah hak ulayat yaitu tanah milik masyarakat hukum adat.

Penekanan tanah milik pereorangan dari warga masyarakat hukum adat adalah tanah yang dikuasai secara pribadi oleh seorang warga masyarakat adat dan diakui oleh sesama warga masyarakat setempat bahwa tanah itu adalah miliknya. Sedangkan tanah hak ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Istilah "ulayat" berasal dari Sumatera Barat, untuk di Kalimantan Barat *menurut S. Jacobus E. Frans L. BA. SH*, hak yang serupa untuk itu para ahli hukum adat menggunakan istilah panyampeto atau pewatasan dan khususnya untuk Kalimantan Barat lebih banyak dipakai istilah "watas".

Jacobus menguraikan hubungan masyarakat hukum adat sebagai warga persekutuan dengan tanah, air dan alam di sekitarnya yang didiaminya adalah sangat erat sekali, karena hu-

bungan itu bersumber pada pandangan yang bersifat Religio Magis. Yaitu suatu pandangan yang menganggap alam ini selain dihuni oleh warga masyarakat persekutuan hukum adat yang masih hidup, juga dihuni oleh roh-roh arwah nenek moyang, orang tua, kaum kerabat dan handai taulan yang telah meninggal dunia, juga roh-roh lain yang tidak dikenal, tetapi sewaktu-waktu akan "muncul" dan mengadakan hubungan dengan warga masyarakat persekutuan hukum adat yang masih hidup.

Oleh karena itu, Thambun Anyang tegas mengatakan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat tidak mengenal adanya tanah terlantar oleh karena hubungan masyarakat dan warganya dengan tanah, bukan hanya atas dasar pemikinan perekonomian semata, akan tetapi berdasarkan hubungan kemasyarakatan dan hubungan yang bersifat religio magis itu tadi.

"Kita sering sangat terikat memahami hukum adat dari penjelasan orang asing yang berada di luar hukum adat. apa yang dikemukakan adalah berdasarkan pada kenyataan empiris dan bukun berdasarkan penghayatan dan pengetahuan kejiwaan masyarakat hukum adat itu sendiri," ujar *Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe SH* sewaktu seminar peranan hukum adar 12-14 Desember 1988 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Koesnoe menambahkan, dari itu pula sering kita menjadi salah faham tentang arti hukum adat pada waktu ini, dikarenakan keadaan tersebut. Salah faham ini sering menimbulkan sikap tidak menghargai hukum kita sendiri yang nasional dan menganggap hukum adat rendah mutunya dan sudah ketinggalan zaman.

Menyedihkan

Berdasarkan hasil studi pustaka, ditemukakan kasus-kasus yang sangat menusuk perasaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat, sebab kedudukan tanah adat atau hak watas/ ulayat di daerah ini kurang mendapat pengakuan semestinya dan semakin tidak menentu lagi.

Berarti harapan Gubernur Kalbar terhadap sulitnya para investor berhadapan dengan status kepemilikan tanah di Kalbar bertentangan dengan kenyataan. Pihak investor ingin mendapatkan kemudahan, kalau perlu tanpa mengeluarkan uang sepeserpun untuk ganti rugi. Namun masyarakat merasa diremehkan begitu saja akibat praktik semena-mena dari para investor terhadap hukum adat yang berlaku.

Skripsi Baharuddin N, yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat dan Bekas Hak Milik Adat yang Terdapat Dalam Areal HPH,"* suatu studi kasus di areal HPH PT. Delapan Delapan, di Kabupaten Sintang tahun 1988 ini, menyimpulkan penggantian kerugian yang dibayar pemegang HPH tidak memadai terhadap keuntungan dari penebangan tanaman atau pohon milik masyarakat hukum adat dan perorangan, serta kurang adanya perhatian dan rasa hormat pemegang adat masyarakat setempat.

Ungkapan senada juga sempat dikaji oleh *Martinus Ekok* dalam penelitiannya tahun 1986 di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Sambas. Yang menarik dari penelitian ini adalah pihak panitia pelaksana pembebasan tanah hanya memberikan ganti rugi kepada sebagian kecil warga masyarakat adat yang tanahnya dijadikan lokasi transmigrasi (21,88 persen), sedangkan sisanya sebagian besar (78,12 persen) sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah yang mereka miliki.

Alasannya empiris sekali dan agak semena-mena, tidak mempunyai bukti-bukti tertulis (sertifikat) yang menyatakan itu milik mereka, sehingga menurut panitia pelaksana pembebasan tanah, warga masyarakat hukum adat yang berjumlah 78,12 persen itu dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk minta ganti rugi atau diberikan ganti rugi.

Selain itu dalam kesimpulannya dikemukakan pihak panitia pembebasan tanah tidak selayaknya memberi ganti rugi kepada 21,88 persen warga masyarakat, sekalipun tanah adat yang mereka relakan untuk kepentingan transmigrasi itu adalah

sumber hidup dan mata pencaharian utama mereka guna mempertahankan kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Kisi-kisi situasinya berubah, warga transmigran perlahan tetapi pasti menatap cerah hari esoknya, sedangkan masyarakat hukum adat menjadi buruh di kebun warga transmigran. Kasus ini terjadi di Desa Takong, Kabupaten Pontianak. Semula pada tahun 1975 warga Angkatan Darat yang ikut program transmigrasi ini hidupnya melarat. Sedangkan Dayak selaku penduduk asli setempat kehidupan ekonominya statis tetapi berkecukupan.

Sepuluh tahun kemudian, situasinya terbalik, orang Dayak yang melarat dan warga transmigran yang menikmati kesejahteraan yang tinggi. Bahkan kebun karetnya yang dulu dijual, kini ditorehnya kembali sembari bagi hasil dengan warga transmigran yang membeli kebun karetnya itu.

Untuk mempertahankan eksistensi hukum agar hak watas tetap ada, Jacobus mengemuakkan: "Awasi setiap orang yang akan keluar atau masuk kawasan watas;beri dan tetapkan batas-batas dari masing-masing kewasan watas, baik berupa sungai, danau, gunung, lembah, batu, pohon atau kayu keras;warisi sejarah perolehan dan terjadinya kawasan watas kepada keturunannya."

Upaya ini diharapkan dapat menghindari tindakan-tindakan lebih jauh lagi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan intimidasi empiris terhadap status kepemilikan tanah pada masyarakat hukum adat.

Diperlukan kepala dingin, rasa keadilan serta kesatuan dan persatuan yang tinggi untuk memecahkan masalah di atas dengan tuntas dan didukung dengan sistem yang jelas, agar pembangunan berperikemanusiaan dan membawa kemakmuran bersama. Prinsip-prinsip ini merupakan nilai-nilai luhur untuk membangun generasi yang akan datang secara lebih sejahtera bagi semua pihak.

***

14

SIMPUKNG MUNAN DAYAK BENUAQ SUATU KEARIFAN TRADISIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Oleh Roedy Haryo Widjono AMZ

Gong

Adalah suatu keniscaya, bilamana suku Dayak di Kalimantan menganggap hutan merupaan milik mereka yang paling berharga. Antara mereka dengan hutan telah terintegral secara menyejarah. Maka tak pelak, segala kepercayaan, budaya dan prilaku mereka senantiasa bersentuhan dengan aspek kelestarian belantara.**(Tempo, 9 Januari 1988)**

Bahkan boleh dibilang, kerabat kita di Borneo ini secara naluriah senantiasa berikhtiar mempertahankan ekosistem, yang oleh para pakar lingkungan hidup modern "dikotbahkan" untuk mempertahankan keseimbangan jagad. Sedangkan mereka (Orang Dayak) berpikir sederhana saja, "kita musti menjaga kelestarian belantara, karena daripadanya kita turun temurun hidup sejak generasi masa lalu, kini dan masa depan.**(Djuweng, 1992)**

Dari persentuhan yang mendalam antara orang Dayak dengan hutan, pada gilirannya melahirkan apa yang disebut sistem

perladangan, yakni bentuk model kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya hutan **(Dove, 1988).** Bahkan sistem perladangan itu telah men-jadi salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak **(Ukur, 1991).** Oleh karena itu, dikalangan orang Dayak muncul gurauan refleksif," ***orang Dayak yang tidak berladang, boleh diragukan kedayakannya",*** karena mereka telah tercerabut dari salah satu akar kebudayaan leluhur.

Namun adalah suatu realita yang ironis, di mana ada banyak pihak yang tetap saja bersikukuh bahwa, sistem perladangan orang Dayak berkecenderungan merusak hutan dan tidak produktif, padahal benyak penelitian yang membuktikan bahwa sistem perladangan pada orang Dayak memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian alam **(Singarimbun, 1991).** Perdebatan tentang hal itu, hingga hari ini terasa belum berakhir.

Setara dengan persoalan diatas, terungkaplah makna strategis dari Lokakarya Perencanaan Promosi Sistem Hutan Kerakyatan di Kalimantan Timur yang digagas oleh Yayasan Plasma.

Untuk itu saya menulis "barang" ini, yakni tentang **simpukng munan** yang merupakan salah satu dari model kearifan tradisional suku Dayak Benuaq dalam mengelola sumber daya hutan. Tulisan ini saya sari dari keterlibatan saya dengan masyarakat Dayak Benuaq melalui pelbagai dialog, juga dari beberapaliteratur. Dan yang tak dapat dikesamping-kan adalah, tutur ajaran dari almarhum ayah mertua tercinta yang telah banyak meneladani saya tentang makna hutan bagi kehidupan suku Dayak.

Sejenak entang Dayak Benuaq

Suku Dayak Benuaq merupakan salah satu "kepingan" dari Dayak Luangan **(Weinstock, 1983).** Sedangkan Dayak Luangan itu sendiri merupakan "kepingan" Stammenras Ot Danum **(Barito Language Family)** yang termasuk dalam kelompok

Barito di Kalimantan Tengah. Untuk itu secara sederhana dapat dikatakan, suku Dayak Benuaq (di Kalimantan Timur) merupaan "kepingan"suku Dayak Luangan yang termasuk stammenras Ot Danum, berasal dari pedalaman sungai Barito di Kalimantan Tengah.

"Kepingan" suku Dayak Luangan tidak hanya Dayak Benuaq, seluruhnya berjumlah 14 (empat belas). Lima 'Keping" tersebar di pedalaman Kalimantan Timur, yakni **Benuaq, Tonyooy, Pahu** dan **Pasir**.

Delapan "keping" lainnya bermukim di pedalaman Kalimantan Tengah, yakni **Purei, Taboyan, Bawo, Paku Kerau, Malang, Bayan, Dusun Tengah** dan **Dusun Ilir.** Sedangkan satu "keping" lagi berada di Kalimantan Selatan, yakni **Dusun Dayeh** atau sebutan lain orang Bukit.

Unik lagi, suku Dayak Benuag itu sendiri masih terbagi lagi menjadi 8 (delapan) "keping", yang kesemuanya berada di pedalaman Mahakam, yakni **Benuaq Ohong** bermukim disekitar Kecamatan Jempang, **Benuaq Bongan** di Kecamatan Bongan, **Benuaq Kenohan** di kecamatan Kenohan. Sedangkan yang bermukim disekitar Kecamatan Barong Tongak, Damai, Muara Lawa dan Muara Pahu adalah, **Benuaq Idan, Benuaq Dayaq, Benuaq Pahu, Benuaq Tengah** dan **Benuaq Lawa (Boyce, 1986** dan **Bonoh, 1985).**

Sebagaimana suku Dayak Lainnya, orang Benuaq juga memiliki persentuhan yang mendalam terhadap mitos, yakni suatu kejadian yang dipandang suci, atau peristiwa yang dialami langsung oleh para leluhur, meski waktu terjadinya peristiwa itu tak dapat dipastikan secara historis. Namun (Jangan kita lupa), sejarah kejadian itu bagi orang Dayak (Benuaq) berfungsi sebagai norma kehidupan **(Coomans, 1987).** Pemikiran semacam itu, pada gilirannya melahirkan suatu persepsi mereka tentang kearifan pengelolaan sumber daya hutan.

Alam fikiran mistis suku Dayak Benuag menerangkan, selain manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi, terdapat pula

"sosok" lain yang tinggal dialam semesta ini. Mereka menyebut tempat itu sebagai **"Negeri Diatas Langit", "Negeri Dibawah Tanah",** dan **"Negeri Arwah".** Dewa penghuni Negeri di Atas Langit digambarkan sebagai burung Enggang, lambang keperkasaan, sedangkan dewa penghuni Negeri di Bawah Tanah, digambarkan sebagai Naga, lambang kesuburan **(Kertodipoero, 1963).**

Menurut orang Benuaq, alam semesta ini memliki tata tertib, demikian juga hubungan manusia dengan penghuni di negeri lain, juga memilki aturan yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan antara "negeri-negeri" tersebut. Sedangkan hukum alam yang berlaku di dunia, merupakan penjelmaan tata tertib alam semesta. Demikian juga etika sosial dan tradisi masyarakat yang turun temurun, merupakan penjelmaan tata tertib yang baku dari alam semesta ini. **(Widjono, 1989)**

Alam semesta ini oleh orang Benuaq diyakini penuh dengan kekuatan gaib. Bila tata tertib alam semesta terpelihara, kekuatan-kekuatan gaib itu dalam keadaan harmoni. Namun bila tata tertib alam semesta terganggu oleh prilaku manusia, maka kekuatan-kekuatan gaib itu mengalami kegoncangan. Sehingga menjaga agar tetap terpeliharanya tata tertib alam semesta,merupakan hukum kewajiban bagi orang Dayak **(Scharer, 1963)**

Dari pandangan mitologis ini saja, sebenarnya telah membuktikan ketidakbenaran tuduhan bahwa, orang Dayak melalui sistem perladangannya merusak kelestarian alam. Justru sebaliknya, terdapat suatu kebenaran, bahwa sistem perladangan orang Dayak terkandung kearifan tradisional pengelolaan sumber daya hutan.

Persepsi Integral Tentang Benuaq

Kehidupan komunal orang Benuaq, seperti halnya semua orang suku Dayak di Kalimantan (kecuali suku Punan sang

pengelana), secara turun temurun berpusat di **lou layatn**. Pusat kehidupan ini, secara bendawi berwujud rumah panjang. Cara hidup komunal ini terbukti memperkokoh tradisi kebersamaan di antara mereka. Sebab cikal bakal terbangunnya sebuah rumah panjang , berpangkal dari satu keluarga,kemudian beranak pinak dari generasi ke generasi seirig sejarah kehidupan mereka.

Di sekitar lou layatn, lazimnya terdapat rumah-rumah tunggal yang disebut jayukng. Selain itu ada pula suatu bagian yang disebut **pokatn**, yakni rumah besar yang didirikan oleh beberapa kelompok keluarga. Di sekitar lou senantiasa terdapat pula kuburan leluhur **(lubakng)** yang "sosok"-nya lazim ditandai dengan adanya **tempelaq.** Keseluruhan dari lou, jayukng, pokatn dan kuburan biasanya disebut **kampukng**,seperti misalnya kampung Benung (di Kecamatan Damai) dalam gelar setempat disebut **Kayutn Jongas (Pamung, 1990).**

Sosok manusia Dayak Benuaq sebagai penghuni kampung, dalam pandangan mereka tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterikatan erat dalam alam sekitar. Artinya alam sekitar pada hakekatnya merupakan faktor ekologi di dalam sistem pendukung kehidupan orang Dayak, termasuk mahluk lain yang bukan manusia.

Dari pemahaman semacam itu, lahirnya kearifan tradisional orang Benuaq, yang terwujud pada pengetahuan mereka tentang pembagian kawasan hutan. Pengetahuan tradisional semacam itu, juga dikenal pada suku-suku Dayak lain di Kalimantan Timur, hanya penyebutannya saja yang berbeda, karena seturut bahasa mereka sendiri-sendiri.

Menurut orang Benuaq, kawasan hutan terbagi dalam 6 (enam) kategori sesuai dengan fungsinya **(Ngayoh, 1991 dan Widjono 1992),** yakni :

Talutn Luatn,
hutan bebas yang tidak termasuk wilayah persekutuan.

Simpukng Brahatn,
hutan persediaan untuk berburu dan memungut hasil hutan bukan kayu.

Simpukng Ramuuq,
hutan persediaan yang diperuntukan bagi pembuatan bangunan rumah dan kampung.

Simpukng Umaq Tautn,
hutan persediaan yang difungsikan untuk perladangan

Kebotn Dukuh,
hutan yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan.

Simpukng Munan,
hutan bekas ladang atau sekitar kampung yang ditanami pohon buah atau tanaman keras (lazim disebut **lembo**)

Secara keseluruhan, mulai dari kampukng, simpukng brahatn, simpukng ramuuq, simpukng umaq tautn, kebotn dukuh dan simpukng munan (tidak termasuk talutn luatn) oleh orang Dayak Benuaq disebut **"Benua",** yakni suatu wilayah persekutuan hukum dari suku Dayak Benuaq. Olehnya itu, sebagai masyarakat hukum adat, suku Dayak Benuaq memiliki hak atas benua secara sah dan berdaulat **(Wignjodipoero, 1984).**

Khusus untuk talutn luant, meski tidak termasuk kawasan benua, namun berdasarkan hukum adat, pemilik benua terdekat berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga. Bahkan bila terdapat sesuatu yang dapat dimanfaatkan, biasanya masyarakat dari

benua-benua lain tidak berkeberatan bila masyarakat benua terdekat mengambil manfaat untuk yang pertama kalinya, tentu saja berdasarkan suatu musyawarah.

Merujuk pada pengertian hakiki tentang benua, menurut orang Dayak Benuaq bila berbicara tentang hutan, tidaklah mungkin dimengerti secara terpotong, misalnya hanya simpukng umaq taotn saja, atau kampukng saja. Itulah sebabnya, mereka bersikukuh bahwa hutan adalah totalitas hidup bagi orang Dayak.

Bahkan menurut orang Benuaq, hutan merupakan bagian dari sejarah kehidupan turun temurun. Hal itu disandarkan pada persepsi integral mereka tentang benua, yang daripadanya lahir pengetahuan tradisional tentang suatu konsep pengelolaan sumber daya hutan secara lestari. Pandangan semacam itu, pada hakekatnya berlaku juga dikalangan suku Dayak pada umumnya dan masyarakat tradisional lain, yang menegaskan bahwa mereka memiliki kearifan ekologi dan nilai budaya yang luhur **(Zakaria, 1994).**

Dalam konteks pengelo-laan sumber daya hutan berwawasan kearifan tradisional, orang Benuaq memiliki cara-cara tertentu dalam memperlakukan kawasan hutan. Seperti misalnya perlakuan mereka terhadap simpukng umaq tautn, yang terwujud pada sistem perladangan gilir balik., dengan metoda 6 (enam) M, yakni menebas, menebang, membakar, menugal, merumput, menuai. Metodik kerja tradisional itulah yang serta merta digunakan oleh pihak luar untuk menuduh mereka sebagai sosok yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan. Ironis memang!

Sedangkan (salah satu) wujud momental dari kearifan tradisional dalam hal menata, memelihara dan melestarikan sumber daya hutan, di kalangan suku Dayak Benuaq dikenal dengan sebutan simpukng munan. Konsep dasar tentang simpukng munan, juga dikenal di kalangan suku Dayak lain, orang Bahau di pedalaman Mahakam menyebutnya **lepuun**, orang

Tonyooy menyebut **lembo**, acap kali orang Benuaq juga menyeut lembo.

Simpukng Munan Bukti Kearifan Tradisional

Tentang simpukng munan ini, seorang rekan wartawan dalam suatu artikelnya "membaptisnya" sebagai sebentuk monumen "perikehutanan" masyarakat Dayak **(Rahman, 1992).** Menurut saya, pendapat kawan ini tak berlebihan.

Di kalangan orang Dayak Benuaq dikenal empat jenis simpukng munan atau lembo, yang sebutannya tersesuai dengan lokasinya, yakni :

lembo/simpukng umaq
berada dikawasan perladangan,

lembo/simpukng lou
berada disekitar permukiman rumah panjang,

lembo/simpukng belay
berada disekitar permukiman rumah tunggal

lembo/simpukng lalaq
berada disepanjang jalan kampung

Terdapat proses tahapan pekertjaan tertentu dalam pembuatan masing-masing jenis simpukng/lembo, menurut orang Benuaq.

Untuk **simpukng/lembo umaq** prosesnya bermula dari lahan hutan bekas ladang, yaitu simpukng umaq tautn. Seusai dipakai dua-tiga kali musim tugal, menurut orang Benuaq lahan tak lagi subur. Lalu mereka berpindah ke hutan yang berdampingan atau hutan lain yang diniscayakan secara hukum adat sebagai kawasan hutan persediaan untuk perladangan (simpukng umaq tautn)

Sebagian lahan bekas ladang itu lalu ditanami buah-buahan dan tanaman keras atau rotan untuk daerah yang rendah (perlu diingat, lahan perladangan suku Dayak tidak seperti hamparan lapangan basket, tapi naik turun bukit dan lembah). Sedangkan bagian lain, dibiarkannya tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud, suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Hutan berisi tanaman keras dan buah-buahan itulah kemudian disebut simpukng/ lembo umaq.

Sedangkan proses terjadinya **simpukng/lembo lou, belay dan lalaq,** kurang lebih sama. Di sela kesibukan mereka berladang, mereka menyempatkan diri untuk membersihkan tanah di sekitar rumah panjang, rumah tunggal dan sepanjang jalan kampung. Selanjutnya dikawasan termaksud, biasanya ditanami pohon buah aneka ragam, termasuk jenis tanaman endemik tentunya.

Seorang rekan peneliti menegaskan, tedapat lebih dari 31 spesies tanaman yang terdapat dalam slah satu jenis simpukng/lembo **(Sardjono, 1990).** Coba simak "barang-barang" itu, seperti berikut ini sebagaimana sebutannya dalam bahasa Dayak Benuaq.

Encapm konyot (mangifera decandra ding hou), **encapm lingau** (m. feodita lour), **engkelapm** (m. indica 1.2), **kuini** (m. odorata griff), **encapm payang** (m. panjang kostera) **encapm bulau** (m. torquenda kostera). Kesemuanya ini, termasuk famili anacardiaceae.

Laei (durio kutejensis bacc), **ketungan** (d. oxleyanus griff), **kalakng** (d. zibethinus murr), yang kesemuanya tergolong "keluarga" bombacaceae. **Oraai berorokng** (shorea macro-

phylla ashton), **oraai rewai** (shorea pinanga scheff), yang kesemuanya tergolong famili dipterocarpaceae.

Gerliik (aleurites moluccana willd), **pasi** (baccaurea macrocarpa muell arg), **keliwatn** (baccaurea racemusa muell arg), yang kesemuanya termasuk "keluarga" euphorbiaceae. **Lisat** (lansium domesticum corr), yang termasuk keluarga melliaceae. **Nakaatn** (artocarpus champeden spreng), yang termasuk keluarga moraceae.

Ihau (dimocarpus of lonan), **rekep** (nephelium cuspidatum bl), **bertiq** (n. lappaceum I.1), **engkarai** (N. lappaceum I.2), **kopeq** (n. lappaceum I.3), **semayap** (n. ramboutan ake leenh. 1), **siwo** (n. ramboutan ake leenh.2), **lenamuun** (n. uncinatum leenh), yang kesemuanya tergolong famili sapindaceae.

Sepotn (arca catechu), **saraap** (arenga pinanga merr), **we sokaq** (calamus caesius), **we ngono** (calamus manan miq), **nyui** (cocos nucifera), kesemuanya tergolong keluarga palmae. **Kopi** (coffea spp) termasuk famili rubiaceae, dan **terincikng** (ananas comosus merr) yang termasuk famili bromeliaceae.

Menyimak kesemuanya itu, bukankah tak berlebihan pula bila dikatakan bahwa, simpukng/lembo juga merupakan "perpustakaan" orang Dayak tentang tanaman buah dan lainnya. Apah hal seperti itu bukan merupakan sebentuk tradisional dalam pengelolaan sumber daya hutan?

Mengenai luas setiap jenis simpukng/lembo, tidaklah sama, hal mana biasanya dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja dan "kerajinan" dari keluarga tertentu dalam melakukan perladangan dan juga aspek historisnya.

Menyangkut aspek yang terakhir (historis kepemilikan), ada banyak lembo yang merupakan warisan turun-temurun, kemudian dipelihara oleh generasi berikutnya dan dikembangkan secara berkelanjutan, baik dari segi luas maupun jenis tanamannya. Sebagai contoh misalnya, beberapa lembo di kampung Tepulang yang dibuat oleh Baat Kakah Ingan sejak tahun 1880 atau lembo di Pintuq-Benung yang dibuat oleh Gamat Kakah

Abing di tahun 1820, hingga saat ini masih terus dipelihara oleh para keturunannya. **(Widjono, 1992).**

Sisi lain yang menarik dari aspek historis ini adalah adanya temuan di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, bahwa ada suatu lembo yang dinamai oleh penduduk setempat lembo bangkakng, ternyata telah berusia tiga generasi. Menurut mereka, **bangkakng pelegaq** adalah lembo generasi pertama, ge-nerasi kedua bernama **bangkakng manguur** dan generasi ketiga "bergelar" **bangkakng watu tih.**

Hal yang sama, sebenarnya juga berlaku di Dataran Tinggi Benuaq, yang menurut penuturan para tetua adat, diperkirakan terdapat ratusan lembo untuk wilayah Benuaq Idan saja. Sebenarnya ada satu hal yang "membanggakan" tentang simpukng/lembo ini, karena penguasa republik ini, via Mentri KLH pernah memberikan penghargaan untuk kategori penyelamat lingkungan, di tahun 1982, yang diterimakan kepada Doy Lambeng, seorang Kepala Adat di Barong Tongkok.

Ada manfaat dari simpukng/lembo bagi orang Dayak? Setidak-tidaknya terdapat empat manfaat utama, **pertama**, pemenuhan kebutuhkan pangan, **kedua**, sumber pendapatn keluarga, **ketiga**, penopang keberlangsungan tradisi/upacara adat dan **keempat**, pemanfaatan lahan untuk kelestarian alam.

Terdapat beberapa jenis buah tertentu yang dikonsumsi untuk kebutuhan pangan keluarga. Seperti "kelompok" encapm yang diolah menjadi aneka masakan sampai khas Dayak. bisa lupa mertua, kalau kita asyik menikmatinya. Pada sisi lain, disekitar lembo acapkali dipasang **belantiq** atau **jipah, oyat, empaleng** (jerat) untuk binatang-binatang tertentu, yang akhirnya tentu digunakan untuk kebutuhan pangan keluarga.

Simpukng/lembo memiliki nilai ekonomis, terutama berkaitan dengan pendapatan keluarga. Ketika musim buah tiba, suasana kampung senantiasa marak. Berebut durian jatuh (apalagi kalau malam hari), memiliki seni dan kenikmatan sendiri. Lebih dari

itu, ketika musim buah tiba, musim tengkulat buah juga tiba (biasanya orang dari luar kampung).

Beberapa jenis buah yang diniagakan oleh orang Benuaq dalam jumlah yang agak besar adalah laei, kalakng, ihau, lisat, nakaatn. Sedangkan yang dijual dalam jumlah kecil di pasar adalah, terincikng, engkelapm, kuini dan encapm. Untuk golongan non buah, we (rotan) adalah "primadona" pendapatan ekonomi keluarga, yang antara tahun 1975-1985 pernah mengalami zaman keemasan.

Ada banyak upacara adat Dayak Benuaq yang memerlukan **ruyaq** (ramuan) yang berasal dari tanaman yang ada di simpukng/lembo, seperti misalnya sepotn, nyui, terincikng dan lainnya, tanpa buah-buahan termasuk ruyaq adat untuk **belian sentiyu**, misalnya tidaklah lengkap dan roh leluhur bisa "marah".

Dari aspek pemanfatan lahan untuk kelestarian alam, simpukng/lembo telah banyak memberi manfaat. Orang Dayak, sejak mula telah mengenal konsep pemanfaatan pekarangan, sebagaimana termaktub dalam simpukng/lembo lou dan belay. Sedangkan pada simpukng/lembo, lalaq, terutama difungsikan untuk "membatas" wilayah kampung dan juga aspek keindahannya.

Tradisi leluhur mengajarkan agar orang Dayak (Benuaq) senantiasa memelihara keutuhan simpukng/lembo. Tindakan pengerusakan simpukng/lembo oleh ulah manusia, oleh orang Benuaq dianggap sebagai pelanggaran adat dengan pengenaan sanksi adat bagi pelakunya. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh alam, kekeringan karena kemarau, misalnya, juga terkategori sebagai pelanggaran adat. Untuk itu seluruh warga kampung musti melaksanakan upacara adat magis religius, seperti **belian ngugu tautn** atau **naliatn tautn** yang bermakna sebagai upacara bersih dikampung guna memulihkan keseimbangan kosmos.

Begitulah tentang simpukng munan yang merupakan salah satu bukti kearifan tradisional suku Dayak yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan berkenaan dengan model

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Pada hakekatnya, kearifan lingkungan itu merupakan hasil dari adaptasi, pengamatan dan pengalaman orang Dayak di dalam proses interaksi yang terus menerus dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Gong Penutup

Kearifan lingkungan pada suku Dayak (Benuaq), sebagaimana terungkap dalam simpukng munan, secara hakiki pada dasarnya banyak berpangkal dari sistem religi mereka. Hal mana pada orang Benuaq, tampak jelas pada persepsi integral mereka tentang benua. Hakekat yeng terkandung di dalam sistem religi itu adalah, menuntun dan meneladani masyarakat adat Dayak untuk senantiasa berperilaku serasi dengan dinamika alam semesta, sehingga terwujud keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kearifan tradisioanl melalui simpukng munan juga mematahkan mitos tentang peranan orang Dayak dalam merusak lingkungan. Menurut Michael Dove (1988) ada tiga mitos yang mendasari pikiran para ahli tentang para peladang Dayak **(Mubyarto, 1991)**

Pertama, para peladang memilki tanah secara komunal dan mengkonsumsikan hasilnya secara komunal pula dan tidak memiliki motivasi untuk menaikan produksi dan melestarikannya. Kedua, mitos yang selalu menganggap bahwa perladangan selalu merusak dan memboroskan nilai ekonomi hutan. Ketiga, mitos yang menganggap bahwa sistem ekonomi mereka bersifat subsisten dan terlepas dari ekonomi pasar. Ketiga mitos inilah yang saya maksud terpatahkan oleh konsep simpukng munan, sebagai salah satu model kearifan tradisional suku Dayak dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Selain itu, saya sendiri berpendapat ada satu hal yang lebih penting dari itu, yakni kian terancamnya eksistensi simpukng

munan. Masuknya sektor ekonomi modern yang diwakili perusahaan hutan, industri kayu dan pertambangan dan juga kebijaksanaan pembangunan tentang transmigrasi, perkebunan, perhubungan (trans Kalimantan), menimbulkan perbenturan nilai yang mencemaskan budaya pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat Dayak.

Dalam pada itu, menurut saya simpukng munan sebagai suatu model kearifan tradisional suku Dayak, sedang mengalami proses marginalisasi akibat mainstream kebijakan kehutanan di republik ini. Penggusuran simpukng/lembo untuk kepentingan pembangunan (jalan/transmigrasi/HTI) dan konsep PIR adalah merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi simpukng/lembo.

Saya sendiri tak berharap bahwa simpukng munan, pada gilirannya akan tinggal menjadi cerita sejarah kejayaan orang Dayak dalam mengelola sumber daya hutan.

***

Bagian Ketiga

PESTA RAKYAT: KEBUDAYAAN UNIVERSAL

15

PESTA RAKYAT: KEBUDAYAAN UNIVERSAL

Oleh Paulus Florus

Sejak kapan budaya pesta rakyat mulai dikenal oleh bangsa manusia? Pertanyaan ini tidak dapat kita jawab secara pasti. Dari sejarah evolusi manusia, cikal bakal pesta rakyat mungkin dapat dilacak ke Jaman Batu (Palaeolitikum dan Neolitikum) puluhan juta tahun yang lampau.

Ketika serombongan manusia purba, setelah berburu bersama-sama, sedang menikmati hasil buruan mereka atau sedang beristirahat, terjadilah komunikasi-komunikasi untuk "menceritakan" proses perburuan. Di antara mereka mungkin ada yang memperagakan gerak-gerik binatang buruan, ada yang memperagakan bagaimana mengejar, menangkap atau membunuhnya, sementara yang lain memberikan semangat dengan suara-suara tertentu. Cerita atau drama tentang perburuan seperti itu, mungkin setiap kali mesti dilakonkan kembali. Begitu juga drama peperangan, peramuan bahan makanan dari hutan, dan pada tahap evolusi selanjutnya tentu saja ada drama tentang pekerjaan menggarap tanah. Tanpa disadari, cerita yang dilakonkan demikian menjadi cara menghibur diri dan sekaligus pendidikan bagi generasi yang lebih muda.

Langkah penting dalam evolusi leluhur kita berikutnya adalah perkembangan bahasa ucapan dan kemampuan dalam organisasi

sosial. Dengan sistem atau cara berkomunikasi yang semakin baik ini, kejadian-kejadian yang telah lama berselangpun dapat mereka hadirkan kembali melalui suatu upacara peringatan tertentu. Upacara yang secara priodik dilakukan kembali, akhirnya menjadi suatu bentuk kebudayaan, yang kita kenal sebagai pesta rakyat. Maka hampir semua suku bangsa di bumi ini mempunyai bentuk-bentuk pesta rakyat tersendiri.

Makna Pesta Rakyat

Pada masyarakat tradisonal, pesta rakyat biasanya menandai suatu kejadian penting dalam siklus tahunan kehidupan mereka (daur pekerjaan). Masyarakat petani, misalnya, mungkin merasa perlu merayakan datangnya musim untuk mulai membuka lahan pertanian baru, musim menanam, awal dan selepas panen. Masyarakat nelayan merayakan kedatangan rombongan ikan tertentu yang bermigrasi ke wilayah mereka, yang tentu saja merupakan rejeki menggembirakan. Di daerah beriklim dingin ada juga kebiasaan masyarakatnya merayakan hadirnya musim semi atau musim panas yang telah lama dinantikan.

Selain berhubungan dengan siklus kehidupan dalam pekerjaan sehari-hari, pesta rakyat juga berhubungan dengan pengalaman supernatural para warga masyarakat yang bersangkutan. Pengalaman supernatural ini melahirkan dimensi magis-religius pada setiap pesta rakyat. Bangsa Yunani Kuno memiliki berbagai pesta rakyat untuk menghormati atau memuja para dewa mereka. Begitu pula bangsa Romawi, Mesir, Persia, Cina, India, dan banyak lagi bangsa lain, sejak ribuan tahun sebelum Masehi telah mempunyai berbagai bentuk pesta rakyat sesuai dengan bentuk penghayatan religiusnya masing-masing. Orang Indian di Amerika merayakan kemenangan sukunya dalam suatu peperangan dengan maksud untuk berterima kasih kepada arwah nenek moyang yang diyakini telah membantu mereka dalam memenangkan peperangan itu. Pesta lepas panen pada

berbagai subsuku Dayak di Kalimantan adalah juga suatu bentuk ucapan syukur kepada pencipta (Jubata, Penompa, Mahatalata, Tahalak) mereka.

Dimensi berikutnya adalah dimensi sosial yang ada pada setiap pesta rakyat. Ini merupakan perwujudan dari teguhnya ikatan komunitas pada masyarakat tradisional. Pesta rakyat menuntut keterlibatan nyata setiap warga komunitas. Walaupun tidak ada pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, namun setiap orang, karena kewajiban moral (adat) dan kewajiban religius akan menyukseskan pesta rakyatnya, dengan keyakinan bahwa pesta rakyat yang diselenggarakan sesuai tuntutan adat akan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh kaum. Keterlibatan itu bermacam-macam tingkatannya, mulai dari sekedar sebagai pekerja sampai pada keterlibatan yang bersifat sakral seperti diperanankan oleh seorang dukun atau tetua adat. Dimensi sosial ini nampak juga dalam sifat massal dan demokratisnya peyelengaraan pesta. Aneka mantera, nyanyian tarian dan tabuhan yang dipersembahkan selalu diperuntukkan bagi setiap warga komunitas. Dimensi sosial ini kemudian mencerminkan identitas budaya dari suku bangsa bersangkutan. Maka pada masyarakat yang sudah mengenal sistem pemerintahan kerajaan pun, ciri-ciri massal dan demokratis dalam pesta rakyat tetap dipertahankan.

Pesta Rakyat Dewasa Ini

Apakah pesta rakyat pada masyarakat modern dewasa ini masih memiliki dimensi-dimensi yang lengkap? Pada banyak suku bangsa memang masih dapat kita jumpai berbagai bentuk pesta rakyat. Kaitan pesta dengan siklus kehidupan sehari-hari (dimensi ekonomis), dimensi religius dan dimensi sosialnya mungkin juga masih dipertahankan, walaupun penekanan tujuannya dapat berbeda daripada tujuan aslinya. Pada masyarakat Jepang yang dikenal gigih mempertahankan tradisi, masih dapat kita jumpai beberapa bentuk pesta rakyat, seperti pesta panen,

pesta menyembut musim semi dan Perayaan hari Jadi Kaisar, yang relatif masih tampil dalam gaya aslinya.

Akhir-akhir ini ada semacam usaha pada berbagai suku bangsa untuk menghidupkan kembali bentuk-bentuk pesta rakyatnya. Tentu saja makna atau tujuan aslinya tidak begitu saja dapat dipertahankan. Karena sistem kepercayaan lama mungkin telah ditinggalkan, maka yang paling gampang tergusur adalah dimensi religius dari pesta rakyat, sementara dimensi ekonomis dan sosialnya dapat lebih mudah dihidupkan kembali. Keutuhan makna dalam menghidupkan kembali suatu pesta rakyat memang menjadi problem.

Perubahan makna atau tujuan dari pesta rakyat pada masyarakat modern, dapat terjadi misalnya karena pengaruh industri pariwisata yang semakin kuat. Banyak pesta rakyat dihidupkan dan dipergelarkan kembali terutama untuk memuaskan selera para turis mancanegara atau demi menumpukan devisa negara. Pesta rakyat di beberapa negara Amerika Latin, di Hawai, Swiss, Khasmir, Bali, Tanah Toraja dan juga di Kalimantan, banyak yang sudah tercemar pengaruh negatif turisme.

Juga pengaruh ekonomi domestik dapat mengubah makna suatu pesta rakyat. Pesta rakyat mungkin diselenggarakan hanya sebagai arena promosi atau dagang produk ekonomi . Pesta adat Sabung Ayam pada orang Dayak Muwalang di Kalimantan Barat, yang aslinya merupakan peragaan kegembiraan para arwah di alam baka (Sebayan), akhir-akhir ini telah berubah makna menjadi arena perjudian semata-mata.

Hal lain yang juga dapat kita saksikan adalah pergelaran pesta rakyat untuk tujuan-tujuan politis, demi kepentingan penguasa atau melegitimasi kekuasaan. Seorang penguasa (kepala pemerintahan, tokoh politik) dapat juga merekayasa suatu pesta rakyat sehingga menjelmakan dukungan untuk memperkokoh kekuasaannya, atau untuk menyenangkan rakyat sehingga melupakan kesalahan politis yang pernah dilakukannya. Seseorang raja mungkin dapat memitoskan dirinya sebagai keturunan dewa, sehingga hari lahirnya dipestakan oleh seluruh rakyat.

Seorang politikus dapat menjadikan pesta rakyat sebagai ajang kampanye politik atau untuk menunjukkan bahwa ia punya massa yang besar.

Apabila dimensi religiusnya hilang, ditambah pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang kuat, maka pesta rakyat mungkin sekedar kegembiraan yang meninabobokan kaum. Artinya, pesta rakyat itu tidak lagi menjadi sarana "pencerahan" untuk memajukan kehidupan komunitas.

***

16

PESTA BUDAYA DAYAK

Nico Andasputra

Seperti pesta-pesta budaya suku-bangsa manapun di dunia ini, Pesta Budaya Dayak seperti pesta Naik Dango, pesta Gawai Dayak, pesta Dange, pesta Kaamantan, pesta Erau dan pesta budaya Dayak lain nya, merupakan ungkapan rasa bahagia manusia atas apa yang mereka peroleh. Ungkapan rasa bahagia ini sifatnya lebih berdimensi religius. Artinya, suatu ungkapan kepercayaan manusia terhadap sesuatu hal yang mengatasi dirinya, yaitu Sang Pencipta. Namun apa makna pesta kebudayaan ini sesungguhnya? Suatu refleksi sementara mengatakan pesta budaya ini adalah upacara ritual manusia dalam kehidupannya. Namun sejauh mana ritus kehidupan ini bermanfaat bagi pengembangan masyarakat yang bersangkutan? Pada tema-tema refleksi demikianlah tulisan ini mau diarahkan.

Makna Kebudayaan

Kebudayaan mengandung nilai-nilai positif yang hidup di tengah suatu masyarakat. Nilai-nilai inilah yang ikut menentukan pandangan hidup *(lebensanschauung)* dan pandangan tentang dunia *(weltanschauung)*. Oleh karenanya nilai-nilai kebudayaan tersebut memberikan identitas dan jatidiri bagi pendukung-

nya, baik perorangan maupun masyarakat, dalam eksistensi dan essensinya.

Kebudayaan berfungsi pula sebagai kekuatan integratif, yaitu menyatukan seluruh pendukung kebudayaan tersebut lewat semangat solidaritas untuk kelangsungan hidup komunitasnya.

Karena begitu banyaknya subsuku Dayak, sukar bagi kita untuk menunjukkan kesamaan budaya antara mereka. Hanya yang dapat disebutkan adalah beberapa perwujudan kesamaan budaya Dayak, yaitu kebudayaan material (fisik) seperti rumah panjang, anyaman, ukiran, tembikar, alat-alat senjata: mandau dan sumpit; dan kebudayaan spritual seperti pesta gawai, sistem religi dan pandangan tentang asal-usul manusia. Pokok-pokok kesamaan kebudayaan Dayak ini memberikan jatidiri dan identitas bagi manusia Dayak. Dalam konteks pembangunan, belum jelas apakah kesamaan unsur-unsur budaya itu dapat diaktualisasikan secara pukul rata.

Cara pandang yang berbeda dapat melahirkan perpsepsi yang berbeda pula terhadap kebudayaan. "Peladang berpindah" (orang Dayak sendiri tidak memberikan mereka titel demikian) oleh para ekonom, politikus atau kalangan ilmuwan eksakta mungkin dianggap sebagai perusak hutan, tetapi bagi para antropolog, mereka adalah penjaga hutan. Dengan berladang demikian mereka mengungkapkan jati dirinya dalam hubungan dengan alam kehidupan dan Penciptanya. Mengingat kebudayaan merupakan hasil karya dan karsa yang telah lahir ribuan tahun yang lalu, maka pembangunan yang kontekstual kiranya yang perlu diterapkan, sehingga hasil pembangunan dapat menguatkan dan mengembangkan identitas dan jatidiri bagi eksistensi dan essensi masyarakat yang bersangkutan.

Kongkritisasi Makna Pesta Budaya

Pesta Budaya Dayak Kalimantan yang diadakan setiap tahun jelas bukan semata-mata seremonial, tetapi mengandung

arti yang dalam tentang hakekat manusia di dunia sebagai ciptaan yang patut bersyukur kepada Tuhan. Jadi, budaya ini merupakan ungkapan rasa syukur yang lebih bersifat eskatologis akan masa yang akan datang.

Dilihat dari siklus kehidupan masyarakat Dayak yang berpusat pada perladangan, maka berbagai pesta budaya Dayak merupakan ungkapan syukur masyarakat karena keberhasilan panen tahun berjalan dan harapan keberhasilan panen pada tahun mendatang. Kerena sistem perladangan berpindah merupakan produk budaya pertanian masyarakat Dayak di pedalaman, maka makna pesta panen sangat penting bagi identitas budaya Dayak, dan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam proses pembangunan masyarakat Dayak.

Paling tidak ada tiga alternatif yang bisa diusulkan agar pesta budaya ini tidak melulu seremonial belaka.(Bandingkan pula dengan dua alternatif yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Mubyarto,dkk. dalam "Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur", 1991, hal. 70-71, mengenai alternatif pembangunan masyarakat peladang misalnya).

Pertama, mengakui sistem pertanian berladang pindah (tanah kering) sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat peladang, dan memberikan hak akan sistem perladangan ini; bukan dengan menggantikan sistem perladangan dengan sistem pertanian menetap seperti sawah yang berasal dari kebudayaan lain.

Kedua, mengembangkan alternatif pertanian seperti yang telah dikembangkan oleh kaum peladang sendiri dengan sistem *agro forestry* yaitu menanami tanah bekas ladang dengan rotan, karet, durian dan tanaman lainnya secara modern. Dengan demikian para peladang mendapatkan hasil yang lebih dari tanah yang diolahnya, sehingga dari cara ini kita berusaha pula meningkatkan perekonomian rakyat itu sendiri.

Ketiga, mengembangkan semangat kaum peladang yaitu semangat gotong-royong yang dikenal pada hampir semua subsuku Dayak dalam mengerjakan ladang atau kebunnya. Dengan mengembangkan semangat ini maka makna kebudaya-

an yang intergratif tetap terpelihara dalam rangka pembangunan keluarga dan masyarakat. Semangat bergotong royong yang menyatukan ini dapat dituangkan lewat Usaha Bersama, Koperasi atau lewat Dana Solidaritas. Dengan cara ini maka program Koperasi, misalnya, dapat berjalan sesuai dengan apa yang digalakan Pemerintah selama ini.

Tiga alternatif di atas merupakan suatu pertimbangan untuk melestarikan budaya dan semangat masyarakat Dayak yang tercetus lewat pesta budayanya. Memang seyogyanyalah bahwa pesta budaya itu harus dapat mendorong tindakan-tindakan nyata untuk membangun jatidiri dan identitas dalam dunia yang semakin kompleks ini. Dengan demikian kebudayaan sebagai pernyataan eksistensi dan essensi manusia di dunia tidak terkesan kabur bagi masyarakat Dayak, yang kerap pula diupayakan sebagai masyarakat yang ada tetapi juga tidak ada.

Pertimbangan Lebih Lanjut

Kebudayaan Dayak yang mengalami goncangan kuat terus akan mengalami berbagai perubahan. Pada abad-abad mendatang diramalkan bahwa kebudayaan antar suku bangsa akan semakin kuat saling mempengaruhi. Ini berarti kebudayaan Dayak yang beraneka-ragam harus menunjukkan kekuatan integratifnya sebagai filter atas kebudayaan luar.

Dengan mengembangkan dan menggali makna kebudayaan daerah seperti pesta Naik Dango, Gawai Dayak, pesta Dange, dan pesta rakyat Kalimantan lainnya, masyarakat Dayak akan dibangun secara lebih lengkap. Ketahanan sosial budaya yang ampuh dalam menghadapi tantangan dunia modern semakin diperkuat. Dan tentunya, pembangunan yang kontekstual di segala sektor harus menjadi prioritas utama dewasa ini. Sebab pembangunan kontekstual yang sesuai dengan budaya setempat itulah yang membantu generasi mendatang untuk menumbuhkembangkan rasa memiliki, sehingga tidak terasing di negerinya sen-

diri. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ataukan hanya mempolitisirkan pesta kebudayaan tersebut seperti yang sering terngiang dari interprestasi kalangan muda?

***

17

DANGE: PESTA PADI ORANG KAYAN

THG. Mering Ngo

Dengan wajah berseri-seri, mereka saling berucap: "Selamat Dange, Selamat Dange!" Semua dilakukan di depan Balai Desa Padua yang sudah disulap menjadi sebuah rumah panjang, sementara bunyi gong, ganding, dan alat musik tradisional lainnya saling bersahutan.

Di depan bangunan tersebut berdiri tegak pondok pesta miniatur. Belasan wanita berpakaian adat berputar-putar menari dan menyanyi bersama melantunkan syair-syair suci sesuai ajaran Katolik yang mereka anut sekarang.

Nasi dibungkus daun pisang dijajarkan bersama mangkuk berisi lauk-pauk. Di situ diletakkan juga piring seng berisi tembakau dan kertas linting.

Usai makan, ceret-ceret berisi papa' , tuak khas dari beras pulut, diedarkan. Tiap tamu, terutama yang datang dari jauh, mendapat kehormatan mencicipi sepuas mungkin tuak yang terasa manis-manis asam itu.

Dange memang pesta termeriah orang Kayan Mendalam yang tinggal sekitar aliran Sungai Mendalam, anak Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dange, selain berarti pondok pesta, pada dasarnya suatu pernyataan terima kasih kepada Tuhan atas

berkat berupa panen yang melimpah, sekaligus merupakan tanda tutup tahun dalam daur pertanian mereka. Dengan upacara ini ada komunikasi dua arah antara mereka dengan Tuhan Sang Pencipta.

Sejalan dengan proses sejarah yang dilalui, *Da' Kayaan*, begitu mereka menyebut dirinya, memang telah berubah. Penyederhanaan pesta dange telah dilakukan di sana-sini, terutama dengan membuang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik yang mereka anut kini.

Dahulu, pesta dange bermula dari bilik raja. *Sang Raja*, dibantu oleh *dayung aya'* (pendeta besar) yang umumnya wanita, menentukan tata-cara pesta dange. Para wanita dari lapisan sosial rakyat biasa diperintahkan menumbuk padi dan pulut sebagai bahan penganan. Para pria mendirikan pondok pesta. Setelah pondok pesta berdiri, pesta dange pun diadakan selama sepuluh hari sepuluh malam.

Pada malam pertama, gadis-gadis kecil menjemput para pendeta dari bilik raja. Tabuhan canang mengiringinya. Usai makan malam, para pendeta menuju serambi bilik raja dengan berdoa dan bernyanyi sebagai tanda pesta dimulai.

Hari kedua, dibuat makanan pesembahan kepada para roh mulia dan roh leluhur yang telah meninggal. Makanan itu diletakan dalam bubu tanpa penutup. Pada hari ketiga dan keempat, dibuat makanan khas pesta dange, seperti *sarukung* dan *pitoh* (semacam ketupat segitiga dan lontong). Sore harinya para pendeta berdoa dan bercerita tentang penciptaan langit dan bumi berserta isinya dalam pondok pesta. Di hari kelima, semua pendeta berpantang diri untuk menghadapi hari keenam, hari yang merupakan inti ritual upacara.

Pada hari keenam ini, semua penghuni rumah panjang menyiapkan semacam pagar di depan serambi bilik raja. Di pagar tersebut ditaruh berbagai persembahan: makanana, benda-benda pusaka, dan kain-kain yang berhiaskan manik-manik. Banyaknya persembahan menunjukkan derajat raja . Kebiasaan pamer kebudayaan materi ini mirip dengan tradisi pada *orang Indian*

Kwakiutl di pantai barat laut Kanada. Bedanya, dalam kebudayaan Indian Kwakiutl aspek potlatch itu disertai tindakan merusak, yaitu membakar kain-kain yang bernilai tersebut.

Babi persembahan yang dipotong sedikitnya dua ekor. Lalu persembahan itu pada Sang Pencipta. Ini disebut *pejuu'-lasah*. Kemudian para pendeta menari mengintari pagar paling tidak 30 kali. Ini untuk menggambarkan kunjungan para pendeta ke desa-desa roh di dunia atas sana. Dunia atas diyakini sama halnya seperti kehidupan di bumi. Begitu khusuknya mereka melakukan, tak jarang para pendeta itu mengalami *trance*.

Pada hari ketujuh dan kedelapan, diadakan makan bersama di antara seluruh penghuni rumah panjang. Pada hari kesembilan diselenggarakan doa pemanggilan roh padi, agar ia datang dan bersemayam menunggu musim tanam yang akan datang. Keesokan harinya, pada hari kesepuluh para pendeta mengakhiri tugasnya dengan mandi di sungai.

Urut-urutan tersebut adalah gambaran pesta dange yang diselenggarakan pada masa lalu, ketika orang Kayan masih hidup dalam rumah panjang serta masih memegang teguh adat kepercayaan asli mereka yang disebut lalii'. Kini pesta dange, walau diadakan semeriah apapun, tak lebih dari satu hari satu malam saja.

Suatu hal yang benar-benar berbeda adalah tempat pelaksanaan pesta. Tetapi, apa mau dikata, rumah panjang sudah tiada.

Mereka, oleh *Malinckordt*, seorang etnograf pemerintah kolonial Belanda, dan *Edmund Leach*, seorang antrapolog Inggris digolongkan sebagai orang Kayan. Yaitu sub-kelompok terbesar dibandingkan dua suku lainnya; Kenyah dan Bahau, dari satu kelompok yang mereka sebut Apo Kayan. Jumlahnya sekarang sekitar 1.728 orang saja, dan dapat dikelompokkan lagi dalam tiga kelompok kekerabatan yang disebut *umaa'*, yaitu *umaa' Aging*, *Suling* dan *Pagung*. Hidup bersama dalam rumah panjang yang mereka sebut umaa' aruu' oleh beberapa penulis asing seperti: *Mazetian*, *Le Bar*, *Rousseau*, dan *Nieu-*

wenhuis, yang pernah diajukan sebagai "*Mahkota Arsitektur Primitif*".

Umaa' aruu' memang banyak membuat kagum orang. Bagi Nieuwenhuis, dalam karyanya berjudul *In Central Borneo* yang terdiri atas dua jilid dan terbit tahun 1900, tak cukup kata untuk pujian atas kekokohan dan keindahan ukiran rumah panjang orang Kayan. Ini tentunya tidak mengada ada. Nieuwenhuis pernah tinggal di bilik seorang raja (hipiu maran) bernama Igo Uring, sebelum dia bersama puluhan orang Kayan melintas dan menyelusuri Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ke Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, melakukan ekspedisi ilmiah meneruskan usaha Muller.

Dalam rumah panjang, segala kegiatan sosial, ekonomi, politik lokal dan adat masyarakat Kayan terpusat, berkembang dan menyatu dalam sikap dan tindakan. Di situ juga diteruskan segala tata cara tradisi sesuai petunjuk sejarah lisan nenek moyang mereka.

Rumah panjang merupakan pusat ritual dan seremoni orang Kayan, termasuk tempat pesta dange berlangsung. Tak heran bila kehilangan rumah panjang akan besar pengaruhnya pada segala tata-cara kehidupan sosial sehari-hari.

Hilangnya rumah panjang memang bukan satu-satunya alasan yang mengubah tradisi dange. Kecuali diterimanya ajaran agama baru yang sering kali tak sesuai dengan pokok-pokok ajaran lama, modifikasi berupa penyederhanaan pesta juga di dorong oleh pudarnya pengaruh kekuasaan tradisional yang semula berada di tangan raja ke tangan penguasa baru yang dipegang oleh kepala adat dan kepala desa. Bersamaan dengan itu pula, generasi muda telah berpikir dalam pola modern. Faktor ekonomi rumah tangga dan ekologi yang telah berubah pun berperan. Seperti makin kurangnya hasil panen padi karena pertambahan penduduk dan terbatasnya lahan garapan. Akibatnya, orang Kayan kini makin mengabaikan pesta dange.

Orang Kayan memang tak akan mati tanpa dange. Namun, bila kehendak tak dapat dielakkan, ketika dirasakan

adanya satu keperluan, maka merekapun repot membangun miniatur. "Yah, beginilah Pak, sebab kami tak diam di rumah panjang lagi," jelas seorang tua usia, datar dan seolah tak menanggung derita apa-apa. Setiap masyarakat memiliki konsep rasionalitas sendiri, baik secara ekonomi maupun sosial untuk menghadapi kenyataan. Namun alangkah arifnya bila penyerderhanaan pesta dange dilihat dalam kerangka berpikir "*kompleks sebab-akibat*" yang mampu menjelaskan secara kongkret kenyataan hidup yang mereka alami.

Kasus penyerderhanaan pesta dange agaknya dapat dijadikan ajang uji coba kerangka berpikir kompleks sebab akibat itu. Dengan demikian diharapkan diperoleh pengertian tentang proses-proses perubahan yang sedang dan akan terus dialami oleh orang Kayan, ataupun bagi kelompok-kelompok Dayak lainnya di Kalimantan.

***

18

NAIK DANGO: UPACARA SYUKURAN PADI

Wolas Krenak dan **Vincentius Julipin**

Naik Dango adalah kegiatan ritual di seputar kegiatan panenan yang diselenggarakan setahun sekali oleh masyarakat Dayak Kanayatn.Dango dalam bahasa Dayak Kanayatn berarti dangau atau pondok untuk berteduh yang biasanya dibuat di ladang atau sawah. Bentuknya sederhana dalam ukuran kecil. Dalam konteks ini Dango adalah lumbung tempat menyimpan padi padi yang biasanya dibangun di sekitar tempat tinggal. Dikatakan dango padi (rumah padi), karena menurut kepercayaan masyarakat Dayak kanayatn, padi memiliki semangat yang hidup (the living spirit), dan mereka tinggal di dango, seperti halnya manusia.

Menurut catatatan *Pembaruan,* publikasi pertama yang khusus mencatat kegiatan Naik Dango masyarakat Dayak Kanayatn dibuat oleh *Donatus Dunselman* tahun 1960. Misionaris Katolik yang sebagian hidupnya dihabiskan ditengah-tengah masyarakat Dayak Kanayatn ini mengambil judul tulisan *Bijdrage tot de Kennis van de taal en Adat der Kanayatn Dayaks van West Borneo.* Buku itu, ditulis dalam dua bahasa, bahasa Belanda dan Bahasa Dayak Kanayatn.

Padi yang tersimpan dalam dango tersebut tidak dapat diambil begitu saja tanpa melakukan upacara ritual dan pesta.

Jadi praktisnya sejak tersimpannya padi, setiap anggota keluarga amali' naik ka' dango. (pantang naik ke dango padi). Oleh karena itu persiapan padi yang diperlukan dalam tenggang waktu tersebut tidak dimasukkan dalam dango padi.

Kali pertama yang menaiki lumbung hanya terjadi pada saat upacara ritual akan dilakukan atau sebelum pesta dilaksanakan. Oleh karena itu pesta ini dinamakan Naik Dango. Berdasarkan pengertian tersebut pesta adat Naik Dango tidak dapat dipisahkan dengan kalender pertanian tradisi Dayak pada umumnya. Naik Dango merupakan pemusatan waktu bagi masyarakat petani untuk terefleksi kegiatannya yang sudah lalu dihubungkan dengan kebesaran *Nek Jubata* (Sang Pencipta).

Ucapan Syukur

Tujuan upacara Naik Dango sebagai kegiatan rutin masyarakat agraris Dayak Kanayatn adalah sebagai ucapan syukur kepada Nek Jubata (Sang Pencipta) atas hasil yang telah dalam bentuk padi dan jenis usaha pertanian lainnya. Nilai religius yang terkandung dalam upacara Naik Dango tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Dayak Kanayatn menempatkan Nek Jubata Nek Panampa' sebagai pusat dalam pengaturan makro kosmos. Jadi apa saja yang telah diperoleh atas karunia Jubata diserahkan kembali kepada-Nya untuk disimpan. Demikian pula untuk mengambilnya wajib pula untuk mentaati tatanan adat yang sudah dibakukan.

Sehari sebelum diselenggarakannya upacara Naik Dango, anggota keluarga terlebih dahulu melakukan persiapan yang disebut *batutuk*. Batutuk artinya menumbuk padi dengan lesung oleh kaum ibu dan remaja (putra-putri) hingga menyiapkan penganan adat agar keesokan harinya tinggal menyuguhkannya saja. Batutuk tersebut disertai dengan *upacara matik* yaitu menyampaikan maksud atau hajat kepada Jubata dan *Awa Pama* (arwah nenek moyang), agar memberikan restu.

Perangkat adat yang diperlukan sebagai kurban bakti upacara matik terdiri *alah, tumpi' sunguh* (sejenis cucur yang diberi garam); *tungkat/solekng poe'* (ketan yang dimasak dalam bambu); sirih masak (terdiri dari sirih dengan kapur, gambir dan pinang yang siap dikunyah, ditambah gulungan rokok daun nipah).

Upacara matik ini cukup penting bermakna *babatak ka' Jubata* (memberitahukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa) bahwa keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk Naik Dango. Kedua *babatak ka' Awa Pama* (memberitahu kepada arwah nenek moyang) yang ada dalam lingkungan rumah dan Awa Pama yang masih dalam perjalanan, (*ka' saka man ka' maraga*), bahwa upacara Naik Dango sudah siap untuk dilaksanakan.

Upacara Inti

Acara berikutnya, adalah *Nyangahatn*, yang merupakan inti kegiatan ritual dalam masyarakat Dayak Kanayatn. Nyangahatn, adalah pembacaan doa yang dilakukan oleh Imam Adat atau disebut Panyangahatn. Dalam Upacara Naik Dango, Nyangahatn dilakukan dalam lumbung padi si penyelenggara pesta yang dilakukan pagi hari. Doa-doa yang diucapkan dalam bentuk mantera-mantera itu berisi pemanggilan pulang semangat padi yang masih berlayar (diperjalanan) agar berkumpul di dalam lumbung padi sekaligus ucapan syukur atas rezeki yang sudah diberikan dan memohon berkat untuk menggunakan padi yang sudah disimpan dalam lumbung untuk keperluan pangan.

Dalam pada itu, isi doa tergantung pada ujudnya. Di lain waktu, tata kelakuan dan tata krama masyarakat menjadi acuan dalam susunan sistimatika doa (nyangahatn) tadi. Sebutlah misalnya, pernyataan tobat (mohon pengampunan Jubata), *muang sangar dosa* (membuang dosa) berbeda dengan doa *nyaru' Jubata ngaranto* (memanggil Jubata), atau doa-doa lainnya.

Bila dikaji seluruh isi sangahatn tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga bagian terpenting yang terjadi dalam upacara ritual Dayak Kanayaatn. *Pertama*, Pertobatan, pengakuan dan pengampunan; *Kedua*, melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan Jubata sebagai pernyataan kasih kepada Jubata dan secara khusus kepada padi yang menurut dongeng, padi itu sebagai adik bungsu manusia yang perlu dikasihani dan dipelihara. *Ketiga*, penutupan doa, diisi dengan permohonan untuk kesejahteraan pada tahun mendatang.

Tiga Dimensi

Pada hakekatnya Naik Dango menyangkut seluruh aspek budaya masyarakat Dayak kanayatn, namun setidaknya ada tiga aspek pokok yang dianggap paling dominan.

Pertama, aspek kehidupan masyarakat agraris. Dayak Kanayatn yang hidupnya ditunjang oleh bidang pertanian sulit melepaskan begitu saja dari cara hidup tradisi sebagai warisan nenek moyang. Naik Dangoa sebagai hasil budaya pertanian telah lama menyatu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan arti dan bobot tersendiri dalam pekerjaan selanjutnya.

Menurut tradisi, bilamana menginginkan keselamatan maka upacara ini harus dilaksanakan, apabila tidak niscaya akan mendatangkan malapetaka dalam kalender agraris mereka. Malapetaka yang dimaksud adalah tidak akan mendapat rezeki atau hasil yang diperoleh tidak akan diberkati. Oleh karena itu Naik Dango dalam masyarakat Dayak Kanayatn merupakan wu-jud tanggung jawab moral keluarga kepada Jubata Nek Panam-pa'.

Kedua, aspek religius. Sesuai dengan tujuannya sebagai ucapan syukur untuk memanfaatkan kembali hasil yang sudah disimpan, maka Naik Dango merupakan inti dalam kepercayaan tradisi Dayak Kanayatn. Melakukan upacara ritual dalam bentuk nyangahatn sebelum musim tanam, setelah musim tanam, panen

dan mengakhiri kalender agraris adalah kewajiban dalam masyarakat Dayak Kanayatn.

Sedangkan Palantar sebagai peralatan pokok yang diperlukan dalam nyangahatn tersebut terdiri dari *baras poe' baras sunguh, talo', angkabakng, mata duit* (ketan, beras biasa, telur, buah tengkawang, mata uang lama) dan tumpi' sunguh (sejenis cucur) yang diletakkan dalam piring putih. Sedangkan buisnya terdiri dari *tumpi' sunguh dan tumpi' gula, tungkat* (ketan yang dimasak dalam bambu tanpa garam, tanpa santan dan tanpa alas daun). *Rangkakng manok* yakni ayam yang sudah dipanggang dengan dada terbelah masih utuh dengan isi tubuh kecuali usus. Biasanya rangkakng manok diletakkan diatas pahar dengan posisi telentang.

Perangkat persembahan nyangahatn untuk di dango padi sekurang-kurangnya tiga rangkakng manok (ayam panggang) satu diantaranya pejantan. Sedangkan untuk di pabarasatn dan ka' sami' (di rumah adat) masing-masing satu ekor. Selain ayam panggang, masih terdapat sejumlah materi sasajen tambahan lainnya. Selain itu dipalantaran terdapat poe', tumpi' sunguh masing-masing sepiring dan *tungkat saroas* (sebatang tongkat), *baliukng man ai' panyasahatn* (beliung dan air pencuci).

Bahan tambahan lain seperti *baras banyu* (beras yang dicampur dengan minyak kelapa), *baras sasah* (yang dicuci) dan *langir minyak* (buah langir bercampur minyak kelapa).

Maka, dapat disimak betapa dalam makna religius dari acara Naik Dango. Ini adalah pencerminan sikap relegius masyarakat suku Dayak. Disayangkan, sampai kini masih ada yang beranggapan Naik Dango sebagai perwujudan pemujaan berhala dan tahyul, sehingga sulit menerimanya secara layak. Sehingga tidak mengherankan bentuk-bentuk penekanan terhadap ritual Naik Dango dipandang sebagai bentuk pemujaan yang terselubung yang dianggap tidak cocok lagi dengan agama moderen.

Ketiga, aspek kekeluargaan, solidaritas, dan persatuan. Penyelenggaraan Naik Dango yang dilakukan serentak dalam

wilayah kesatuan hukum adat tertentu (binua) memungkinkan untuk saling mengunjungi antara keluarga terdekat. Sebab pada hari itu semua anggota keluarga berkumpul di rumahnya masing-masing.

Jika antara binua yang satu dengan yang lain pelaksanaanya berbeda, maka keluarga-keluarga yang telah merayakan Naik Dango dapat mengunjungi keluarga-keluarga atau saudaranya yang sedang melaksanakan pesta Naik Dango. Dengan demikian hubungan keluarga baik intern maupun ekstern dapat dibina secara berkelanjutan. Dengan demikian, Naik Dango adalah hal yang hakiki dalam tata kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn.

Padi Sentris

Hampir seluruh upacara adat masyarakat Dayak Kanayatn selalu menggunakan padi dan atau beras yang kemudian diolah dalam aneka ragam dan bentuk yang sesuai dengan tuntutan adatnya. Upacara Naik Dango yang diselenggarakan setiap kali panen padi tahunan adalah sebagai salah satu konsekuensi logis penghormatan tertinggi itu tadi.

Sekarang yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Dayak umumnya dan Dayak Kanayatan khususnya adalah, semakin terbatasnya ruang gerak kegiatan agraris mereka akibat perkembangan faktor ekstern yang tidak didukung oleh kesiapan intern masyarakat Dayak itu sendiri.

Misalnya, kedudukan hukum tanah masyarakat transmigran jauh lebih terjamin dari pada status hukum tanah masyarakat adat. Masyarakat Dayak selalu diminta "kerelaannya" untuk menyerahkan tanah, baik oleh Badan Pertanahan maupun para pengusaha yang bermaksud membuka areal 'tidur' untuk tanaman yang sama sekali asing bagi masyarakat Dayak seperti kelapa sawit.

Dalam posisi ketakberdayaan semacam ini muncul anekdot di kalangan masyarakat Dayak, "*Naik dango ba kita' nang*

ba padi, kami dah ba sawit." Artinya, Naik Dango sajalah kalian yang memiliki padi, kami sudah tak memilikinya lagi selain kelapa sawit. Dan memang belum ada atau mungkin nanti ada budaya yang mengkulturkan secara religius 'kelapa sawit' untuk menggantikan padi.

***

19

UPACARA TIWAH, MENGANTAR ROH KE NEGERI ARWAH

Prof. KMA. M.Usop, MA.

Upacara Tiwah merupakan nama sebuah upacara kematian yang terdapat di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, yang bermukim di aliran sungai Kapuas, Kahayan, Sebangau, Katingan, Menyata, Seruyan dan sebagian Barito di empat kabupaten dari 6 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Upacara ini berkaitan dengan kepercayaan Kaharingan dalam hal mengantar roh ke negeri arwah (*Lelu Tatəw*).

Upacara Tiwah merupakan upacara kedua dalam rangkaian upacara kematian bagi pemeluk Hindu Kaharingan. Upacara ini diadakan setelah upacara yang mengirirngi pemakaman selesai. Namun upacara Tiwah ini tidak langsung diselenggarakan setelah upacara kematian pertama, melainkan selang setahun atau bahkan beberapa tahun kemudian.

Upacara Tiwah cukup mahal, karena harus ada imbalan bagi tenaga-tenaga penyelenggara termasuk untuk jamuan para undangan dari luar dan warga kampung, selama paling sedikit 7 hari 7 malam. Biayanya dapat mencapai puluhan juta rupiah.

Upacara Tiwah diadakan oleh sebuah keluarga. Biayanya ditanggung dan dikelola oleh keluarga, baik tingkat keluarga pertama, sepupu sekali (*ije tatu*), keluarga sepupu dua kali atau sepupu tiga kali (*hanjenan* dan *hararue*), maupun keluarga karena hubungan kewilayahan atau kesukuan (*babohan*).

Pengelolaannya beradasarkan prinsip gotong-royong (*handep*) dengan menekankan hak dan kewajiban yang sama. Seringkali pelaksanaan upacara melibatkan beberapa kampung. Untuk tertib pelaksanaan, maka berdasarkan hasil musyawarah (*pum-pung*) diantara para peserta (*anak-anak Tiwah*) ditunjuk seorang ketua panitia penyelenggara yang disebut *Bakas Tiwah*.

Persiapan upacara dilakukan jauh hari sebelumnya, bisa sampai kurang lebih satu bulan. Upacara ini biasanya diadakan setelah panen atau sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Negeri Arwah

Upacara Tiwah berkaitan dengan kepercayaan kepada *Ranging Mahatalata Langit* (sang pencipta) yang berada di alam atas; negeri para arwah, surga (*lelu tataw*). Karena manusia dan makhluk lainnya merupakan ciptaan dari *Ranging Mahatalata Langit* dan memiliki kekuatan dari roh tersebut, maka manusia harus kembali ke sumber hidup tersebut yang berada di Lelu Tataw. Negeri para arwah ini dilukiskan sebagai berikut:

Lelu Tataw hambaras bulau, negeri kaya berpasir emas, Rundung raja habusung hintan, istana rasja bergunung intan. Lelu tataw dia rumpoung tlang negewri kaya tak melelahkan tulang, Rundung raja isen kamalut uhat istana raja tak melemahkan urat.

Jalanan Upacara

Upacara Tiwah bermaksud mengantar roh dari negeri bawah yang diyakini fana dan material (*panungkop*) ke negeri atas yang abadi dan spiritual (*tungkop*). Rangkaian upacara memakan waktu 19 hari, dan diadakan secara terus menerus, siang dan malam.

Persiapan Tiwah memakan waktu 13 hari 13 malam, diawali dengan datangnya peserta (anak-anak Tiwah) ke rumah

atau ke kampung Bakas Tiwah. Kemudian dilakukan pembagian tugas kepada anak-anak Tiwah. Pada hari yang keenam diadakan acara mampunduk sahur, yaitu memberitahukan dan memanggil *'sahabat spiritual'* mereka melalui roh beras dalam acara tawur. Sajian untuk *'para sahabat'* itu kemudian digantung pada sebuah wadah di bawah atap rumah. Sajian itu dimaksudkan untuk memohon penjagaan roh-roh selama pelaksanaan Upacara Tiwah. Selepas itu acara Tiwah terdiri atas *Balian Patandak* (mengeluarkan roh dengan tuturan-tuturan), *Mangkang Sangiang* dan *Paturun Sangiang* (para balian membuat perangkat Tiwah), *Manarung Liau* (memberitahukan kepada para roh supaya bersiap-siap) dan *Lalohan* (menyambut para peyumbang).

Setelah upcara persipan selesai, maka dilanjutkan dengan upacara mengantar roh yang terdiri atas *Tabuh I, Marunduk Hanteran, Tabuh II, Basir Munduk, Tabuh III,* dan *Nyakean*. Upcara ini berlangsung selama 3 hari 3 malam.

Pada babak ketiga diadakan upacara pembebasan janda dan duda (*balo* dan *buyu*) yang terdiri atas: kangkahem dan membebas babu buyu. Babak ketiga ini diadakan selama sehari semalam.

Pada babak keempat, yaitu babak terakhir upacara Tiwah, diadakan upacara keselamatan. Acara ini terdiri atas: *Balian Patandak, Tantulak Dahiang, Balaku Untung* dan *Pali*. Upacara ini diadakan selama 2 hari 2 malam.

Beberapa Nilai

Dalam upacara Tiwah dapat ditemukan beberapa nilai yang menarik untuk dikaji dan diterapkan dalam kehidupan modern dewasa ini. Dari segi sosial budaya antara lain tercermin nilai-nilai:

1. Sikap hidup religius yang menjadi dasar motivasi penyelenggaraan seluruh rangkaian upacara.
2. Keseimbangan antara kewajiban duniawi dengan ilahi.

3. Hidup merupakan perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dan juga perjuangan moral.
4. Kerukunan dengan pememluk agama lain dan kewajiban menghormati kepercayaan leluhur.
5. Adanya keterbukaan untuk peran serta orang luar.
6. Penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepada kaum tua.
7. Sikap demokratis melalui musyawarah.
8. Ketelitian dan luasnya cakupan pikiran yang terangkum.
9. Tertib hukum dalam hubungan sosial dan tata cara keagamaan.
10. Sikap hidup dengan gairah yang tinggi.

Sedangkan dari segi sosial ekonomi dapat ditemukan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Solidaritas dan kerja sama dalam membiayai dan mengelola upacara.
2. Penerapan sistem anggaran belanja berimbang dengan sumbangan yang sesuai dengan kemampuan, baik berupa tenaga maupun dana.
3. Adanya keseimbangan antara hakdan kewajiban bagi setiap anak tiwah yang tampak dalam gotong-royong.
4. Adanya imbalan langsung maupun tidak bagi para anak tiwah.
5. Mendorong munculnya pasar musiman dan merupakan obyek wisata.

Tampak dari upacara Tiwah bahwa agama Hindu Kaharingan masih relevan dengan dunia modern. Penghormatan kepada para arwah menunjukkan sikap hidup spiritualistik yang menarik. Upacara ini memang memerlukan pembinaan agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat sendiri.

***

20

KAAMATAN, FESTIVAL PASCA PANEN RAKYAT SABAH

Benedict Topin*

Latar Belakang Sejarah

Sejak duhulu kala sudah terdapat praktik-praktik tradisi dari penduduk asli Sabah (khususnya suku Kadazandusun dan Murut) untuk mengadakan pesta pasca panen yangdilakukan setiap tahun. Inilah yang dikenal dengan sebutan *Pesta Kaamatan*. Pesta Kaamatan biasanya diadakan pada saat bulan purnama pertama pada setiap musim panen.Kemuncuan bulan purnama itu biasanya disebut sebagai masa *sawangs*. Selama sawangs masyarakat asli Sabah melakukan observasi yang tegas bahwa mereka telah melakukan kerja keras untuk mempersiapkan pesta bersama yang biasanya berlangsung dua sampai tiga hari.

Di daerah Tambunan terdapat tradisi keterlibatan masyarakat: besar kecil, tua muda, lelaki dan perempuan dalam persiapan pesta kaamatan. Para lelaki biasanya melakukan perburuan secara kelompok untuk menyediakan daging, sedangkan kaum perempuan menyediakan beras, tuak, dan persiapan masak-memasak pada hari pesta itu.

Pada tingkat kampung, pesta ini biasanya ditandai oleh Bobolians atau upacara balian perempuan Kadazan yang melakukan upacara terima kasih kepada semangat padi, yang disebut *Bambarayons*, atas panen yang melimpah. Upacara lain adalah pertandingan olah raga tradisional dan pertemuan lewat acara makan minum, menari dan menyanyi bersama.

Tingkat Daerah dan Negara Bagian

Dari tingkat kampung, pesta kaamatan dirayakan ke tingkat daerah, dan negara bagian. Hal ini diprakarsai oleh alm. OKK Sodomon (Ketua adat Keningau) pada tahun 1956, berkenaan dengan Konferensi Kepala Adat ke-6 tanggal 5-7 November 1956. Sodomon mengusulkan agar pemerintah daerah mengakui pesta kaamatan dan untuk itu agar diadakan liburan umum selama tiga hari. Proposal itu diperdebatkan namun pada akhirnya disetujui juga. Tanggal 24-26 April setiap tahun (periode sawangs) ditetapkan sebagai hari libur untuk merayakan pesta kaamatan, khususnya bagi suku kadazandusun dan Murut. Cara-cara perayaan diserahkan kepada masing-masing.

Pada saat bersamaan, pada saat pertemuan komite eksekutif masyarakat Kadazan kawasan Penampang (dekat kota Kinabalu) alm. tun Fuad Stephens mengusulkan agar liburan tidak terbatas pada suku Kadazandusun dan Murut saja, tetapi seluruh masyarakat North Borneo Sabah.

Pada tanggal 29 Juni 1960 diimbau kepada seluruh rakyat Sabah yang menggunakan tanah Sabah untuk menumbuhkan bahan makanan mereka harus merayakan pesta kaamatan setulus orang Kadazan. Dengan demikian pesta kaamatan peringkat negeri Sabah yang pertama dideklarasikan mulai tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 1960 di sekolah Santo Michael Penampang. Dua hari liburan resmi untuk merayakan kaamatan kemudian disetujui pemerintah negeri Sabah.

Pesta Kaamatan Tingkat Negeri Pertama

Pesta Kaamatan tingkat negeri Sabah yang pertama dimulai pada tanggal 30 Juni 1960. Dimulai dengan koor agung diikuti prosesi Perayaan Ekaristi. Empat belas kampung sekitar Penampang menampilkan berbagai tarian dan dansa. Untuk pertama kalinya pesta kaamatan disaksikan oleh pimpinan negeri Sabah dan utusan pemerintah dari seluruh Sabah.

Tiga ekor kerbau disembelih untuk pesta bagi ribuan orang. Instrumen musik dibunyikan tanpa henti. Acara lain termasuk pemilihan *Unduk Ngadau* (dara gawai).

Pesta kaamatan peringkat negeri Sabah ini merupakan langkah awal dari persatuan dan kesatuan berbagai etnik di Sabah. Dan ini merupakan titik awal perubahan nama Masyarakat Kadazan Penampang menjadi Asosiasi Kebudayaan Kadazan Penampang (Penampang Kadazan Cultural Association/ KCA). Pada awal tahun 1960-an, KCA membuka diri bagi seluruh Sabah. Dalam perkembangannya, KCA berubah nama menjadi Kadazandusun (KDCA).

Pada tahun 1986 pesta puncak perayaan Kaamatan tingkat negeri Sabah diubah menjadi tanggal 30 dan 31 Mei setiap tahunnya. Sedangkan rangkaian perayaan dimulai sejak 1 Mei, sehingga periode perayaan berlangsung selama satu bulan. Peluncuran pesta kaamatan biasanya dilakukan di Gedung Pusat KDCA yang disebut Hongkod Koisaan (pusat perpaduan) yang terletak di kota Kinabalu oleh *Huguan Siou* (pemimpin tertinggi) Kadazandusun Datuk Joseph Pairin Kitingan yang juga Ketua Menteri Sabah dan Presiden dari Partai Bersatu Sabah. Datuk Joseph Pairin Kitingan memegang jabatan ***huguan siou*** sejak 1982.

Signifikasi Pesta Kaamatan

Saat ini pesta kaamatan telah merupakan ajang pertunjuk-

kan warisan budaya rakyat Sabah. Ekspresi kultural berupa seni suara, musik tradisional, pertunjukkan drama tradisional, pertandingan dan olah raga tradisional. Selain itu pesta kaamatan juga diisi dengan pameran kebudayaan, hasil kerajinan, pameran haisl pertanian, pameran arsitektur setempat. Kesemuanya itu membuat pesta ini menjadi semarak dan meriah. Dengan demikian pesta kaamatan telah menjadi sarana untuk melestarikan dengan mengembangkan kebudayaan rakyat Sabah disamping sebagai kerangka persatuan dan kesatuan pada sebuah wilayah yang berpenduduk multi rasial.

Acara pesta kaamatan untuk tingkat kampung, daerah dan negara bagian bervariasi sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Namun jika dilakukan standarisasi ada 6 acara pokok. Yakni: (1) olah raga tradisional: perlombaan menunggang kerbau, menyumpit, tarik tambang, pancak (2) perlombaan masak-memasak makanan tradisonal: tuak, sayur mayur, kue tradisional (3) perlombaan pameran hasil panen terbaik: padi dan berbagai jenis sayuran (4) perlombaan musik, tarian dan nyanyian tradisional (5) pertunjukan upacara penghormatan semangat padi (6) perlombaan pemilihan dara gawai. Untuk tingkat negara bagian hal ini lebih bervariasi. Pada pokoknya suku Kadazandusun percaya akan adanya lima jenis semangat yang utama. Yakni: (1) *kiongan/minamangun* - Tuhan pencipta (2) *Koiduuduvo* - semangat orang hidup (3) *Tombiruo* atau *Tombivo* (antu/semangat orang mati) (4) *Rusod* - semangat hewan dan tumbuhan (5) *Rogon* atau *Ogon* (setan).

Beberapa Pikiran Kritis

Dalam perjalanan Kaamatan telah merupakan ajang pertunjukkan warisan budaya rakyat Sabah menghadapi masalah-masalah yang serupa dengan kelompok suku-suku asli lainnya di pulau Kalimantan.

Wilfred M Tangau, seorang peneliti dari Institute of Development Studies (IDS) Sabah, dalam buku Memori Pesta Kaamatan 1993 menulis tentang perubahan yang sedang terjadi pada suku Kadazandusun. *Pertama*, golongan intelektual cenderung untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Malaysia daripada bahasa daerah. *Kedua*, bahwa generasi muda semakin jauh dari relevansi dan signifikansi tradisi dan adat istiadat dan bentuk lainnya dari ekspresi, simbol, manifestasi kebudayaan Kadazandusun.

Merek lebih cenderung memilih budaya "alternatif" yang lebih glamour, seperti musik rok, disko, dan budaya konsumtif. Ketiga, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang disebut "*mitatabang*" menyerah terhadap sikap individualistis, materialistis, dan kompetisi tidak sehat. Ini pada gilirannya mengabaikan penghormatan terhadap orang tua dan sesama. Kini sulit untuk mendapatkan bantuan seseorang tanpa membayar gaji.

***